



Katalog BPS :

KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK DALAM RANGKA KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN

Tahun 2010



Badan Pusat Statistik



Katalog BPS :

**KEGIATAN PERCEPATAN
PENYEDIAAN DATA STATISTIK
DALAM RANGKA KEBIJAKAN
DANA PERIMBANGAN
Tahun 2010**



Badan Pusat Statistik

**KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK
DALAM RANGKA KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2010**

ISBN :

No. Publikasi :

Katalog BPS :

Ukuran Buku : 16,3 cm x 23,3 cm

Jumlah Halaman : xii + 124 Halaman

Naskah :

Sub Direktorat Konsistensi Statistik

Gambar Kulit :

Sub Direktorat Konsistensi Statistik

Diterbitkan Oleh :

Badan Pusat Statistik, Jakarta, Indonesia

Dicetak oleh :

CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Pusat Statistik diminta Pemerintah melalui Menteri Keuangan dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor: S-31/MK.07/2008 tanggal 12 Februari 2008 untuk menyiapkan data yang akan dijadikan dasar alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2010. Data dasar tersebut terdiri dari: Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 2008, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2009.

Salah satu keputusan rapat Panitia Kerja Dana Perimbangan DPR RI dan Pemerintah pada bulan Mei 2003, dalam rangka Dana Alokasi Umum (DAU) 2004 dan tahun-tahun selanjutnya, adalah meningkatkan akurasi data dasar penghitungan DAU. Sehubungan dengan hal tersebut maka BPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas data, antara lain dengan melakukan pengecekan lapangan dan konsolidasi berupa diskusi antara petugas pengumpul data di seluruh kabupaten/kota dengan petugas BPS Provinsi dan BPS Pusat yang dilakukan di masing-masing provinsi. Dari pengecekan lapangan dan diskusi tersebut diharapkan diperoleh data yang valid, akurat, dan terkini.

Buku laporan ini terdiri dari: Pendahuluan, Penjelasan Teknis (*Technical Notes*), dan Tabel Ringkasan (*Summary Table*) yang berisi data dasar empat variabel, yaitu : Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2008, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 2008, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2009.

Jakarta, Desember 2009

Tim Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik

Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun anggaran 2010

Badan Pusat Statistik

Pengarah : Pimpinan Badan Pusat Statistik

Anggota : Supriyanto, SE, MA
Wiwiek Arumwaty S, MSi
Dr. Wendy Hartanto
Dr. Ir. Sasmito Hadiwibowo, MSc
Yomin Tofri, MA
Dra. Sri Kusumowati
Margo Yuwono, M.Si
Rini Savitri Dina, MA

Asisten : Harmawanti Marhaeni, M.Sc
Nur Indah kristiani, S. Si
M. Firmansyah Rifai, SE
Ika Luswara, S.Si

Penyiapan Naskah : Henri Asri Reagan, S.St
Ari Shobri Bukhari, S.St

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Kualifikasi Data.....	3
1.3 Permasalahan.....	4
1.3.1 Cakupan.....	4
1.3.2 Sensus dan Survei.....	4
1.3.3 Waktu.....	5
1.4 Pelaksanaan.....	5
1.4.1 Jadwal Waktu.....	5
1.4.2 Kegiatan Lapangan.....	5
1.4.3 Pengolahan dan Rekonsiliasi Data.....	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	6
II. PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2009.....	7
2.1 Sumber Data.....	9
2.2 Konsep Penduduk.....	10
2.3 Metode Proyeksi.....	10
2.4 Rumus Proyeksi.....	11
2.5 Tahapan Penghitungan.....	11
2.6 Ulasan Ringkas.....	12
2.6.1 Persebaran Penduduk.....	12
2.6.2 Kepadatan Penduduk.....	14
2.6.3 Penduduk Kabupaten/Kota.....	16
III. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2008.....	17
3.1 Pendahuluan.....	19
3.1.1 Pengertian Pembangunan Manusia.....	19
3.1.2 Sumber Data.....	20
3.1.3 Komponen IPM dan Konsep.....	20
3.2 Metodologi.....	21

3.3 Tahapan Penghitungan	22
3.4 Ulasan Ringkas	25
3.4.1 Capaian IPM Provinsi	25
3.4.2 Status Pembangunan Provinsi	28
3.4.3 Capaian IPM Kabupaten/Kota	29
3.4.4 Status Pembangunan Kabupaten/Kota	31
3.4.5 Disparitas Pembangunan Manusia	32
IV. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)	37
4.1 Pendahuluan	39
4.1.1 Konsep dan Definisi	39
4.1.2 Tujuan	39
4.1.3 Ruang Lingkup dan Sumber Data	40
4.1.4 Kegiatan Pengumpulan Data	40
4.2 Metodologi	41
4.2.1 Paket Komoditas	42
4.2.2 Diagram Timbang (DT) atau Bobot	42
4.2.3 Formula Penghitungan	43
4.3 Ulasan Ringkas	44
V. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	55
5.1 Pengertian dan Definisi	57
5.1.1 PDRB	57
5.1.2 Output	57
5.1.3 Input Antara	58
5.1.4 Nilai Tambah	58
5.1.5 Harga Berlaku	58
5.1.6 Harga Konstan	58
5.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data	59
5.3 Kegiatan Pengumpulan Data	59
5.4 Metode Penghitungan	60
5.4.1 Pendekatan Produksi	60
5.4.2 Pendekatan Pengeluaran	60
5.4.3 Pendekatan Pendapatan	60
5.5 PDRB Kabupaten/Kota	60
5.6 PDRB untuk Penghitungan DAU	61
5.7 Ulasan Ringkas	61
5.7.1 Peranan PDRB Provinsi Seluruh Indonesia	61

5.7.2 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia	65
5.7.3 Perbandingan PDRB Per Kapita Indonesia	69
5.7.4 Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota	72
5.7.5 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota 2008	79
TABEL RINGKASAN	83
LAMPIRAN	103

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Dua Puluh (20) Besar Penduduk Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009	16
Gambar 3.1	Provinsi dengan IPM Tertinggi Tahun 2007-2008.....	25
Gambar 3.2	Provinsi dengan IPM Terendah Tahun 2007-2008.....	26
Gambar 3.3	Kisaran IPM Tingkat Provinsi Tahun 2008.....	27
Gambar 3.4	Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2008	33
Gambar 3.5	Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2006	35
Gambar 4.1	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat.....	47
Gambar 4.2	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Tengah	48
Gambar 4.3	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur	49
Gambar 4.4	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera	50
Gambar 4.5	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara	51
Gambar 4.6	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Kalimantan.....	52
Gambar 4.7	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Sulawesi	52
Gambar 4.8	Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua.....	53
Gambar 5.1	Peranan PDRB Provinsi dalam pembentukan ekonomi Indonesia dengan migas dan tanpa migas, 2008	64
Gambar 5.2	Laju pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas, 2008.....	68
Gambar 5.3	Laju pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas,2008	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2009	13
Tabel 2.2	Kepadatan Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2009.....	15
Tabel 3.1	Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM	23
Tabel 3.2	Daftar paket komoditi yang digunakan dalam penghitungan PPP	24
Tabel 3.3	IPM Provinsi dan kategori IPM.....	28
Tabel 3.4	Status Pembangunan Provinsi, 2008	29
Tabel 3.5	Kabupaten dan Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah Tahun 2008.....	30
Tabel 3.6	Sepuluh Kabupaten dan Kota yang Menghasilkan Reduksi <i>Shortfall</i> Terbesar Tahun 2007-2008	31
Tabel 3.7	Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, Tahun 2008.....	34
Tabel 4.1	Kabupaten/Kota Pemekaran.....	46
Tabel 5.1	PDRB dan Peranan PDRB Provinsi Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dengan dan Tanpa Migas, 2008	62
Tabel 5.2	PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Dengan dan Tanpa Migas, 2008.....	66
Tabel 5.3	PDRB Per Kapita Provinsi-Provinsi Seluruh Indonesia Dengan dan Tanpa Migas, 2008	71
Tabel 5.4	Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi, Tahun 2008.....	73
Tabel 5.5	Karakteristik Ekonomi 20 Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi, 2008	74
Tabel 5.6	Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi di Tiap Provinsi Tahun 2008 (Triliun Rupiah)	76
Tabel 5.7	Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan PDRB Terendah, Tahun 2008.....	78
Tabel 5.8	Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan PDRB Per Kapita Tertinggi dan Terendah, 2008	79

Tabel 5.9	Kabupaten/Kota dengan PDRB Per Kapita Tertinggi dan Terendah di Tiap Provinsi, 2008	82
Tabel A.1	Data Dasar Penghitungan DAU 33 Provinsi, Tahun 2010.....	85
Tabel A.2	Data Dasar Penghitungan DAU 33 Provinsi, Tahun 2010	82

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peta Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Pertengahan Tahun 2009	105
Lampiran 2	Peta Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2008	106
Lampiran 3	Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi Tahun 2009	107
Lampiran 4	Peta PDRB Per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2008 .	108
Lampiran 5	Peta Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2008	109
Lampiran 6	Peta Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2008	110
Lampiran 7	Peta Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2008	111
Lampiran 8	Peta Paritas Daya Beli Menurut Provinsi Tahun 2008 .	112
Lampiran 9	Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera	113
Lampiran 10	Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Jawa.....	114
Lampiran 11	Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara.....	115
Lampiran 12	Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan	116
Lampiran 13	Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi	117
Lampiran 14	Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua	118
Lampiran 15	Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera.....	119
Lampiran 16	Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Jawa	120
Lampiran 17	Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara	121
Lampiran 18	Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan	122
Lampiran 19	Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi	123

Lampiran 20 Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua	124
--	-----

<http://www.bps.go.id>



Pendahuluan



1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama delapan tahun terakhir, DAU merupakan salah satu sumber pendapatan utama pendapatan Pemerintah Daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional, dan merata.

Sehubungan dengan keperluan tersebut maka BPS sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, diminta untuk menyediakan data yang akan digunakan dalam penghitungan DAU 2010 dengan kualifikasi seperti tersebut di atas. Data tersebut adalah Jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

1.2. Kualifikasi Data

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR dengan BPS pada tanggal 22 Januari 2003 mengusulkan agar BPS meningkatkan kualitas data untuk keperluan penghitungan DAU 2004 dan tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan kualitas data tersebut meliputi: pertama, meningkatkan validitas data agar dapat menggambarkan kondisi riil daerah yang sebenarnya dengan

memperbaiki konsep dan definisi variabel; kedua, meningkatkan akurasi data dengan memperluas cakupan dan cara penghitungan; dan ketiga, pemutakhiran data dengan mempercepat pengumpulan data yang selama ini mengalami keterlambatan (*time gap*). Dalam upaya peningkatan kualitas data tersebut, maka BPS bekerjasama dengan Direktorat Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan melakukan kegiatan percepatan penyediaan data variabel DAU yang mencakup data Jumlah Penduduk, IPM, IKK, dan PDRB Provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.

1.3. Permasalahan

1.3.1. Cakupan

Kegiatan pengadaan dan percepatan data variabel DAU Tahun Anggaran 2009 ini mencakup wilayah yang sangat luas dengan tingkat keragaman yang tinggi, terdiri dari 477 kabupaten/kota yang terbagi dalam 33 Provinsi

1.3.2. Sensus dan Survei

Sensus dan survei yang merupakan sumber utama data BPS dilaksanakan pada periode tertentu (sebagai contoh Sensus Penduduk 10 tahun sekali, Susenas Modul Konsumsi 3 tahun sekali, Survei Harga dan PDRB setiap tahun dengan cakupan terbatas). Sementara itu, data yang dibutuhkan untuk penghitungan DAU bersifat tahunan dan mencakup semua wilayah administrasi kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan antara kebutuhan data dan ketersediaan data pada tingkat wilayah kecil. Untuk menutup kesenjangan ini, maka dilakukan penyesuaian (penambahan sampel), proyeksi dan proksi terhadap data hasil survei dan pengumpulan data yang ada seperti P4B, Survei Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi, Susenas, dan sumber data lainnya.

1.3.3. Waktu

Waktu yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan data variabel DAU 2009, adalah selama 7 bulan mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data, dan penghitungan data DAU 2009.

1.4. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyediaan data IKK dan PDRB dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan BPS Pusat. Sedangkan kegiatan penyediaan data jumlah penduduk dan IPM dilakukan di BPS Pusat.

1.4.1. Jadwal Waktu

- a. Perencanaan integrasi kegiatan IKK dan SHPB-Konstruksi, Januari sampai dengan Mei 2009.
- b. Pengolahan dan rekonsiliasi data IPM, PDRB dan Jumlah Penduduk, April sampai dengan Agustus 2009.
- c. Evaluasi hasil dan penyusunan laporan, September 2009.
- d. Pencetakan hasil, Oktober 2009.

1.4.2. Kegiatan Lapangan

Dari empat variabel DAU yang dibutuhkan, hanya dua variabel yang lengkap cakupannya sampai dengan 477 kabupaten/kota, yaitu Data Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia. Dua variabel lain yaitu PDRB dan IKK masih dikumpulkan dari lapangan untuk melengkapi dan memperbaharainya. Dalam hal ini peranan BPS Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sangat besar dalam proses pengumpulan data lapangan yang lengkap dan mutakhir.

1.4.3. Pengolahan dan Rekonsiliasi Data

Tingkat heterogenitas yang tinggi, baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam provinsi, membutuhkan proses

pengolahan data yang lama. Heterogenitas yang dimaksud adalah data variabel ekonomi menyebar dan berfluktuasi tidak sesuai dengan penyebaran wilayah administratif, melainkan mengikuti jalur distribusinya. Oleh karena itu, diperlukan adanya rekonsiliasi data Kabupaten/Kota dalam provinsi untuk menjaga konsistensi dan agregasi data.

1.5. Sistematika Penyajian Laporan

Laporan hasil pengadaaan data dasar DAU 2010 terdiri dari penjelasan teknis kegiatan masing-masing variabel, yaitu: Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Produk Domestik Regional Bruto yang dirangkum menjadi satu.

Dalam laporan ini juga dilengkapi dengan tabel ringkasan (*summary table*) yang berisi data dasar empat variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU 2010. Selain itu, laporan ini dilengkapi dengan lampiran yang berisi peta tematik jumlah penduduk, IPM, IKK dan PDRB menurut provinsi.



II

Penduduk Pertengahan Tahun



Jumlah penduduk merupakan salah satu variabel penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Data penduduk yang dibutuhkan adalah jumlah penduduk per kabupaten/kota kondisi pertengahan tahun. Sejauh ini, proyeksi penduduk yang dihitung BPS hanya tersedia secara nasional dan tingkat provinsi. Oleh sebab itu, sejak tahun 2003 BPS mulai melakukan penghitungan proyeksi/estimasi penduduk per kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan data dasar penduduk untuk keperluan penghitungan DAU. Berbeda dengan proyeksi penduduk nasional dan per provinsi yang dihitung dengan metode komponen, maka data penduduk per kabupaten/kota ini dihitung dengan metode Geometrik. Pada saat hasil Sensus Penduduk maupun Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang terakhir tersedia, maka hasil tersebut dipakai sebagai data dasar penduduk untuk memproyeksikan penduduk per kabupaten/kota tahun-tahun berikutnya. Mulai tahun 2007, jumlah penduduk kabupaten/kota dikontrol dengan jumlah penduduk provinsi hasil proyeksi dengan metode komponen.

2.1 Sumber Data

- Penduduk yang dipakai untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2010 adalah penduduk pada pertengahan tahun 2009 (Juni 2009).
- Data dasar yang dipakai adalah jumlah penduduk kondisi Juni 2005, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005.
- NAD, Nias, dan Nias Selatan menggunakan data dasar hasil Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) yang dilaksanakan September 2005.
- Data penduduk hasil SUPAS 2005 dan data penduduk pertengahan tahun 2008 juga digunakan untuk menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun.

2.2 Konsep Penduduk

- Konsep penduduk pada pelaksanaan SUPAS 2005 sama seperti konsep penduduk yang digunakan pada SP 2000 maupun P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan) 2003.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- Batasan lamanya tinggal diaplikasikan dalam konsep anggota rumah tangga, yang selanjutnya dipakai untuk menentukan seseorang terhitung sebagai penduduk di suatu wilayah tertentu.
- Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
- Penduduk mencakup penduduk yang bertempat tinggal tetap dan penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap, seperti tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil, dan pengungsi.

2.3 Metode Proyeksi

- Proyeksi penduduk per kabupaten/kota bulan Juni 2009 dilakukan dengan metode Geometrik, dimana penduduk diproyeksikan mengikuti pola regresi logistik.
- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun yang dipakai adalah LPP per tahun periode 2005-2008 dan dihitung dengan metode yang sama.

2.4 Rumus Proyeksi

- Rumus proyeksi penduduk yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

dimana :

- P_t = jumlah penduduk pada tahun t atau penduduk yang diproyeksikan
- P_0 = jumlah penduduk pada tahun 0 atau penduduk dasar
- t = jumlah tahun antara tahun 0 dan tahun t
- r = laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun
- Jumlah kabupaten/kota pada Sensus Penduduk tahun 2000 hanya sebanyak 341 kabupaten/ kota, selanjutnya terjadi pemekaran wilayah menjadi 457 kabupaten/kota di tahun 2005. Pada tahun 2009, jumlah kabupaten/kota yang dihitung untuk keperluan DAU adalah 477 kabupaten/kota. Oleh sebab itu, wilayah administrasi data penduduk tahun 2000 dan 2005 dan 2008 disesuaikan dengan wilayah administrasi terbaru.
- Penyesuaian jumlah penduduk dilakukan dengan penelusuran pembagian cakupan wilayah sesuai SK pembentukan kabupaten/kota.

2.5 Tahapan Penghitungan

- Menyiapkan data dasar jumlah penduduk bulan Juni 2005 hasil SUPAS 2005.
- Data SUPAS 2005 sudah disesuaikan dengan kondisi pemekaran terakhir.
- Menyiapkan data penduduk tahun 2008 untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota.
- Menyiapkan data penduduk nasional dan provinsi tahun 2009 hasil Proyeksi Penduduk 2005-2015 yang akan digunakan sebagai kontrol jumlah penduduk provinsi dalam menghitung proyeksi penduduk kabupaten/kota tahun 2009.
- Menghitung laju pertumbuhan penduduk per tahun periode 2005-2008 untuk masing-masing kabupaten/kota.

- Menghitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota tahun 2009 untuk masing-masing provinsi.
- Iterasi jumlah penduduk hasil penjumlahan angka kabupaten/kota dengan proyeksi penduduk provinsi.
- Pengecekan hasil proyeksi disesuaikan dengan pola laju pertumbuhan penduduk.
- Menghitung estimasi penduduk kabupaten/kota pemekaran baru dengan cara menggunakan proporsi penduduk kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota induknya berdasarkan data Sensus Penduduk (SP) 2000 atau menggunakan data-data pendukung lainnya dari berbagai sumber.
- Hasil proyeksi dikonfirmasi ke masing-masing BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

2.6 Ulasan Ringkas

2.6.1. Persebaran Penduduk

Tabel 2.1 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia pertengahan tahun 2009 sebesar 231.369.500 jiwa. Sebagian besar penduduk Indonesia berada di pulau Jawa yaitu 134.160.021 jiwa atau sekitar 57,99 persen dari total penduduk Indonesia pertengahan tahun 2009. Kemudian di ikuti oleh Pulau Sumatera dengan penduduk sebesar 49.615.454 jiwa atau sebesar 21,44 persen dari total penduduk Indonesia.

Dari Tabel 2.1 provinsi yang paling banyak penduduknya adalah Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk sebesar 41.501.564 jiwa atau sebesar 17,94 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua adalah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk sebesar 37.286.246 jiwa atau sebesar 16,12 persen dari total penduduk Indonesia.

**Tabel 2.1 Persebaran Jumlah dan Persentase Penduduk Indonesia
Pertengahan Tahun 2009**

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	Persen- tase
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pulau Sumatera	49.615.454	21,44
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.363.477	1,89
2	Sumatera Utara	13.248.386	5,73
3	Sumatera Barat	4.827.973	2,09
4	Riau	5.306.533	2,29
5	Kepulauan Riau	1.515.294	0,65
6	Jambi	2.834.164	1,22
7	Sumatera Selatan	7.222.635	3,12
8	Bangka Belitung	1.138.129	0,49
9	Bengkulu	1.666.920	0,72
10	Lampung	7.491.943	3,24
	Pulau Jawa	134.160.021	57,99
11	DKI Jakarta	9.223.000	3,99
12	Jawa Barat	41.501.564	17,94
13	Banten	9.782.779	4,23
14	Jawa Tengah	32.864.563	14,20
15	DI Yogyakarta	3.501.869	1,51
16	Jawa Timur	37.286.246	16,12
	Pulau Kalimantan	13.065.884	5,65
17	Kalimantan Barat	4.319.142	1,87
18	Kalimantan Tengah	2.085.819	0,90
19	Kalimantan Selatan	3.496.125	1,51
20	Kalimantan Timur	3.164.798	1,37
	Pulau Sulawesi	16.767.630	7,25
21	Sulawesi Utara	2.228.856	0,96
22	Gorontalo	983.952	0,43
23	Sulawesi Tengah	2.480.264	1,07
24	Sulawesi Selatan	7.908.519	3,42
25	Sulawesi Barat	1.047.739	0,45
26	Sulawesi Tenggara	2.118.300	0,92
	Pulau Bali & Nusa Tenggara	12.604.676	5,45
27	Bali	3.551.009	1,53
28	Nusa Tenggara Barat	4.434.012	1,92
29	Nusa Tenggara Timur	4.619.655	2,00
	Pulau Maluku & Papua	5.155.835	2,23
30	Maluku	1.339.503	0,58
31	Maluku Utara	974.990	0,42
32	Papua	2.097.482	0,91
33	Papua Barat	743.860	0,32
	Indonesia	231.369.500	

Sedangkan Provinsi yang memiliki penduduk terkecil adalah Provinsi Papua Barat dengan jumlah penduduk 743.860 jiwa atau hanya sebesar 0,32 persen dari total penduduk Indonesia. Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terkecil kedua adalah Provinsi Maluku Utara dengan jumlah penduduk sebesar 974.990 jiwa atau 0,42 persen.

2.6.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2009 sebagian besar masih berpusat di pulau Jawa. Kepadatan penduduk terbesar terletak di Provinsi DKI Jakarta yaitu sekitar 13.889,85 jiwa/km², diikuti Jawa Barat dan DI Yogyakarta masing-masing sebesar 1.173,10 jiwa/km², dan 1.117,68 jiwa/km². Disisi lain, Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk terendah dimana per km² hanya dihuni sekitar 6,57 jiwa dan 7,63 jiwa. Perbedaan ini menunjukkan disparitas kepadatan penduduk yang cukup tinggi antar provinsi di Indonesia.

Tabel 2.2 Kepadatan Penduduk Indonesia Pertengahan Tahun 2009

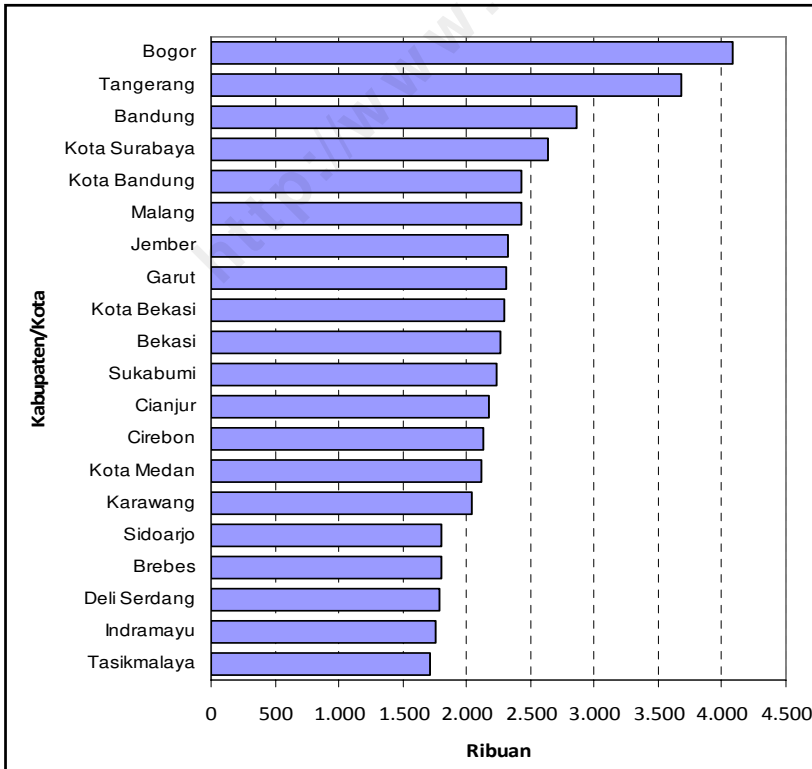
No	Provinsi	Kepadatan Penduduk Pertengahan Tahun 2009 (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	75,29
2	Sumatera Utara	181,53
3	Sumatera Barat	114,92
4	Riau	60,98
5	Kepulauan Riau	184,75
6	Jambi	56,62
7	Sumatera Selatan	78,86
8	Bangka Belitung	69,30
9	Bengkulu	83,68
10	Lampung	216,38
11	DKI Jakarta	13.889,85
12	Jawa Barat	1.173,10
13	Banten	1.012,40
14	Jawa Tengah	1.001,95
15	DI Yogyakarta	1.117,68
16	Jawa Timur	780,05
17	Kalimantan Barat	29,32
18	Kalimantan Tengah	13,58
19	Kalimantan Selatan	90,24
20	Kalimantan Timur	15,47
21	Sulawesi Utara	160,91
22	Gorontalo	87,41
23	Sulawesi Tengah	40,11
24	Sulawesi Selatan	169,28
25	Sulawesi Barat	62,41
26	Sulawesi Tenggara	55,65
27	Bali	614,36
28	Nusa Tenggara Barat	238,74
29	Nusa Tenggara Timur	94,82
30	Maluku	28,55
31	Maluku Utara	30,49
32	Papua	6,57
33	Papua Barat	7,67

2.6.3 Penduduk Kabupaten/Kota

Gambar 2.1 menunjukkan peringkat 20 besar jumlah penduduk menurut kabupaten/kota di Indonesia. Hampir semuanya didominasi oleh kabupaten/kota di pulau Jawa. Dari luar Jawa hanya berasal dari Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan dan Kabupaten Deli Sedang.

Kabupaten Bogor menempati peringkat pertama jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sekitar 4,1 juta jiwa. Sedangkan urutan kedua adalah Kabupaten Tangerang sekitar 3,7 juta jiwa dan urutan ketiga adalah Kabupaten Bandung dengan jumlah penduduk 2,9 juta jiwa.

Gambar 2.1 Dua Puluh (20) Besar Penduduk Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun 2009





Indeks Pembangunan Manusia



3.1. Pendahuluan

3.1.1. Pengertian Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah Indeks pembangunan Manusia (IPM).

Beberapa penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia;

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas hidup manusia. IPM dibangun melalui pendekatan 3 dimensi, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak.
- (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).
- (3) IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusianya.
- (4) IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- (5) Secara berkala, data IPM digunakan sebagai salah satu indikator dalam penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).
- (6) IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia. Indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia utamanya data Susenas disamping Sensus Penduduk (SP2000) dan SUPAS 2005. Untuk IPM 2008, data yang digunakan meliputi Susenas Kor Juli 2008, Susenas Panel Maret 2008, dan IHK 2008. Susenas Kor Juli 2008 digunakan untuk menghitung indikator Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah (MYS). Untuk Angka Harapan Hidup (e0) dihitung menggunakan *modeling* berdasarkan data SP2000, SUPAS 2005 dan Susenas 2005 dan Susenas 2006. Sedangkan Susenas Panel Maret 2008 digunakan untuk menghitung daya beli yang didasarkan pada 27 komoditi. Indeks Harga Konsumen (IHK) 2008 digunakan untuk *men-deflate* harga implisit dari 27 komoditi pada Susenas Panel Maret 2008 untuk memperoleh harga pada kondisi bulan Juni tahun 2008.

3.1.3. Komponen IPM dan Konsep

- **Angka Melek Huruf penduduk dewasa** : Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- **Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (e0)**: Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
- **Rata-rata Lama Sekolah**: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
- **Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity = PPP*)**: Indikator ekonomi yang digunakan untuk melakukan perbandingan harga-harga riil antar wilayah provinsi dan antar kabupaten/kota. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu daerah (provinsi/kabupaten) memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung

berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan *utilitas marginal* yang dihitung dengan formula Atkinson.

- **Reduksi *Shortfall*:** Mengukur keberhasilan pembangunan manusia dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM= 100). Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan asumsi, laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

3.2. Metodologi

- Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPACK (metode Trussel dengan model West), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).
- Angka Melek Huruf, menghitung proporsi penduduk yang dapatbaca tulis.
- Rata-rata Lama Sekolah, menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menjalani sekolah.
- Paritas Daya Beli dihitung dengan proses sebagai berikut:
 1. Y : Pengeluaran per kapita
 2. Y1: $Y+(Y*20\%)$
 3. Y2: Nilai Riil Y1 → deflasi, IHK
 4. PPP → didasarkan 27 komoditi (lihat Tabel 3.2)

$$PPP = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(9,j)} Q_{(i,j)}}$$

$E_{(i,j)}$ = Pengeluaran untuk komoditi j di provinsi i

$P_{(9,j)}$ = Harga komoditi j di Jakarta Selatan

$Q_{(i,j)}$ = Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi i

5. Y3: Y2/PPP
6. Y4: Menghitung nilai Y3 dengan formula Atkinson

Formula Atkinson

$$\begin{aligned}
 C_{(i)*} &= C_{(i)} && ; \text{ jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && ; \text{ jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && ; \text{ jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && ; \text{ jika } 3Z < C_{(i)} < 4Z
 \end{aligned}$$

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara *arbiter* sebesar Rp. 549.500,- per kapita per tahun atau Rp. 1.500, per kapita per hari.

3.3. Tahapan Penghitungan

Untuk menghitung IPM, maka setiap komponen dihitung indeksnya.

Formula penghitungannya sebagai berikut;

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

$X_{(i,j)}$ = Indeks komponen ke-i dari daerah j

$X_{(i-\min)}$ = Nilai minimum dari X_i

$X_{(i-\max)}$ = Nilai maksimum dari X_i

} Standar UNDP

Dengan menggunakan formula di atas, Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan, dan Indeks Daya Beli dapat dihitung. Nilai minimum dan maksimum merupakan angka standar UNDP (lihat Tabel 3.1).

- Indeks Lamanya Hidup
Indeks $X_1 = (X_1 - 25)/(85 - 25)$
- Indeks Pendidikan terdiri dari dua komponen:
Indeks Melek Huruf
Indeks $X_{21} = (X_{2.1} - 0)/(100 - 0)$
Indeks Lama Sekolah
Indeks $X_{22} = (X_{2.2} - 15)/(15 - 0)$
Indeks $X_2 = [2/3 (\text{indeks melek huruf})] + [1/3 (\text{indeks rata-rata lama sekolah})]$
- Indeks Pengeluaran Riil
Indeks $X_3 = (Y_4 - 360)/(732,72 - 300)$
- Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \frac{\text{indeks}(X_1) + \text{indeks}(X_2) + \text{indeks}(X_3)}{3}$$

Tabel 3.1 Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrolment ratio</i>
Daya Beli	737.720 ^{a)}	300.000 (1996) 360.000 ^{b)} (1999)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

a)Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b)Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Tabel 3.2 Daftar paket komoditi yang digunakan dalam penghitungan PPP

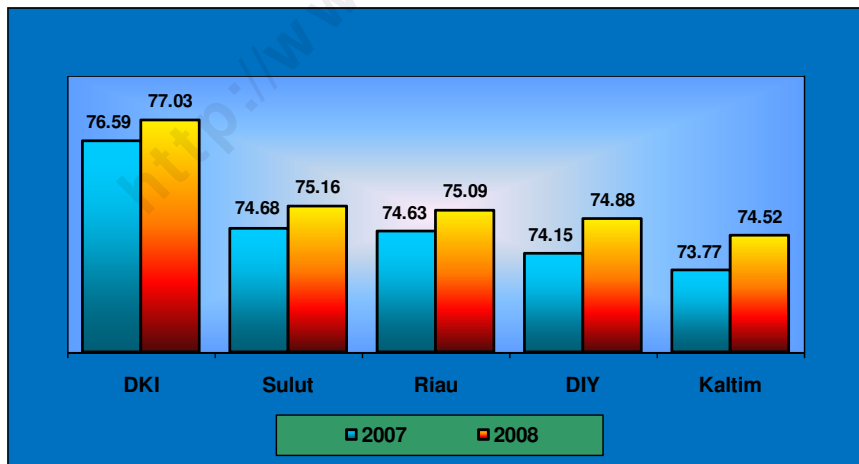
Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi (%)
1. Beras Lokal	Kg	7,25
2. Tepung terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu kental manis	397 Gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,30
11. Kacang panjang	Kg	0,32
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,60
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica	Ons	0,13
21. Mie instan	80 Gram	0,79
22. Rokok kretek	10 batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air minum	M3	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak tanah	Liter	1,74
27. Sewa Rumah	Unit	11,56
Total		37,52

3.4. Ulasan Ringkas

3.4.1. Capaian IPM Provinsi

Perkembangan IPM provinsi di Indonesia menunjukkan suatu peningkatan. Rata-rata nilai IPM untuk nasional pada tahun 2008 sebesar 71,17 sementara pada tahun 2007 sebesar 70,59. Angka ini menutupi variasi nilai IPM antar provinsi, padahal terdapat perbedaan pencapaian IPM. Perbedaan pencapaian antara IPM tertinggi dengan IPM terendah sekitar 13,03 poin dengan rentang 77,03 untuk DKI Jakarta dan 64,00 untuk Papua. Dibandingkan dengan perbedaan pencapaian tahun 2007 yang sebesar 13,2 poin, maka perbedaan tahun 2008 relatif lebih rendah. Hal ini dapat diartikan bahwa disparitas pembangunan manusia di tingkat provinsi relatif menurun.

Gambar 3.1 Provinsi dengan IPM Tertinggi Tahun 2007-2008



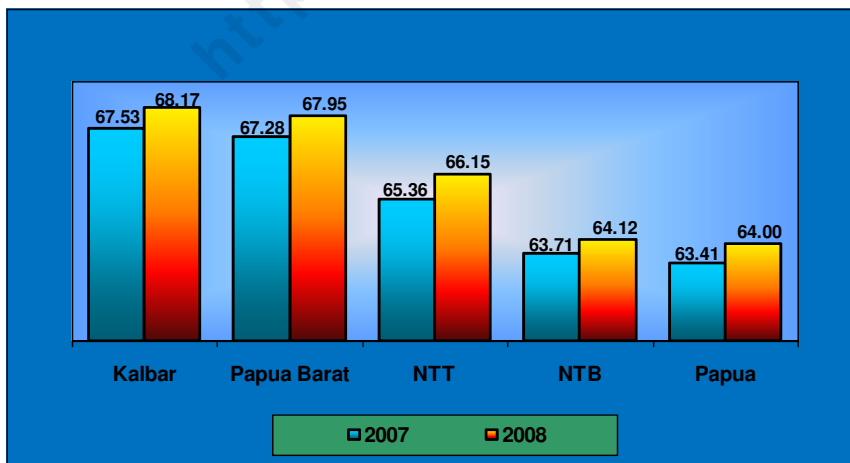
Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2008 DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan IPM tertinggi yaitu mencapai 77,03. Kemudian berturut-turut diikuti oleh provinsi Sulawesi Utara sebesar 75,16, provinsi Riau sebesar 75,09, provinsi DI.Yogyakarta

sebesar 74,88, dan provinsi Kalimantan Timur sebesar 74,52 (Gambar 3.1). Berdasarkan historinya selama tiga tahun terakhir keempat provinsi ini selalu tercatat sebagai empat provinsi terbaik dalam pembangunan manusia, kecuali untuk provinsi Kalimantan Timur baru 2 tahun terakhir ini masuk dalam kelompok 5 provinsi dengan IPM tertinggi. Sebelumnya urutan kelima ditempati oleh provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu, posisi Kalimantan Tengah turun ke urutan ke tujuh selama dua tahun berturut-turut.

Papua merupakan provinsi dengan pencapaian IPM terendah, yaitu sebesar 64,00. Selanjutnya empat provinsi lain yang memiliki IPM terendah berturut-turut adalah Nusa Tenggara Barat (64,12), Nusa Tenggara Timur (66,15), Papua Barat (67,95), dan Kalimantan Barat (68,17). (Gambar 3.2). Dua tahun berturut-turut provinsi Kalimantan Barat berada pada posisi kelima terendah, menggantikan posisi provinsi Sulawesi Barat yang pada tahun 2007 berada di posisi keenam terendah, dan tahun 2008 di posisi ketujuh terendah.

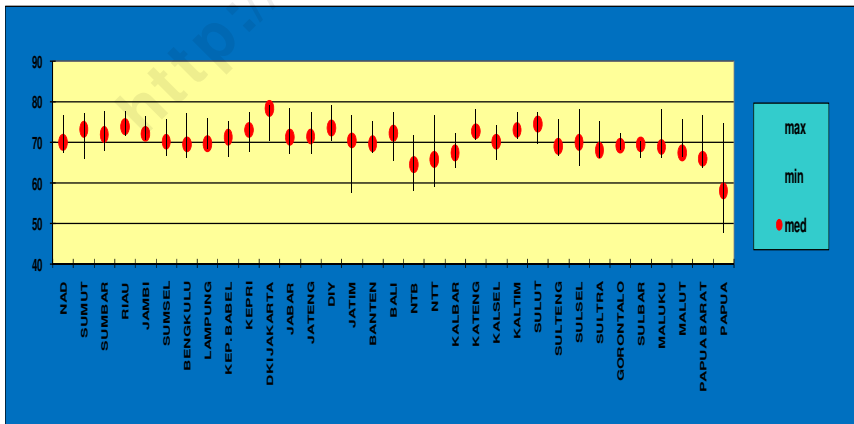
Gambar 3.2 Provinsi dengan IPM Terendah Tahun 2007-2008



Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

Dilihat dari kisaran IPM menurut provinsi seperti pada Gambar 3.3 terlihat bahwa sebaran IPM di hampir semua provinsi relatif homogen, kecuali untuk beberapa provinsi seperti Papua, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Maluku. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian IPM dalam provinsi (baca: kabupaten/kota) yang bersangkutan sebarannya sangat beragam (lihat Gambar 3.3). Sebagai ilustrasi, Provinsi Papua, kabupaten dengan IPM terendah umumnya merupakan kabupaten baru (seperti Kabupaten Nduga, Yalimo, Memberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Puncak) sedangkan kabupaten dengan IPM tinggi merupakan ibukota provinsi dan kabupaten-kabupaten besar seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Merauke, Biak Namfor, dan Yapen Waropen. Sementara itu, provinsi yang memiliki sebaran IPM relatif paling homogen dibandingkan provinsi lainnya adalah Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Jambi, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah.

Gambar 3.3 Kisaran IPM Tingkat Provinsi Tahun 2008



Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

3.4.2. Status Pembangunan Provinsi

Tabel 3.3 IPM Provinsi dan kategori IPM

No	Provinsi	IPM 2008	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	70,76	Menengah Atas
2	Sumatera Utara	73,29	Menengah Atas
3	Sumatera Barat	72,96	Menengah Atas
4	Riau	75,09	Menengah Atas
5	Kepulauan Riau	74,18	Menengah Atas
6	Jambi	71,99	Menengah Atas
7	Sumatera Selatan	72,05	Menengah Atas
8	Bangka Belitung	72,19	Menengah Atas
9	Bengkulu	72,14	Menengah Atas
10	Lampung	70,30	Menengah Atas
11	DKI Jakarta	77,03	Menengah Atas
12	Jawa Barat	71,12	Menengah Atas
13	Banten	69,70	Menengah Atas
14	Jawa Tengah	71,60	Menengah Atas
15	DI Yogyakarta	74,88	Menengah Atas
16	Jawa Timur	70,38	Menengah Atas
17	Kalimantan Barat	68,17	Menengah Atas
18	Kalimantan Tengah	73,88	Menengah Atas
19	Kalimantan Selatan	68,72	Menengah Atas
20	Kalimantan Timur	74,52	Menengah Atas
21	Sulawesi Utara	75,16	Menengah Atas
22	Gorontalo	69,29	Menengah Atas
23	Sulawesi Tengah	70,09	Menengah Atas
24	Sulawesi Selatan	70,22	Menengah Atas
25	Sulawesi Barat	68,55	Menengah Atas
26	Sulawesi Tenggara	69,00	Menengah Atas
27	Bali	70,98	Menengah Atas
28	Nusa Tenggara Barat	64,12	Menengah Bawah
29	Nusa Tenggara Timur	66,15	Menengah Atas
30	Maluku	70,38	Menengah Atas
31	Maluku Utara	68,18	Menengah Atas
32	Papua	64,00	Menengah Bawah
33	Papua Barat	67,95	Menengah Atas

Berdasarkan skala internasional, capaian IPM dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kategori tinggi ($IPM \geq 80$), kategori menengah bawah ($66 \leq IPM < 80$), kategori menengah bawah ($50 \leq IPM < 66$) dan kategori rendah ($IPM < 50$). Jika diukur menurut skala internasional, dari 33 provinsi di Indonesia, pada tahun 2008, sebanyak 31 provinsi masuk dalam kategori IPM menengah atas dan 2 provinsi lainnya masuk dalam kategori IPM menengah bawah.

Tabel 3.4 Status Pembangunan Provinsi, 2008

Status Pembangunan	Provinsi
	2008
(1)	(3)
Rendah	-
Menengah Bawah	2
Menengah Atas	31
Tinggi	-
Jumlah	33

Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

3.4.3. Capaian IPM Kabupaten/Kota

Tidak jauh berbeda dengan perkembangan IPM provinsi, IPM kabupaten/kota juga semuanya memperlihatkan suatu peningkatan selama periode 2007-2008. Dilihat dari tingkat kecepatan peningkatan IPM antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya pada umumnya berbeda, namun demikian masih ada beberapa kabupaten/kota yang memperlihatkan tingkat kecepatan sama. Beberapa kabupaten/kota mencapai peningkatan IPM cukup pesat, beberapa kabupaten/kota dengan tingkat kecepatan yang cukup lambat, serta ada pula yang tidak menunjukkan peningkatan sama sekali (*stagnan*).

Tabel 3.5 Kabupaten dan Kota dengan IPM Tertinggi dan Terendah Tahun 2008

Tahun 2008	IPM
Kabupaten dan Kota	
(3)	(4)
Kota Jakarta Selatan	79,0
Kota Yogyakarta	78,9
Kota Jakarta Timur	78,5
Kota Jakarta Barat	78,4
Kota Depok	78,4
Tahun 2008	IPM
Kabupaten dan Kota	
Lanny Jaya	48,1
Pegunungan Bintang	47,9
Mamberamo Tengah	47,9
Yalimo	47,8
Nduga	47,5

Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

Tabel 3.5 menyajikan urutan lima kabupaten/kota tertinggi dan lima terendah selama tahun 2008. Pada tabel tersebut posisi kabupaten/kota untuk lima urutan terendah umumnya disebabkan karena terbentuknya kabupaten baru. Selain itu, dapat dilihat bahwa kelima kabupaten/kota dengan IPM tertinggi semuanya berasal dari Pulau Jawa, yaitu tiga Kabupaten/kota dari Provinsi DKI Jakarta, satu kabupaten/kota berasal dari DI Yogyakarta, dan satu Kabupaten/kota dari provinsi Jawa Barat. Sedangkan kelima kabupaten/kota dengan IPM terendah semuanya berasal dari provinsi Papua. Hal ini menunjukkan bahwa provinsi yang berada di ujung timur Indonesia ini (Papua) masih tertinggal jauh dari provinsi lainnya, sementara pergerakan perkembangan pembangunannya juga sangat lambat.

Tabel 3.6 Sepuluh Kabupaten dan Kota yang Menghasilkan Reduksi *Shortfall* Terbesar Tahun 2007-2008

Kabupaten dan Kota	Provinsi	IPM	Reduksi <i>Shortfall</i> 2007-2008
(1)	(2)	(3)	(4)
Pidie Jaya	NAD	71,23	4,22
Kota Sorong	Papua Barat	76,52	3,83
Teluk Wondama	Papua Barat	64,79	3,79
Majene	Sulawesi Barat	70,28	3,75
Jayawijaya	Papua	54,72	3,74
Kota Yogyakarta	DIY	78,95	3,68
Gorontalo	Gorontalo	68,94	3,65
Bulongan	Kalimantan Timur	74,30	3,61
Manokwari	Papua Barat	65,46	3,58
Jayapura	Papua	71,02	3,49

Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

Selanjutnya, Tabel 3.6 menyajikan kabupaten/kota yang mencatat kemajuan pesat selama tahun 2007-2008. Pada umumnya, kabupaten/kota yang mengalami kemajuan pesat adalah kabupaten/kota yang memiliki angka IPM relatif rendah. Terdapat 10 Kabupaten/kota yang tersebar di beberapa provinsi yang mencatat kemajuan cukup pesat. Kemajuan pesat ini terbagi ke dalam dua golongan, yakni kategori kemajuan rentang 4, dan rentang 3. Kabupaten Pidie Jaya di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mencatat kemajuan yang tercepat dan menjadi satu-satunya kabupaten dengan kategori rentang 4, sedangkan sembilan kabupaten/kota lainnya masuk dalam kategori rentang 3.

3.4.4. Status Pembangunan Kabupaten/Kota

Pembangunan manusia di semua kabupaten dan kota di Indonesia mengalami kemajuan. Namun demikian, kemajuan pembangunan manusia antar kabupaten/kota, satu dengan kabupaten/kota lainnya sangat bervariasi. Kemajuan ini sangat

tergantung dari komitmen penyelenggara pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang berdampak pada peningkatan kualitas hidup.

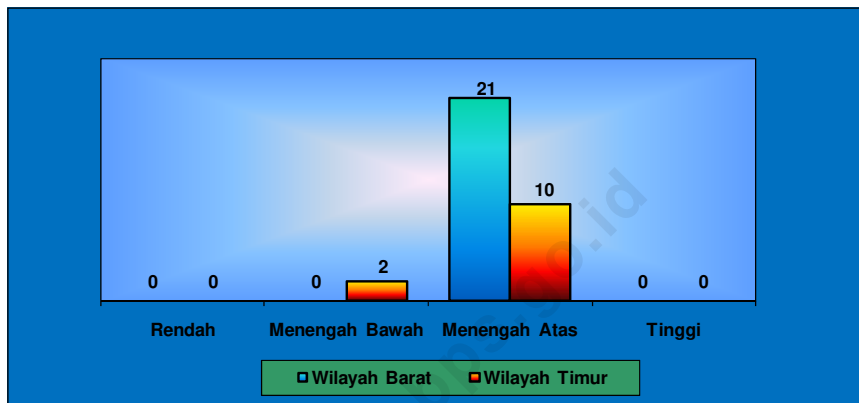
Berdasarkan skala internasional dari 483 kabupaten/kota tidak satupun kabupaten/kota tergolong IPM tinggi. Meskipun demikian, IPM yang telah dicapai oleh sekitar 89,23 persen atau 431 kabupaten/kota di Indonesia sudah tergolong ke dalam menengah atas. Kemudian, 42 kabupaten/kota atau sekitar 8,69 persennya tergolong ke dalam kelompok IPM menengah bawah dan selebihnya 10 kabupaten/kota atau setara 2,07 persen masih tergolong ke dalam kelompok IPM rendah. Kabupaten yang tergolong IPM rendah adalah Nduga, Yalimo, Memberamo Tengah, Pegunungan Bintang dan Lanni Jaya, yang kesemuanya dari provinsi Papua.

3.4.5. Disparitas Pembangunan Manusia

Variasi pencapaian pembangunan manusia antar provinsi memberikan gambaran adanya ketidakmerataan perkembangan di berbagai sektor pembangunan. Ketidakmerataan ini dapat dilihat dengan menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi. Beberapa indikator sosial dan ekonomi yang terangkum dalam IPM merupakan salah satu ukuran pencapaian pembangunan.

Gambar 3.4 memperlihatkan pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi. Pencapaian pembangunan manusia di tingkat provinsi telah 93,94 persen mencapai kategori IPM menengah atas (66 – 80). Pada Gambar 3.4 terlihat kesenjangan pencapaian pembangunan manusia di provinsi wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia. Gambar tersebut menunjukkan sebanyak 21 provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan 10 provinsi di Wilayah Indonesia Timur tergolong pada kategori IPM menengah atas, sedangkan 2 provinsi di Wilayah Indonesia Timur lainnya masih berada pada kategori IPM menengah bawah (50-66), yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua.

Gambar 3.4 Kesenjangan Status Pembangunan Provinsi di Wilayah Indonesia Barat dan Wilayah Indonesia Timur dalam IPM, 2008



Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

Catatan:

Wilayah Barat meliputi : Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan.

Wilayah Timur meliputi : Pulau Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

Sebenarnya, pembangunan manusia di wilayah bagian timur telah menunjukkan suatu peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian, peningkatan pembangunan manusia di wilayah bagian timur masih relatif lambat dibandingkan pembangunan di wilayah bagian barat. Untuk itu, diperlukan komitmen pemerintah daerah di wilayah Indonesia timur dalam meningkatkan kapasitas dasar penduduk untuk mempercepat peningkatan IPM dalam mengejar ketertinggalannya dengan wilayah Indonesia barat. Dengan demikian, kesenjangan antara wilayah Indonesia barat dengan wilayah Indoensia timur dapat dikurangi.

Tabel 3.7 Perbedaan Kemajuan Pembangunan Manusia antara Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Timur, Tahun 2008

Wilayah Barat	IPM	Wilayah Timur	IPM
(1)	(2)	(3)	(4)
Tertinggi		Tertinggi	
Kota Jakarta Selatan	79,0	Kota Makasar	77,9
Kota Yogyakarta	78,9	Kota Ambon	77,9
Kota Jakarta Timur	78,5	Manado	77,3
Kota Jakarta Barat	78,4	Kota Pare Pare	77,0
Kota Depok	78,4	Kota Kupang	76,6
Terendah		Terendah	
Pamekasan	63,1	Lanny Jaya	48,1
Situbondo	63,1	Pegunungan Bintang	47,9
Probolinggo	61,4	Mamberamo Tengah	47,9
Bondowoso	61,3	Yalimo	47,8
Sampang	57,7	Nduga	47,5

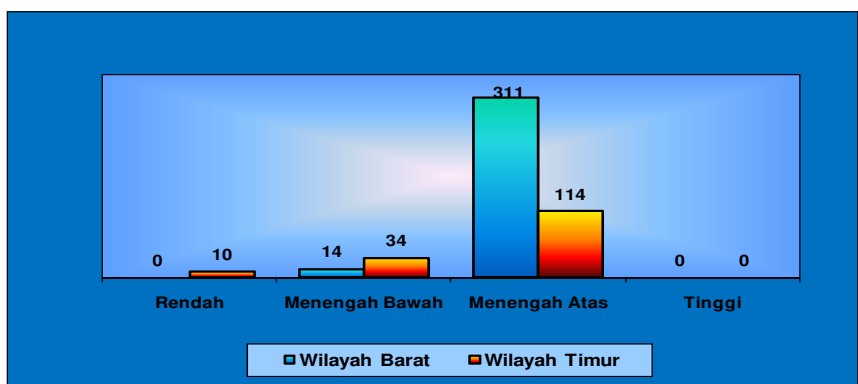
Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

Disparitas pencapaian IPM di kabupaten/kota di wilayah bagian barat dan kabupaten dan kota di wilayah bagian timur masih relatif besar. Hal ini memberikan gambaran bahwa pembangunan manusia di tingkat kabupaten dan kota di wilayah barat dan wilayah timur masih timpang. Di tingkat kabupaten/kota, pencapaian IPM tertinggi adalah Jakarta Selatan, yaitu sebesar 79,00. Sedangkan pencapaian IPM terendah adalah Kabupaten Nduga di provinsi Papua sebesar 47,45, sehingga disparitas pembangunan manusia antara Kota Jakarta Selatan (wilayah Barat) dan Kabupaten Nduga (Wilayah Timur) sekitar 31,55 poin. Meski demikian, jika dibandingkan dengan disparitas pencapaian IPM tahun 2007 masih ada peningkatan walaupun relatif rendah. Artinya disparitas IPM tahun 2008 berkembang ke arah kesetaraan antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Hal ini juga dapat diartikan bahwa ketimpangan pembangunan sudah semakin mengecil.

Menarik untuk dicermati perbedaan urutan IPM tertinggi dan terendah di masing-masing wilayah, baik di wilayah bagian barat maupun di wilayah bagian timur. Pencapaian IPM tertinggi maupun terendah di wilayah bagian barat didominasi oleh kabupaten dan kota di provinsi Jawa. Jakarta Selatan menempati urutan tertinggi dengan IPM sebesar 79,00, kemudian urutan berikutnya berturut-turut adalah Yogyakarta (78,95), Jakarta Timur (78,54), Jakarta Barat (78,37), dan Depok (78,36). Sedangkan Kabupaten/kota dengan IPM terendah seluruhnya berada di provinsi Jawa Timur, terutama yang termasuk wilayah tapal kuda; yaitu Pamekasan (63,13), Situbondo (63,06), Probolinggo (61,44), Bondowoso (61,26), dan Sampang (57,66). Rendahnya IPM khususnya di wilayah tapal kuda terkait dengan budaya masyarakat setempat.

Urutan IPM tertinggi di wilayah bagian timur Indonesia adalah berturut-turut sebagai berikut: Kota Makasar (77,9), kota Ambon (77,9), Manado (77,3), Kota Pare Pare (77), dan Kota Kupang (76,6). Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian timur lima kabupaten/kota dengan urutan IPM terendah semuanya terdapat di provinsi Papua (Tabel 3.7).

Gambar 3.5 Status Pembangunan Manusia antara Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dan Timur, 2006



Sumber: Diolah khusus dari tabel ringkasan

Ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota juga dapat dilihat dari status pembangunannya. Gambar 3.5 menyajikan status pembangunan manusia kabupaten/kota menurut wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur pada tahun 2008. Dari gambar tersebut masih terlihat adanya ketimpangan pembangunan manusia antar kabupaten/kota di wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur. Pembangunan manusia di kabupaten/kota di wilayah bagian barat terlihat relatif lebih maju dibanding wilayah bagian timur. Di wilayah Indonesia bagian barat, ada 311 kabupaten/kota yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM menengah atas ($66 \leq \text{IPM} < 80$) sedangkan di wilayah Indonesia timur hanya terdapat 144 kabupaten/kota. Pada kategori IPM menengah bawah, di wilayah Indonesia bagian barat masih ada 14 kabupaten/kota, sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur sebanyak 34 kabupaten/kota. Selain itu, ternyata masih terdapat 10 kabupaten di wilayah Indonesia bagian timur yang memiliki status pembangunan dengan kategori IPM rendah.



IV

Indeks Kemahalan Konstruksi



4.1. Pendahuluan

4.1.1. Konsep dan Definisi

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan persatuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah kita kenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.

Sejak Tahun 2005, IKK disajikan dengan memperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar (Februari 2004, harga yang digunakan dalam penghitungan IKK 2004).

4.1.2. Tujuan

Tujuan utama penghitungan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) tahun 2009 adalah menyediakan data dasar dalam rangka kebijakan dana perimbangan 2010 dan utamanya digunakan sebagai salah satu variabel kebutuhan fiskal dalam penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pengalokasian tahun 2010.

4.1.3. Ruang Lingkup dan Sumber Data

IKK tahun 2009 dihitung dalam dua versi, yaitu IKK 451 Kabupaten/Kota dengan cakupan kabupaten/kota yang sama dengan tahun 2008 dan IKK 477 Kabupaten/Kota yang mencakup 26 kabupaten/kota pemekaran dan dihitung IKK-nya pada tahun 2009. Adapun untuk IKK Provinsi dihitung di 33 provinsi berdasarkan harga di 477 kabupaten/kota tersebut.

Data dasar yang digunakan dalam melakukan penghitungan IKK adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Untuk penghitungan IKK provinsi, menggunakan data harga rata-rata seluruh kabupaten/kota dimasing-masing provinsi. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang natural/hasil galian, barang-barang hasil industri pengolahan, dan jasa sewa alat berat.

Selain data harga, data lain yang digunakan dalam penghitungan IKK adalah Diagram Timbang (DT) yang terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan (3 kelompok bangunan) dan DT umum masing-masing kabupaten/kota.

4.1.4. Kegiatan Pengumpulan Data

Pengumpulan data harga dilakukan secara bulanan menggunakan daftar HPB-K2 di 105 kabupaten/kota. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 60 jenis barang yang mencakup sekitar 145 kualitas barang. Untuk keperluan penghitungan IKK 2009, selain survei HPB-K2, dilakukan pula survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi yang menjadi paket komoditas IKK.

Pengumpulan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi dan sewa alat berat tersebut diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan Konstruksi. Kegiatan studi ini dilakukan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota terpilih yang menyebar di 10 (sepuluh) provinsi yang dilaksanakan pada bulan April 2003 dan

April 2004. Kabupaten/kota-kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan letak dan kondisi geografis serta struktur tanah yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan, selain data hasil studi, ditunjang pula dengan data Tabel Input-Output dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum. Data diagram timbang kelompok jenis bangunan ini, dari tahun ke tahun selalu di up-date berdasarkan perkembangan data penunjang.

Dengan asumsi bahwa penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, maka diagram timbang kelompok jenis bangunan yang digunakan pun sama untuk seluruh kabupaten/kota.

Data lain yang dikumpulkan adalah perkiraan persentase pengeluaran kegiatan pembangunan fisik gedung/konstruksi masing-masing kelompok jenis bangunan terhadap total nilai pengeluaran kegiatan pembangunan tersebut. Data ini diperoleh dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.2. Metodologi

IKK dihitung menurut kelompok jenis bangunan yang mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Seperti halnya IKK 2008, penghitungan IKK 2009 juga menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Jalan, jembatan, dan pelabuhan; dan
- c. Bangunan lainnya.

Pada tahun 2004 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100, sedangkan pada tahun 2005 angka IKK rata-rata nasional disesuaikan menjadi 125,10. Kenaikan sebesar 25,10

persen ini berdasarkan perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan Mei 2005. Kemudian untuk tahun 2009 angka IKK rata-rata nasional adalah 231,60 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari bulan Februari 2004 ke bulan April 2009.

4.2.1. Paket Komoditas

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2009 terdiri dari 17 jenis barang dan 4 sewa alat berat, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, sewa alat berat *excavator*, *bulldozer*, *three wheel roller* (mesin gilas), dan *dump truck*.

Jenis barang dan sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam membuat masing-masing kelompok jenis bangunan serta harga barang-barang tersebut *comparable* atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

4.2.2. Diagram Timbang (DT) atau Bobot

DT atau bobot terdiri dari DT kelompok jenis bangunan dan DT umum. DT kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi kabupaten/kota yang disusun berdasarkan besarnya volume masing-masing jenis bahan bangunan untuk membangun satu unit bangunan persatuan ukuran luas.

Sementara itu DT umum digunakan untuk menghitung IKK umum, disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota dan dirinci menurut 3 (tiga) kelompok jenis bangunan/konstruksi.

4.2.3. Formula Penghitungan

- a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (TKK_{kab})_j

$$(TKK_{kab})_j = \sum_{i=1}^{21} P_i \cdot Q_{ij}$$

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j = kelompok jenis bangunan (j=1,2,3)

P_i = harga jenis barang/bahan bangunan i

Q_{ij} = kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan ke-j

- b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata Nasional (TKK_{nj})

$$TKK_{nj} = \frac{\sum_{k=1}^{477} (TKK_{kab})_j}{477}$$

k = kabupaten/kota (1, 2, ..., 477)

- c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKK_{kab})_j

$$(IKK_{kab})_j = \frac{(TKK_{kab})_j}{TKK_{nj}} \times 100$$

- d. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKK_{umum})_k

$$(IKK_{umum})_k = \sum_{j=1}^3 (IKK_{kab})_j \cdot Q'_j \times I$$

Q'_j = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

I = suatu konstanta yang menggambarkan perkembangan harga barang-barang yang digunakan di sektor konstruksi

di Indonesia (IHPB sektor konstruksi) Februari 2004 – April 2009 yaitu sebesar 2,3160.

4.3. Ulasan Ringkas

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) merupakan indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. IKK merupakan indeks spasial yang dihitung dengan memperhatikan rata-rata harga jenis barang secara nasional (IKK rata-rata nasional=100), sehingga angka IKK bisa diatas 100 (diatas rata-rata nasional) maupun dibawah 100 (dibawah rata-rata nasional).

Data dasar penghitungan IKK adalah harga bahan bangunan/konstruksi dan sewa alat berat yang diperoleh dari survei HPB-K2 yang dilakukan secara bulanan di beberapa kabupaten/kota. Harga tersebut meliputi harga 145 kualitas barang yang berasal dari 60 jenis barang sedangkan harga sewa 4 macam alat berat. Selanjutnya dari barang tersebut dipilih komoditas yang mempunyai nilai atau andil yang cukup besar dalam membuat masing-masing kelompok jenis bangunan/konstruksi. Kemudian dilakukan Survei Khusus Paket Komoditas IKK untuk mendapatkan harga barang-barang dari berbagai kualitas untuk dapat menentukan kualitas terpilih yaitu kualitas yang pada umumnya mempunyai keterbandingan antar kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Kualitas yang terpilih pada penghitungan IKK periode berjalan tidak harus selalu sama dengan tahun sebelumnya. Untuk klarifikasi data, dilakukan Survei Identifikasi Kualitas Barang dan kegiatan rekonsiliasi data seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sejak Tahun 2005, IKK disajikan dengan memperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar (Februari 2004, harga yang digunakan dalam penghitungan IKK 2004), yaitu mengalikan nilai IKK standar (IKK nasional = 100) dengan inflator. Angka yang digunakan sebagai inflator IKK tersebut adalah perkembangan IHPB konstruksi *point to point* periode Februari 2004 sampai dengan survei serentak khusus paket komoditas IKK

dilaksanakan. Dengan adanya inflator tersebut, rata-rata nasional tidak lagi 100 melainkan disesuaikan dengan perkembangan IHPB konstruksi tersebut.

IKK versi 451 Kabupaten/Kota

IKK tahun 2009 dihitung dalam dua versi, yaitu IKK 451 Kabupaten/Kota dengan cakupan Kabupaten/Kota yang sama dengan tahun 2008 dan IKK 477 Kabupaten/Kota.

IKK versi 451 kabupaten/kota dihitung dengan maksud membandingkan perubahan IKK untuk kabupaten/kota yang sama dengan tahun lalu.

IKK versi 477 Kabupaten/Kota

IKK versi 477 kabupaten/kota dihitung sama seperti IKK versi 451 kabupaten/kota, hanya saja IKK versi ini mencakup 26 kabupaten/kota pemekaran yang baru dihitung IKK nya pada tahun 2009. Kabupaten/kota pemekaran tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

IKK Provinsi

IKK provinsi dibangun dari IKK versi 477 kabupaten/kota, yaitu dengan mencari rata-rata harga jenis barang seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut kemudian dibandingkan dengan rata-rata harga secara nasional.

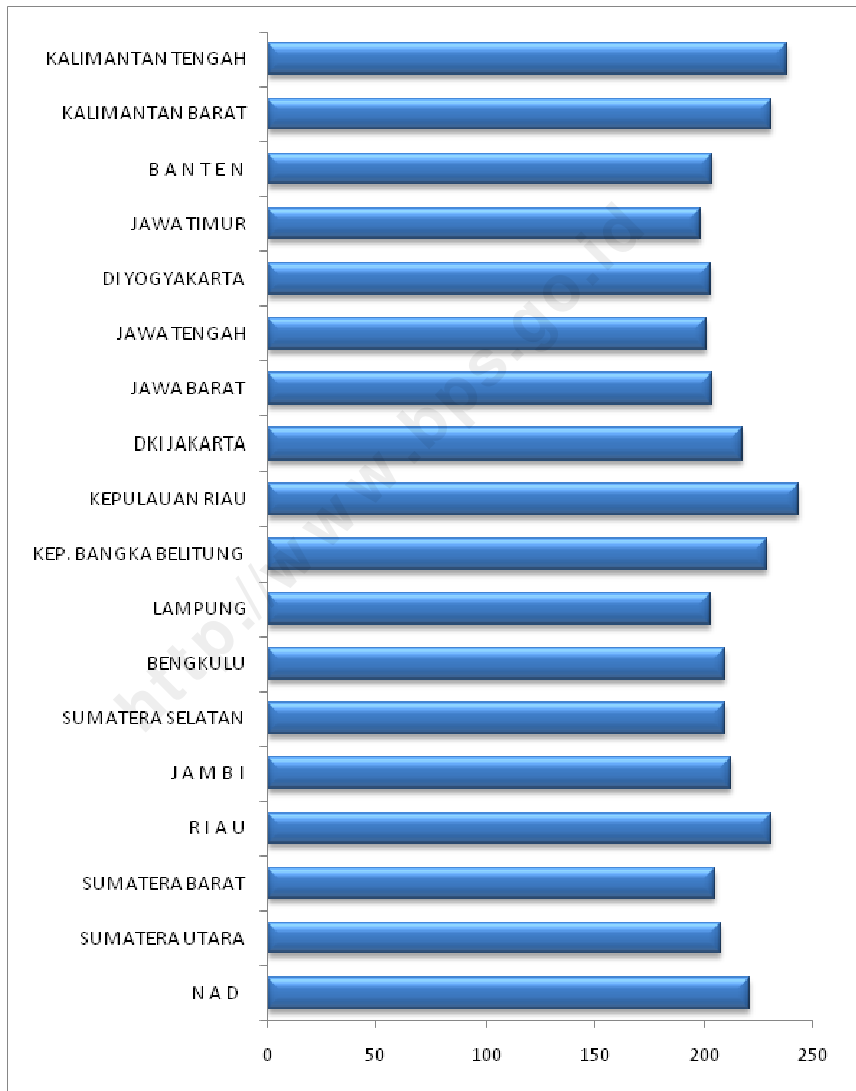
IKK Provinsi dan IKK Ibukota Provinsi disajikan dalam 8 gambar.

Tabel 4.1 Kabupaten/Kota Pemekaran

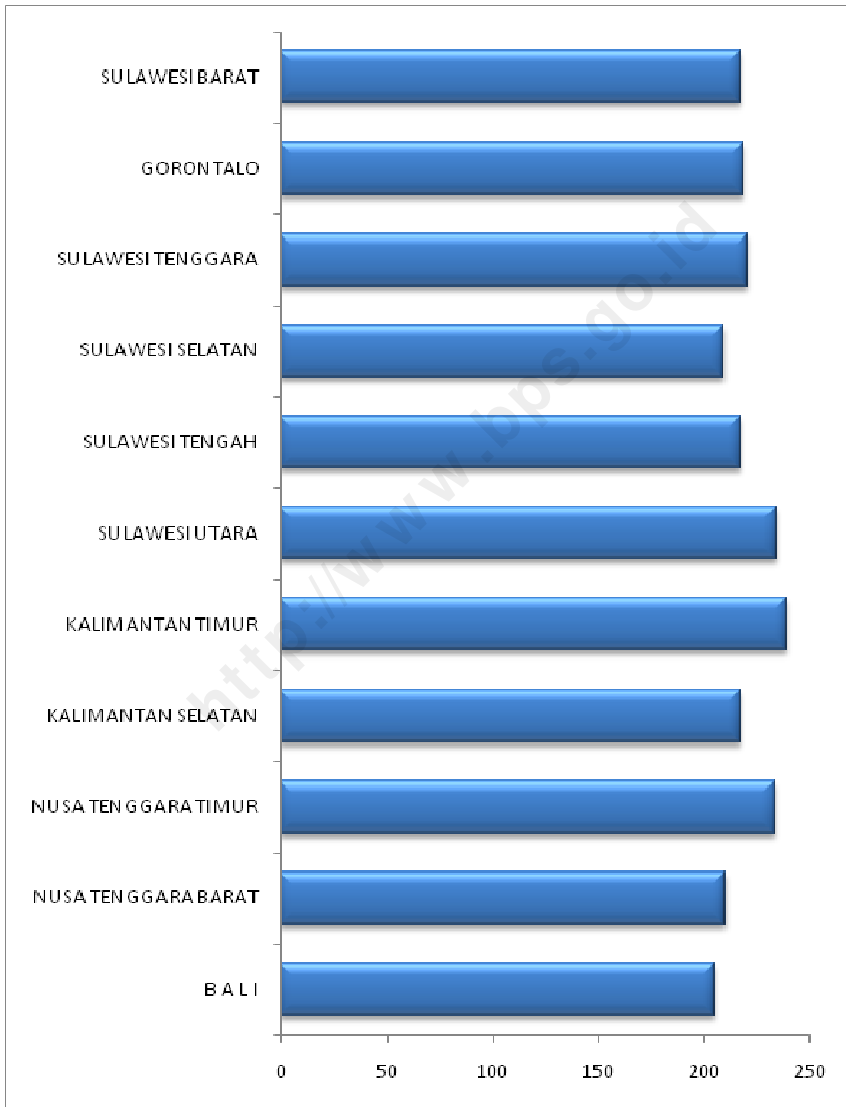
No	Propinsi	Kabupaten/Kota
1	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS UTARA
2	SUMATERA UTARA	PADANG LAWAS
3	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU UTARA
4	SUMATERA UTARA	LABUHAN BATU SELATAN
5	J A M B I	SUNGAI PENUH
6	BENKULU	BENKULU TENGAH
7	LAMPUNG	PESAWARAN
8	KEPULAUAN RIAU	KEP. ANAMBAS
9	B A N T E N	KOTA SERANG
10	NUSA TENGGARA BARAT	LOMBOK UTARA
11	NUSA TENGGARA TIMUR	MANGGARAI TIMUR
12	KALIMANTAN BARAT	KUBU RAYA
13	KALIMANTAN TIMUR	TANA TIDUNG
14	SULAWESI UTARA	BOLMONG SELATAN
15	SULAWESI UTARA	BOLMOMG TIMUR
16	SULAWESI TENGAH	SIGI
17	SULAWESI SELATAN	TORAJA UTARA
18	M A L U K U	BURU SELATAN
19	M A L U K U	MALUKU BARAT DAYA
20	M A L U K U	KOTA TUAL
21	PAPUA	NDUGA
22	PAPUA	LANNY JAYA
23	PAPUA	MEMBERAMO TENGAH
24	PAPUA	YALIMO
25	PAPUA	PUNCAK
26	PAPUA	DOGIYAI

Sumber: Departemen Keuangan

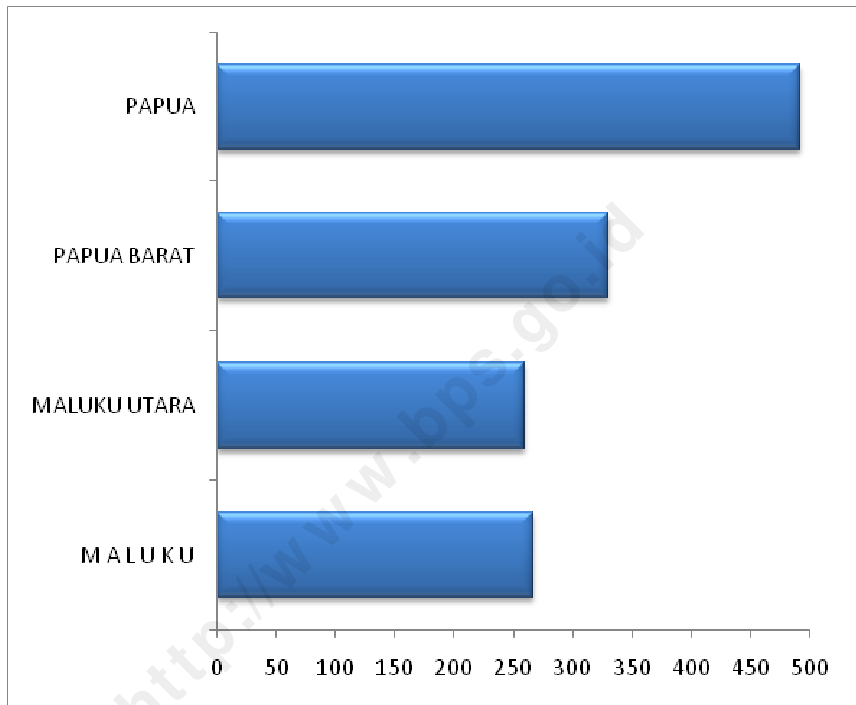
Gambar 4.1 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Barat



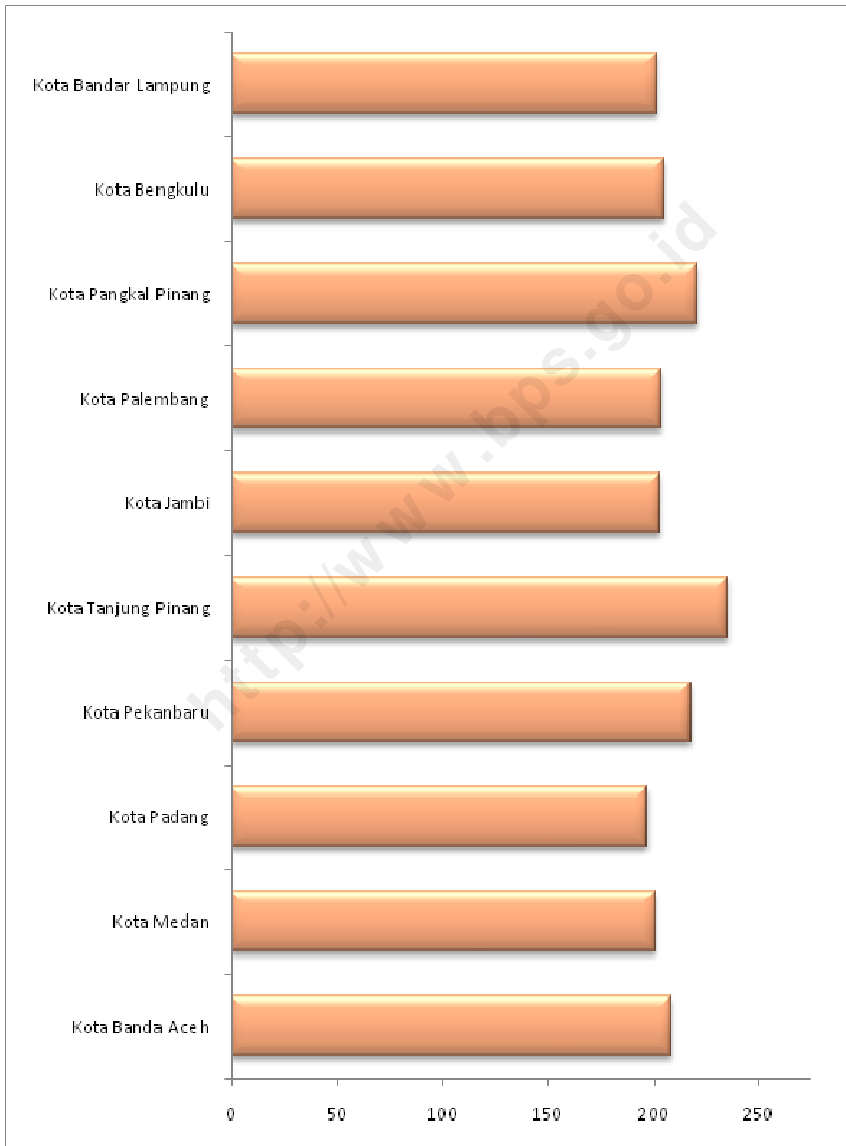
Gambar 4.2 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Tengah



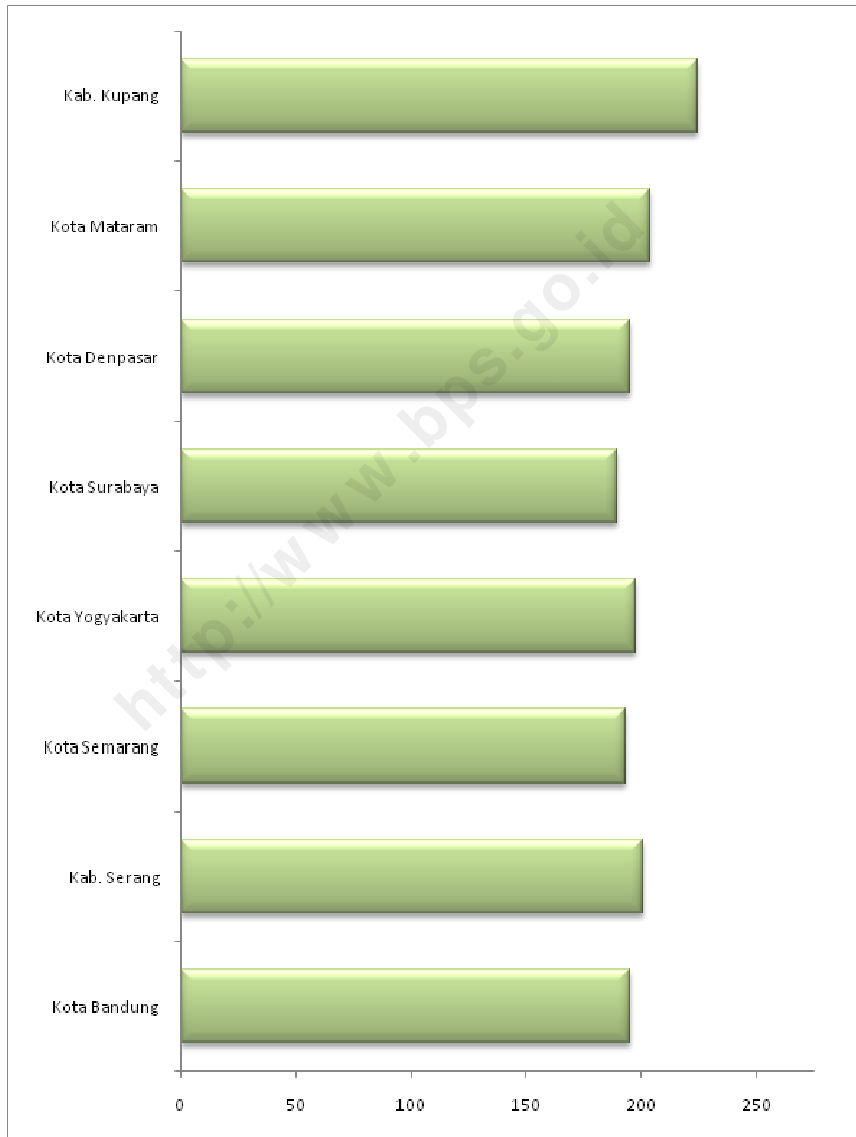
Gambar 4.3 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Provinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur



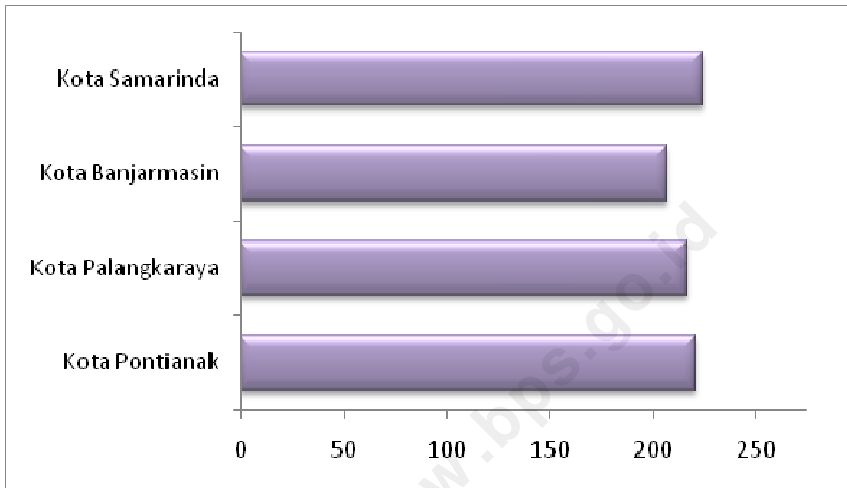
Gambar 4.4 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera



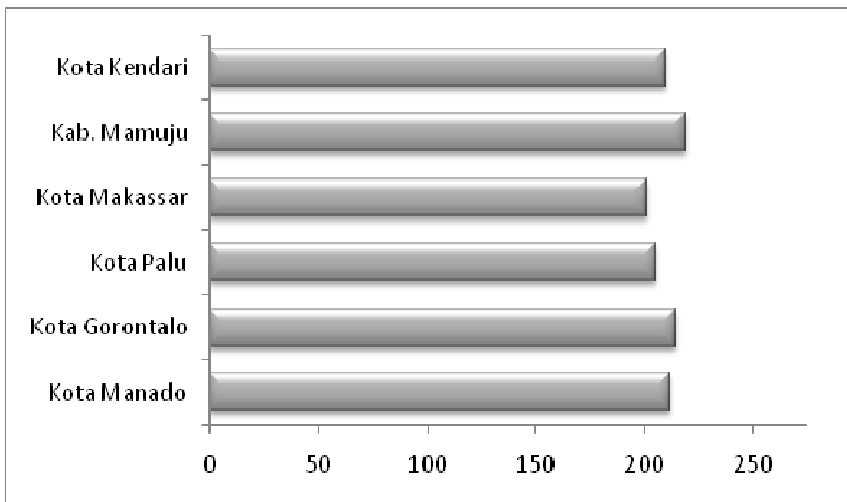
Gambar 4.5 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara



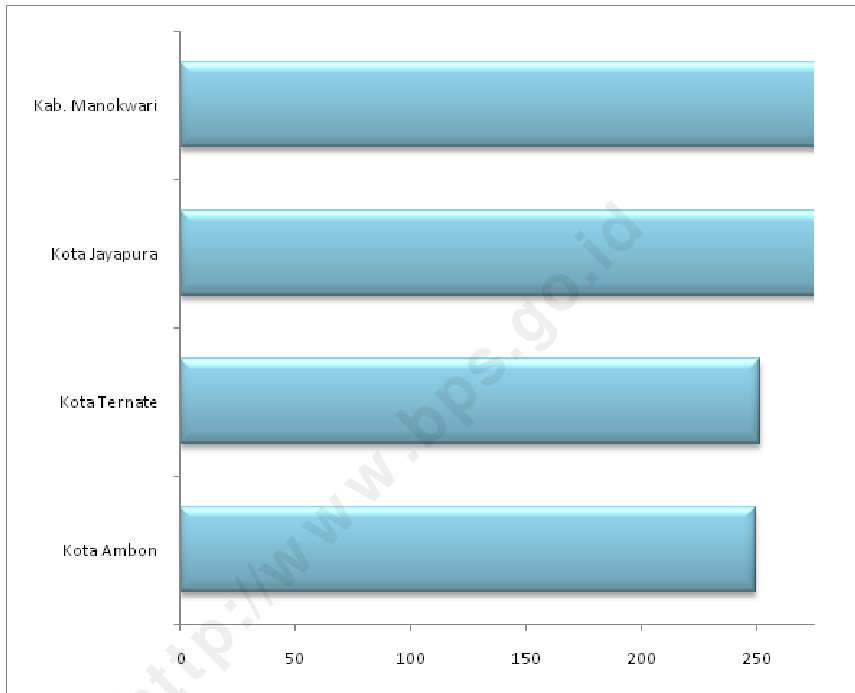
Gambar 4.6 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Kalimantan



Gambar 4.7 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Pulau Sulawesi



Gambar 4.8 Indeks Kemahalan Konstruksi 2009 Ibukota Provinsi di Kepulauan Maluku dan Papua





Produk Domestik Regional Bruto



5.1. Pengertian dan Definisi

Definisi yang dikemukakan dalam bab ini terdiri dari: PDRB, output, input antara dan nilai tambah (*value added*). PDRB disajikan dalam harga berlaku dan harga konstan, diharapkan makna penyajian dalam dua konsep harga tersebut dapat menggambarkan arti angka PDRB yang konsisten dengan penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).

5.1.1. PDRB

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa.

Dalam penghitungannya, untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga, harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor perdagangan dan sebagian subsektor pengangkutan.

5.1.2. Output

Dalam suatu proses produksi selama satu tahun, seluruh nilai harga produsen barang/jasa yang diproduksi dinamakan output. Secara teknis penghitungan, output ini adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga atau tarif jual dari produsen barang atau jasa tersebut.

5.1.3. Input Antara

Input antara merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Input antara juga diartikan sebagai biaya antara atau biaya produksi.

5.1.4. Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan dalam proses produksi, dan besarnya sama dengan selisih dari output dengan input antara. Sebagai contoh seorang tukang mebel selama ia membuat satu set mebel, orang tersebut memerlukan bahan-bahan yang terdiri dari papan, paku, cat, busa dan lain-lain. Perubahan semua nilai bahan diatas menjadi nilai mebel adalah suatu pertambahan nilai.

5.1.5. Harga Berlaku

Makna harga berlaku (*current prices*) adalah harga yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Karena pada dasarnya output atau nilai tambah merupakan perkalian $p \cdot q$ (p = harga; dan q = kuantitas), maka yang dimaksud dengan harga berlaku adalah kuantitas tahun tertentu dikalikan dengan harga tahun saat barang atau jasa itu diproduksi.

5.1.6. Harga Konstan

Kelemahan penyajian dalam harga berlaku adalah masih mengandung perubahan harga barang/jasa antar waktu, oleh karena itu untuk mengetahui pertumbuhan (perubahan) kegiatan ekonomi secara riil, diperlukan nilai yang sudah terbebas dari perubahan harga. Nilai PDRB demikian disebut PDRB atas dasar harga konstan (*constant prices*).

Penilaian harga dalam penghitungan DAU adalah harga berlaku. Karena variabel PDRB yang diperlukan hanya tahun tertentu, maka pemakaian harga berlaku menjadi relevan. Disamping itu harga berlaku mencerminkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada saat produk tersebut dihasilkan.

5.2. Ruang Lingkup dan Sumber Data

Ruang lingkup meliputi PDRB yang disajikan di 477 kabupaten/kota dan 33 provinsi sesuai kondisi terakhir. Namun, perlu diingat bahwa PDRB provinsi bukanlah penjumlahan PDRB dari kabupaten/kota di dalamnya, karena antara penjumlahan individu kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan PDRB provinsinya selalu ada diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*). Perbedaan tersebut pasti terjadi tetapi dapat dijelaskan secara teoritis. Namun demikian, sesuatu yang perlu dijaga adalah diskrepansi tersebut harus masih dalam rentang toleransi.

Satu hal yang perlu disepakati adalah bahwa untuk menghitung DAU kabupaten/kota digunakan PDRB kabupaten/kota, sedangkan untuk DAU provinsi digunakan PDRB provinsi (bukan penjumlahan PDRB kabupaten/kota di dalam provinsi bersangkutan). PDRB provinsi dihitung secara independen oleh BPS provinsi dengan menggunakan informasi dasar pada masing-masing provinsi.

Untuk menyusun PDRB diperlukan seluruh data kegiatan ekonomi, sedangkan belum seluruh sektor ekonomi mempunyai kelengkapan data seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk menjaring kekurangan data tersebut perlu dilakukan survei.

5.3. Kegiatan Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dijaring melalui beberapa cara, yaitu melalui: sensus, survei, dan dari produk administratif instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga lainnya. Karena ragam data yang dibutuhkan sangat banyak, maka kegiatan pengumpulan data merupakan tahapan kerja yang paling membutuhkan perhatian. Kegiatan pengumpulan data ini meliputi seluruh data ekonomi, mulai dari sektor pertanian sampai pada sektor jasa-jasa.

5.4. Metode Penghitungan

Sesuai dengan sistem neraca nasional yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat tiga pendekatan untuk menyusun PDRB, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan metode-metode ini disesuaikan dengan data dasar yang tersedia di masing-masing daerah.

5.4.1. Pendekatan Produksi

PDRB yang dihitung menurut pendekatan produksi merupakan penjumlahan nilai tambah dari seluruh proses produksi pada tahun tertentu.

5.4.2. Pendekatan Pengeluaran

PDRB yang disusun melalui pendekatan ini diperoleh melalui penjumlahan pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, investasi, dan ekspor netto.

5.4.3. Pendekatan Pendapatan

PDRB yang diperoleh dari pendekatan ini merupakan penjumlahan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, dan dikelompokkan ke dalam upah/gaji, surplus usaha, penyusutan, dan pajak tak langsung netto (pajak dikurangi subsidi).

5.5. PDRB Kabupaten/Kota

Pada tahun 2009, jumlah kabupaten/kota sudah mencapai 483 dan seluruhnya sudah melakukan penghitungan PDRB. Namun alokasi DAU hanya memberikan kepada 477 kabupaten/kota tanpa DKI. Jumlah PDRB dari 477 kabupaten/kota ini bila dibandingkan dengan jumlah PDRB provinsi dan nasional mempunyai perbedaan statistik dibawah 5 persen sehingga secara statistik masih di dalam batas toleransi yang wajar. Perbedaan ini bersumber karena pendekatan yang digunakan, dan sumber data yang berbeda, dan penghitungan PDRB kabupaten/kota dan provinsi adalah independen.

5.6. PDRB untuk Penghitungan DAU

Dalam penghitungan DAU tahun ini menggunakan PDRB per kapita yang diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB per kapita merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah ditinjau dari jumlah penduduk.

5.7. Ulasan Ringkas

5.7.1. Peranan PDRB Provinsi Seluruh Indonesia

Peranan atau kontribusi sektor ekonomi menunjukkan struktur perekonomian yang terbentuk di suatu daerah. Struktur ekonomi yang dinyatakan dalam persentase pada ulasan ini, menunjukkan besarnya peran masing-masing provinsi dalam kemampuan menciptakan nilai tambah. Apabila struktur ekonomi ini disajikan dari waktu ke waktu maka dapat dilihat perubahan struktur perekonomian yang terjadi. Pergeseran struktur ekonomi ini sering dipakai sebagai indikator untuk menunjukkan adanya suatu proses pembangunan.

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Oleh karena itu, dengan mencermati struktur ekonomi suatu wilayah diharapkan dapat diketahui potensi ekonomi yang menjadi karakteristik wilayah tersebut. Adanya perbedaan dalam sumber daya alam dan kemampuan memproduksi dari masing-masing sektor pada suatu wilayah menyebabkan struktur ekonomi antar wilayah bervariasi. Data struktur ekonomi, biasanya diturunkan dari harga berlaku.

Tabel 5.1 PDRB dan Peranan PDRB Provinsi Terhadap Jumlah 33 Provinsi Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Dengan dan Tanpa Migas, 2008

No.	Provinsi	PDRB ADHB (Triliun Rp.)		Peranan PDRB (Persen)	
		Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	73,53	54,19	1,75	1,46
2	Sumatera Utara	213,93	212,15	5,08	5,70
3	Sumatera Barat	71,23	71,23	1,69	1,92
4	Riau	276,40	149,13	6,57	4,01
5	Kepulauan Riau	59,21	54,44	1,41	1,46
6	Jambi	39,67	30,68	0,94	0,82
7	Sumatera Selatan	133,36	88,79	3,17	2,39
8	Kepulauan Bangka Belitung	21,72	21,22	0,52	0,57
9	Bengkulu	14,45	14,45	0,34	0,39
10	Lampung	74,49	73,03	1,77	1,96
11	DKI Jakarta	677,41	674,19	16,10	18,13
12	Jawa Barat	602,42	572,28	14,32	15,39
13	Banten	122,50	122,50	2,91	3,29
14	Jawa Tengah	364,90	313,31	8,67	8,42
15	DI Yogyakarta	38,10	38,10	0,91	1,02
16	Jawa Timur	621,58	619,67	14,77	16,66
17	Kalimantan Barat	48,42	48,42	1,15	1,30
18	Kalimantan Tengah	32,35	32,35	0,77	0,87
19	Kalimantan Selatan	45,52	44,89	1,08	1,21
20	Kalimantan Timur	315,22	128,10	7,49	3,44
21	Sulawesi Utara	27,84	27,81	0,66	0,75
22	Gorontalo	5,90	5,90	0,14	0,16
23	Sulawesi Tengah	28,15	27,49	0,67	0,74
24	Sulawesi Selatan	85,14	84,97	2,02	2,28
25	Sulawesi Barat	7,78	7,78	0,18	0,21
26	Sulawesi Tenggara	22,17	22,17	0,53	0,60
27	Bali	49,92	49,92	1,19	1,34
28	Nusa Tenggara Barat	35,26	35,26	0,84	0,95
29	Nusa Tenggara Timur	21,62	21,62	0,51	0,58
30	Maluku	6,27	6,25	0,15	0,17
31	Maluku Utara	3,86	3,86	0,09	0,10
32	Papua	54,73	54,73	1,30	1,47
33	Papua Barat	12,47	8,74	0,30	0,23
Total PDRB		4.207,52	3.179,61	100,00	100,00

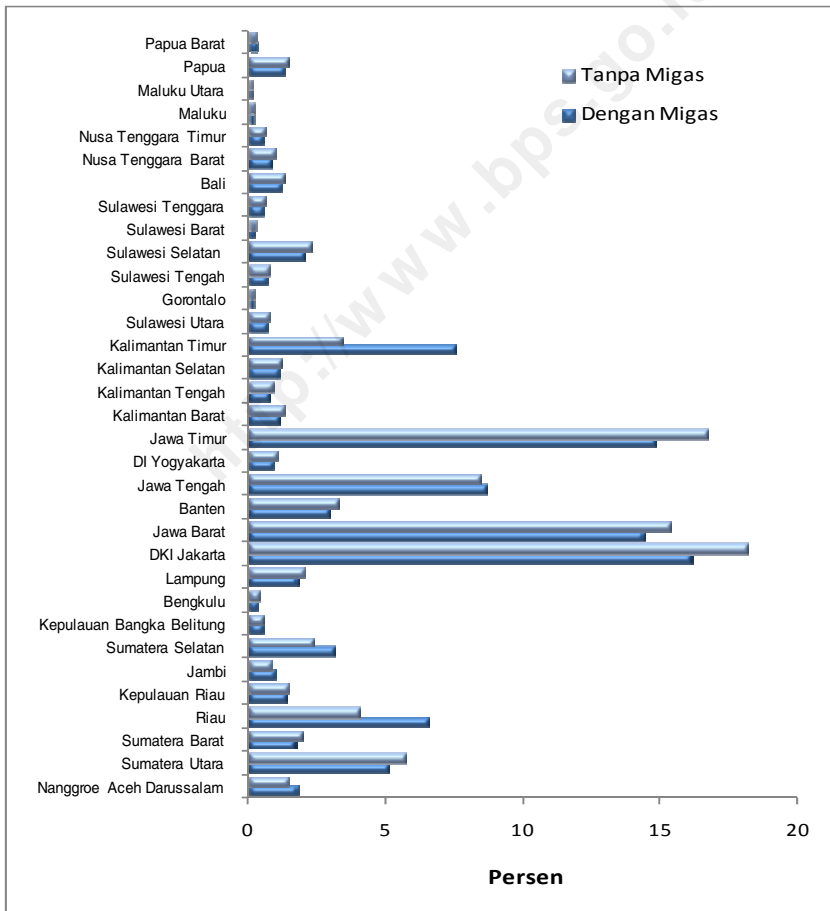
Dari Tabel 5.1, terlihat bahwa di tahun 2008 perekonomian di Indonesia di dominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Terdapat 4 (empat) provinsi di Pulau Jawa yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan ekonomi nasional yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sebanyak 4.207,52 triliun rupiah total PDRB dengan migas yang terbentuk di tahun 2008, sebesar 45,19 persen merupakan peranan keempat provinsi tersebut diatas. Apabila Pertambangan dan Industri Migas tidak diperhitungkan, maka peranan keempat provinsi tersebut mencapai 50,17 persen dari total 3.179,61 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi sampai dengan saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, sedangkan untuk provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur lebih banyak didominasi oleh aktivitas sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertanian.

Di pulau Jawa, provinsi D.I. Yogyakarta memiliki peringkat yang sangat rendah dibanding provinsi lainnya. Rendahnya peringkat provinsi D.I. Yogyakarta disebabkan karena wilayah ini dalam perkembangannya memang merupakan daerah pusat pendidikan dan kebudayaan sehingga tidak banyak aktivitas ekonomi yang berskala besar berlokasi di wilayah ini. Untuk provinsi Banten, walaupun termasuk provinsi yang baru terbentuk tapi mampu memberikan peranan yang cukup tinggi. Yakni menempati posisi ke-9, hal ini dapat terjadi karena Provinsi Banten yang merupakan hasil pemekaran dari provinsi Jawa Barat, mempunyai kawasan industri yaitu di Cilegon dan Tangerang yang merupakan wilayah penyangga perekonomian DKI Jakarta.

Provinsi-provinsi diluar Pulau Jawa yang mempunyai kontribusi cukup besar (peringkatnya relatif baik) dalam perekonomian nasional adalah provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Kelima provinsi tersebut merupakan provinsi-provinsi yang kaya akan sumber daya alam khususnya minyak dan gas bumi.

Provinsi-provinsi yang baru terbentuk hasil dari pemekaran wilayah memiliki peran yang belum begitu besar. Maluku Utara misalnya, memberikan kontribusi sebesar 0,09 persen (peringkat 33). Meskipun Sulawesi Barat dan Papua Barat merupakan provinsi yang termuda tetapi kontribusinya terhadap PDRB tidak berada pada posisi paling rendah, yaitu masing-masing ada pada peringkat 30 dan 29.

Gambar 5.1 Peranan PDRB Provinsi dalam pembentukan ekonomi Indonesia dengan migas dan tanpa migas, 2008



Pada sisi lain, pengamatan peranan setiap provinsi terhadap keseluruhan provinsi di Indonesia tanpa memperhitungkan sumber daya migas, ternyata juga menunjukkan kecenderungan atau pola yang hampir sama, yaitu peringkat atasnya masih didominasi oleh provinsi-provinsi di Pulau Jawa. Terdapat 14 (empat belas) provinsi di Indonesia yang bukan penghasil migas di tahun 2008. Hal tersebut terlihat dari nilai PDRB yang sama antara PDRB dengan migas dan tanpa migas. Provinsi-provinsi tersebut antara lain: Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua. Peranan provinsi-provinsi tersebut terhadap pembentukan ekonomi di Indonesia secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.1. Meskipun provinsi Riau dan Kalimantan Timur merupakan provinsi yang kaya akan minyak dan gas bumi, tetapi peranan PDRB tanpa migas tetap menunjukkan kontribusi yang cukup besar terhadap total 33 provinsi-berada pada peringkat 6 dan 7. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sektor-sektor selain migas memberikan nilai tambah yang besar pula terhadap perekonomian di kedua wilayah tersebut (pertambangan batubara di Kalimantan Timur dan perkebunan kelapa sawit di Riau).

5.7.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Seluruh Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (output), maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Tabel 5.2 PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 Dengan dan Tanpa Migas, 2008

No.	Provinsi	PDRB ADHK 2000 (Triliun Rp.)		Laju Pertumbuhan Ekonomi (Persen)	
		Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	34,09	26,51	-5,27	1,88
2	Sumatera Utara	106,17	105,43	6,39	6,40
3	Sumatera Barat	35,01	35,01	6,36	6,36
4	Riau	91,09	42,60	5,65	8,06
5	Kepulauan Riau	37,02	35,31	6,65	7,22
6	Jambi	15,30	13,72	7,16	7,36
7	Sumatera Selatan	58,08	44,78	5,10	6,34
8	Kepulauan Bangka Belitung	9,88	9,72	4,44	5,03
9	Bengkulu	7,35	7,35	4,93	4,93
10	Lampung	34,41	33,95	5,26	5,33
11	DKI Jakarta	353,54	352,60	6,18	6,19
12	Jawa Barat	290,17	281,71	5,83	5,97
13	Banten	68,83	68,83	5,82	5,82
14	Jawa Tengah	167,79	157,02	5,46	5,33
15	DI Yogyakarta	19,21	19,21	5,02	5,02
16	Jawa Timur	304,80	303,71	5,90	5,86
17	Kalimantan Barat	27,68	27,68	5,42	5,42
18	Kalimantan Tengah	16,73	16,73	6,16	6,16
19	Kalimantan Selatan	27,54	27,07	6,23	6,37
20	Kalimantan Timur	103,17	56,02	5,49	6,88
21	Sulawesi Utara	15,43	15,40	7,56	7,56
22	Gorontalo	2,52	2,52	7,76	7,76
23	Sulawesi Tengah	14,75	14,47	7,76	7,42
24	Sulawesi Selatan	44,55	44,46	7,78	7,79
25	Sulawesi Barat	3,87	3,87	8,54	8,54
26	Sulawesi Tenggara	10,01	10,01	7,27	7,27
27	Bali	24,90	24,90	5,97	5,97
28	Nusa Tenggara Barat	16,80	16,80	2,63	2,63
29	Nusa Tenggara Timur	11,43	11,43	4,81	4,81
30	Maluku	3,79	3,77	4,23	4,23
31	Maluku Utara	2,65	2,65	5,98	5,98
32	Papua	18,91	18,91	-1,49	-1,49
33	Papua Barat	6,37	4,96	7,33	8,68
Total PDRB		1.983,83	1.839,13		

Pertumbuhan suatu wilayah dapat saja terjadi tanpa memberi dampak positif pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi daripada tingkat pertumbuhan pendapatan di wilayah tersebut. Bagi daerah, indikator ini sangat dibutuhkan untuk menilai kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan, serta berguna pula untuk menentukan arah pembangunan pada masa yang akan datang. Data Pertumbuhan ekonomi diturunkan dari PDRB atas dasar Harga Konstan. Harga konstan yang digunakan adalah data harga tahun 2000.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) setiap provinsi di Indonesia tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 5.2 (migas dan tanpa migas). Suatu provinsi dikatakan mempunyai LPE positif jika telah terjadi peningkatan produksi barang dan jasa, sebaliknya jika angka LPE memperlihatkan angka yang negatif berarti produksi barang dan jasa yang ada di wilayah tersebut mengalami penurunan.

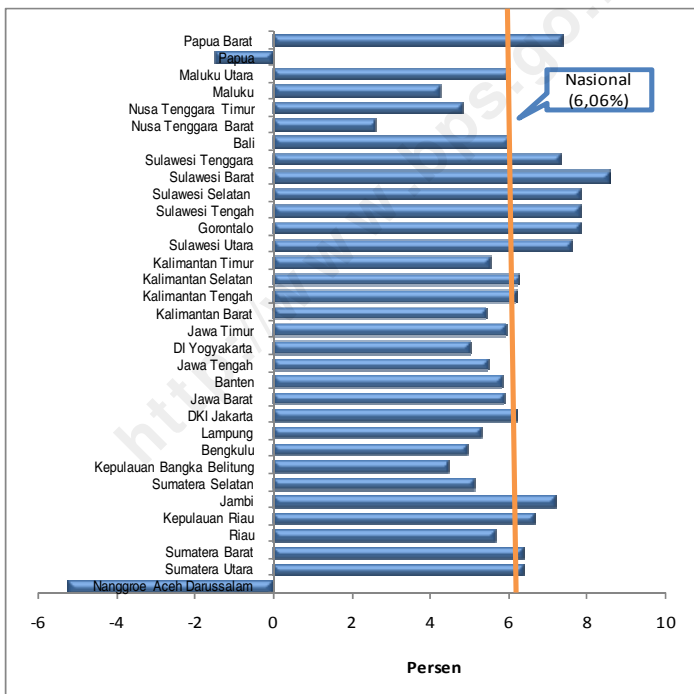
Provinsi yang mengalami kontraksi (tumbuh negatif) tahun 2008 yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua, tahun 2008. Tetapi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, hanya PDRB dengan migas saja yang mengalami kontraksi, hal ini disebabkan karena terjadi penurunan produksi minyak dan gas bumi serta industri pengolahan migas, sedangkan produksi barang dan jasa sektor non migas mengalami kenaikan-tumbuh sebesar 1,88 persen. Provinsi Papua, baik migas maupun tanpa migas mempunyai LPE yang negatif, hal ini terjadi karena adanya penurunan produksi pertambangan tembaga yang menyebabkan kontraksi sebesar -1,49 persen.

Dari 33 provinsi, yang mengalami LPE paling tinggi di tahun pada tahun 2008 (dengan migas) dialami oleh Provinsi Sulawesi Barat (8,54 persen). Apabila sektor migas tidak diperhitungkan, maka provinsi yang mengalami pertumbuhan paling pesat diantara 33 provinsi di Indonesia adalah Papua Barat dengan LPE sebesar 8,68 persen (tahun 2008). Meskipun Papua Barat merupakan provinsi yang relatif baru tetapi justru mampu memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Hal ini

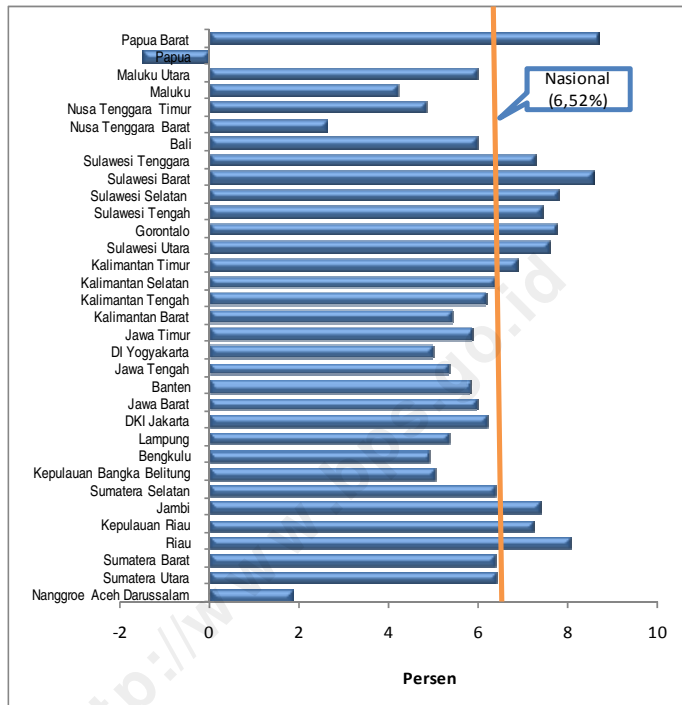
mengindikasikan bahwa Provinsi Papua Barat mempunyai mampu memberdayakan sumber daya yang dimilikinya dengan baik.

Provinsi-provinsi yang mengalami pertumbuhan di atas rata-rata Nasional baik dengan migas (6,06 persen) maupun tanpa migas (6,52 persen), tahun 2008 antara lain Provinsi Jambi, Papua Barat, dan Seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi. Gambaran lengkapnya dapat dilihat pada Gambar 5.2 dan 5.3.

Gambar 5.2 Laju pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas, 2008



Gambar 5.3 Laju pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas,2008



5.7.3. Perbandingan PDRB Per Kapita Provinsi-Provinsi di Indonesia

PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2000 dengan migas dan tanpa migas seluruh provinsi di Indonesia tahun 2008 dapat dilihat pada Tabel 5.3. Pada tabel tersebut terlihat bahwa sebaran PDRB per kapita ADHB baik migas maupun tanpa migas seluruh provinsi menunjukkan variasi yang cukup besar. Variasi ini terutama terlihat pada lima provinsi utama penghasil migas seperti NAD, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Bahkan pada tahun 2008, provinsi-provinsi tersebut mempunyai PDRB per kapita (dengan migas) di atas PDB per kapita (dengan migas) tingkat nasional kecuali Provinsi NAD dan Papua Barat. Meskipun migas yang dihasilkan oleh Provinsi DKI

Jakarta tidak sebesar provinsi- provinsi penghasil migas yang lain, tetapi PDRB perkapitanya mampu menembus nilai terbesar kedua setelah Provinsi Kalimantan Timur, yaitu dengan nilai di atas Rp. 70 juta. Hal ini terjadi karena DKI Jakarta sebagai pusat pemerintahan sekaligus pusat bisnis di Indonesia mempunyai nilai PDRB tertinggi di Indonesia tetapi jumlah penduduknya relatif sedikit untuk ukuran provinsi di Pulau Jawa.

Penghitungan PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) masih terdapat pengaruh harga di dalamnya sehingga tidak mencerminkan nilai pendapatan riilnya. Besaran pendapatan per kapita riil masyarakat di masing-masing provinsi di Indonesia dapat dilihat melalui perubahan PDRB per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Dalam penghitungan PDRB per kapita ADHK, perubahan harga pada masing-masing periode penghitungan telah dihilangkan. Bila suatu provinsi mengalami peningkatan PDRB per kapita ADHK, berarti pertumbuhan PDRB ADHK lebih cepat bila dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pendapatan riil masyarakat di provinsi tersebut. Sebaliknya apabila terjadi penurunan terhadap PDRB per kapita ADHK di suatu provinsi, berarti pertumbuhan PDRB ADHK lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan penduduknya. Menurunnya PDRB per kapita ADHK mengindikasikan adanya penurunan pendapatan riil masyarakat.

**Tabel 5.3 PDRB Per Kapita Provinsi-Provinsi Seluruh Indonesia
Dengan dan Tanpa Migas, 2008**

No.	Provinsi	PDRB Per Kapita ADHB (Juta Rp.)		PDRB Per Kapita ADHK 2000 (Juta Rp.)	
		Dengan Migas	Tanpa Migas	Dengan Migas	Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	17,12	12,62	7,94	6,17
2	Sumatera Utara	16,40	16,27	8,14	8,08
3	Sumatera Barat	14,96	14,96	7,35	7,35
4	Riau	53,26	28,74	17,55	8,21
5	Kepulauan Riau	40,75	37,47	25,48	24,30
6	Jambi	14,23	11,00	5,49	4,92
7	Sumatera Selatan	18,73	12,47	8,16	6,29
8	Kepulauan Bangka Belitung	19,35	18,90	8,81	8,66
9	Bengkulu	8,80	8,80	4,48	4,48
10	Lampung	10,08	9,88	4,66	4,59
11	DKI Jakarta	74,06	73,71	38,65	38,55
12	Jawa Barat	14,72	13,99	7,09	6,88
13	Banten	12,76	12,76	7,17	7,17
14	Jawa Tengah	11,18	9,60	5,14	4,81
15	DI Yogyakarta	10,99	10,99	5,54	5,54
16	Jawa Timur	16,76	16,70	8,22	8,19
17	Kalimantan Barat	11,39	11,39	6,52	6,52
18	Kalimantan Tengah	15,72	15,72	8,13	8,13
19	Kalimantan Selatan	13,21	13,02	7,99	7,86
20	Kalimantan Timur	101,86	41,39	33,34	18,10
21	Sulawesi Utara	12,61	12,60	6,99	6,98
22	Gorontalo	6,07	6,07	2,59	2,59
23	Sulawesi Tengah	11,55	11,27	6,05	5,93
24	Sulawesi Selatan	10,91	10,89	5,71	5,70
25	Sulawesi Barat	7,53	7,53	3,75	3,75
26	Sulawesi Tenggara	10,69	10,69	4,82	4,82
27	Bali	14,20	14,20	7,08	7,08
28	Nusa Tenggara Barat	8,08	8,08	3,85	3,85
29	Nusa Tenggara Timur	4,77	4,77	2,52	2,52
30	Maluku	4,75	4,73	2,87	2,86
31	Maluku Utara	4,02	4,02	2,76	2,76
32	Papua	26,61	26,61	9,20	9,20
33	Papua Barat	17,09	11,97	8,73	6,80
Total PDRB per Kapita		18,41	16,28	8,68	8,05

Perbandingan antara PDRB per kapita migas dan tanpa migas menunjukkan adanya perbedaan yang relatif besar pada sebagian besar provinsi penghasil migas. Kondisi ini menunjukkan bahwa sekalipun terdapat adanya usaha pada sektor migas yang menghasilkan nilai tambah yang besar, namun belum memberikan dampak bagi tingkat kemakmuran provinsi tersebut. Karena produksi pada sub sektor migas lebih berorientasi ekspor dan kurang berkaitan dengan kegiatan ekonomi di provinsi bersangkutan. Akibatnya, dampak positif dari kegiatan produksi migas lebih banyak dirasakan oleh perekonomian nasional dalam bentuk penerimaan devisa. Setelah era otonomi diberlakukan, maka pemerintah pusat mulai mengalokasikan bagi hasil kepada daerah penghasil migas.

5.7.4. Perbandingan PDRB Kabupaten/Kota

Hasil kinerja pembangunan ekonomi di Indonesia memberikan hasil yang berbeda-beda antar daerah. Dimana perbedaan antar daerah merupakan suatu konsekuensi logis dari perbedaan karakteristik alam, ekonomi, sosial dan budaya. Sebaran sumberdaya alam, khususnya minyak dan gas bumi, pertumbuhan pusat perdagangan dan industri yang terkonsentrasi di beberapa daerah telah menimbulkan adanya kantong-kantong pertumbuhan, sehingga ketimpangan PDRB antar daerah sangat tinggi. Potret mengenai kinerja pembangunan ekonomi regional dapat dilihat dari besaran PDRB kabupaten/kota se-Indonesia.

Apabila angka PDRB kabupaten/kota tahun 2008 diurutkan dengan mengambil 20 besar kabupaten/kota tertinggi untuk nilai PDRB dengan migas, ternyata sebagian besar kabupaten/kota yang memiliki PDRB tertinggi terdapat di Pulau Jawa dan sisanya di Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan.

Tabel 5.4 Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi, Tahun 2008

Rank	Kabupaten/Kota	PDRB Dengan Migas (Triliun Rp)	Kabupaten/Kota	PDRB Tanpa Migas (Triliun Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	178,56	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	178,56
2	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	152,15	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	152,15
3	Kota Surabaya, Jawa Timur	149,79	Kota Surabaya, Jawa Timur	149,79
4	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	129,39	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	129,39
5	Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta	117,24	Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta	117,24
6	Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	100,96	Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta	100,96
7	Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim	99,56	Kab. Bekasi, Jabar	81,47
8	Kab. Bekasi, Jabar	82,98	Kota Medan, Sumut	65,22
9	Kab. Cilacap, Jateng	81,68	Kota Bandung, Jabar	60,44
10	Kab. Bengkalis, Riau	79,57	Kab. Bogor, Jabar	58,39
11	Kota Bontang, Kaltim	76,21	Kota Kediri, Jatim	48,46
12	Kota Medan, Sumut	65,22	Kota Tangerang, Banten	44,69
13	Kota Bandung, Jabar	60,44	Kab. Sidoarjo, Jatim	44,42
14	Kab. Bogor, Jabar	58,39	Kab. Karawang, Jabar	40,69
15	Kota Kediri, Jatim	48,46	Kota Batam, Kepri	38,26
16	Kab. Siak, Riau	45,02	Kab. Bandung, Jabar	37,88
17	Kab. Sidoarjo, Jatim	44,71	Kab. Tangerang, Banten	35,07
18	Kota Tangerang, Banten	44,69	Kota Semarang, Jateng	34,54
19	Kab. Karawang, Jabar	42,46	Kab. Mimika, Papua	34,44
20	Kota Palembang, Sumsel	42,25	Kab. Cilacap, Jateng	30,24

Pada Tabel 5.4 terlihat bahwa besaran PDRB kabupaten/kota (dengan migas) tertinggi di Pulau Jawa didominasi oleh kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta. Besaran nilai PDRB tersebut hampir dua kali lipat nilai PDRB kabupaten/kota tertinggi di luar Pulau Jawa. Sedangkan untuk nilai PDRB tanpa komponen migas, hampir semuanya didominasi oleh kabupaten/kota di Pulau Jawa. Sisanya Kota Medan dan Kota Batam di Pulau Sumatera dan Kab. Mimika di Papua. Hal ini sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan selama ini secara nyata masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa. Sebaran 20 Kabupaten/Kota dengan PDRB tertinggi di Indonesia tahun 2008 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.4.

Tabel 5.5 Karakteristik Ekonomi 20 Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi, 2008

Rank	Kabupaten/Kota	Karakteristik
(1)	(2)	(3)
1	Kota Jakarta Pusat	Kota Metropolitan, Pusat perdagangan, industri, dan jasa-jasa
2	Kota Jakarta Selatan	Kota Metropolitan, Pusat perdagangan, dan jasa-jasa
3	Kota Surabaya	Kota Metropolitan kedua, Pusat perdagangan, industri, dan jasa-jasa
4	Kota Jakarta Utara	Kota Metropolitan, Pusat perdagangan, industri, dan jasa-jasa
5	Kota Jakarta Timur	Kota Metropolitan, Pusat perdagangan, industri, dan jasa-jasa
6	Kota Jakarta Barat	Kota Metropolitan, Pusat perdagangan, industri, dan jasa-jasa
7	Kab. Kutai Kartanegara	Industri pengilangan minyak bumi dan perdagangan
8	Kab. Bekasi	Industri pengolahan bukan migas (industri elektronik dan industri alat angkutan & mesin)
9	Kab. Cilacap	Industri pengilangan minyak bumi dan perdagangan
10	Kab. Bengkulu	Pertambangan minyak bumi
11	Kota Bontang	Industri gas alam cair (LNG)
12	Kota Medan	Perdagangan dan industri pengolahan bukan migas
13	Kota Bandung	Perdagangan dan industri pengolahan bukan migas
14	Kab. Bogor	Industri pengolahan bukan migas (industri tekstil)
15	Kota Kediri	Industri pengolahan bukan migas (industri rokok)
16	Kab. Siak	Pertambangan minyak bumi dan industri pengolahan bukan migas
17	Kab. Sidoarjo	Industri pengolahan bukan migas (industri elektronik) dan perdagangan
18	Kota Tangerang	Industri pengolahan bukan migas (industri tekstil)
19	Kab. Karawang	Industri pengolahan bukan migas (industri kertas dan industri alat angkutan & mesin)
20	Kota Palembang	Industri pengilangan minyak bumi dan pengolahan bukan migas

Pada dasarnya, keberadaan dan perkembangan dari daerah yang memiliki PDRB tinggi disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena adanya kekayaan sumberdaya alam (*natural resources endowment*)—daerah yang mempunyai kapasitas produksi yang demikian tinggi disebabkan adanya kelimpahan sumberdaya alam seperti minyak dan

gas bumi, bahan tambang galian dan hutan, sehingga mendorong investor masuk ke daerah ini untuk mengeksploitasi sumberdaya yang ada. Daerah yang tergolong pada kelompok ini adalah Kab. Kutai Kartanegara dan Kota Bontang (Kalimantan Timur); Kab. Bengkalis dan Kab. Siak (Riau); serta Kab. Mimika (Papua). Kedua, karena didorong oleh keunggulan komparatif atau karena adanya dukungan kebijakan khusus (*comparative advantages and policy driven*). *Comparative advantages* dimiliki suatu daerah karena lokasi yang strategis, aksesibilitas dan lain-lain. Daerah yang termasuk kategori ini antara lain adalah Kota Batam, Jakarta dan Surabaya. Karakteristik daerah-daerah kaya di Indonesia secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Sementara itu, jika kita amati sebaran PDRB Kabupaten/Kota yang tertinggi di setiap provinsi pada tahun 2008 dengan migas dan tanpa migas tidak menunjukkan adanya perbedaan, kecuali di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Jawa Tengah, dan Papua Barat. Kabupaten yang memiliki PDRB dengan migas dan tanpa migas tertinggi di Nanggroe Aceh Darussalam berturut-turut adalah Kab. Aceh Utara dan Kota Banda Aceh. Di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kab. Cilacap dan Kota Semarang. Sedangkan di Provinsi Papua Barat, yaitu Kab. Sorong dan Kota Sorong. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya PDRB Kab. Aceh Utara, Kab. Cilacap, dan Kab. Sorong disebabkan oleh sumbangan sektor migas.

Pada Tabel 5.6. terlihat bahwa sebaran PDRB yang tertinggi di setiap provinsi memiliki tingkat ketimpangan yang relatif sangat tinggi–terbesar terjadi di Kota Jakarta Pusat, PDRBnya mencapai 178,56 triliun rupiah dan terendah di Kota Ternate, di mana PDRBnya hanya mencapai kurang dari 1 triliun rupiah. Akan tetapi jika daerah yang memiliki migas (Aceh Utara, Cilacap, Kutai Kartanegara), pertambangan (Mimika), kantong industri serta pusat perdagangan (Jakarta Pusat, Tangerang, Bekasi, Surabaya, Palembang, Batam, Semarang dan Medan) di keluarkan dari pengamatan terlihat bahwa

ketimpangan PDRB antar kabupaten relatif tidak begitu tinggi—besaran PDRB kabupaten/kota hanya berkisar antara 0,69 – 26,07 triliun rupiah.

Tabel 5.6 Kabupaten/Kota dengan PDRB Tertinggi di Tiap Provinsi Tahun 2008 (Triliun Rupiah)

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	PDRB Dengan Migas	Kabupaten/Kota	PDRB Tanpa Migas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Kab. Aceh Utara	11,61	Kota Banda Aceh	4,54
2	Sumatera Utara	Kota Medan	65,22	Kota Medan	65,22
3	Sumatera Barat	Kota Padang	20,12	Kota Padang	20,12
4	Riau	Kota Pekanbaru	24,92	Kota Pekanbaru	24,92
5	Kepulauan Riau	Kota Batam	38,26	Kota Batam	38,26
6	Jambi	Kota Jambi	6,90	Kota Jambi	6,35
7	Sumatera Selatan	Kota Palembang	42,25	Kota Palembang	28,56
8	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	5,03	Kab. Bangka Barat	4,99
9	Bengkulu	Kota Bengkulu	3,88	Kota Bengkulu	3,88
10	Lampung	Kota Bandar Lampung	13,44	Kota Bandar Lampung	13,44
11	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	178,56	Jakarta Pusat	178,56
12	Jawa Barat	Kab. Bekasi	82,98	Kab. Bekasi	81,47
13	Banten	Kota Tangerang	44,69	Kota Tangerang	44,69
14	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	81,68	Kota Semarang	34,54
15	DI Yogyakarta	Kab. Sleman	11,46	Kab. Sleman	11,46
16	Jawa Timur	Kota Surabaya	149,79	Kota Surabaya	149,79
17	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	9,52	Kota Pontianak	9,52
18	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	5,75	Kab. Kotawaringin Timur	5,75
19	Kalimantan Selatan	Kab. Kota Baru	7,58	Kab. Kota Baru	7,58
20	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	99,56	Kab. Kutai Kartanegara	22,05
21	Sulawesi Utara	Kota Manado	8,84	Kota Manado	8,84
22	Gorontalo	Kab. Gorontalo	1,56	Kab. Gorontalo	1,56
23	Sulawesi Tengah	Kab. Parigi Moutong	4,79	Kab. Parigi Moutong	4,79
24	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	26,07	Kota Makassar	26,07
25	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju	2,50	Kab. Mamuju	2,50
26	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	5,09	Kab. Kolaka	5,09
27	Bali	Kab. Badung	10,48	Kab. Badung	10,48
28	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	11,04	Kab. Sumbawa Barat	11,04
29	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	3,59	Kota Kupang	3,59
30	Maluku	Kota Ambon	2,67	Kota Ambon	2,67
31	Maluku Utara	Kota Ternate	0,69	Kota Ternate	0,69
32	Papua	Kab. Mimika	34,44	Kab. Mimika	34,44
33	Papua Barat	Kab. Sorong	4,28	Kota Sorong	2,15

Perbandingan relatif antara PDRB dengan migas dan tanpa migas menunjukkan variasi yang relatif sama. Perbedaan dominasi terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Kabupaten Aceh Utara memiliki PDRB dengan migas tertinggi (11,61 triliun). Namun bila sektor migas tidak diperhitungkan, maka Kabupaten dengan PDRB tertinggi adalah Kota Banda Aceh (4,54 triliun). Di Provinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan Timur perbedaan PDRB dengan migas dan tanpa migas menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan walaupun posisi tertinggi masih ditempati oleh kabupaten/kota yang sama yaitu Kota Palembang di provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Kutai Kertanegara di Kalimantan Timur.

Sedangkan pengamatan pada PDRB kabupaten/kota terendah tahun 2008 menunjukkan bahwa dari total 20 kabupaten/kota dengan PDRB terendah 9 diantaranya berada di provinsi Papua, sisanya terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. kabupaten/kota tersebut sebagian berada di kawasan timur Indonesia. Kondisi geografis dan jumlah penduduk yang masih sedikit merupakan faktor yang kurang mendukung tumbuhnya ekonomi di wilayah tersebut. Sebaran 20 (dua puluh) kabupaten/kota yang memiliki PDRB terendah dapat dilihat selengkapnya pada Tabel 5.7.

Tabel 5.7 Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan PDRB Terendah, Tahun 2008

Rank	Kabupaten/Kota, Provinsi	PDRB (Triliun Rp.)
(1)	(2)	(3)
1	Kab. Nduga, Papua	0,07
2	Kab. Mamberamo Tengah, Papua	0,07
3	Kab. Yalimo, Papua	0,08
4	Kab. Mamberamo Raya, Papua	0,13
5	Kab. Lanny Jaya, Papua	0,17
6	Kab. Waropen, Papua	0,18
7	Kab. Buru Selatan, Maluku	0,19
8	Kab. Yahukimo, Papua	0,20
9	Kota Tual, Maluku	0,22
10	Kab. Sumba Tengah, NTT	0,23
11	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	0,23
12	Kab. Tolikara, Papua	0,25
13	Kab. Pakpak Bharat, Sumut	0,26
14	Kab. Pulau Buru, Maluku	0,26
15	Kab. Puncak, Papua	0,27
16	Kab. Teluk Wondama, Papua Barat	0,27
17	Kab. Tana Tidung, Kaltim	0,28
18	Kota Subulussalam, NAD	0,28
19	Kab. Halmahera Barat, Malut	0,28
20	Kab. Halmahera Tengah, Malut	0,29

5.7.5 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota 2008

Di antara 483 kabupaten/kota di Indonesia terdapat kabupaten/kota yang memiliki PDRB per kapita yang sangat tinggi sehingga daerah-daerah ini merupakan daerah kantong (*enclave regions*), antara lain disebabkan oleh keberadaan minyak dan gas bumi atau sumberdaya alam lainnya. Hal ini secara jelas terlihat pada Tabel 5.8, yang menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2008, daerah-daerah yang tergolong sangat kaya adalah Kab. Bontang (570,81 juta rupiah), dan Kab. Mimika (240,04 juta rupiah).

Tabel 5.8 Dua Puluh (20) Kabupaten/Kota dengan PDRB Per Kapita Tertinggi dan Terendah, 2008

Rank	Kabupaten/Kota, Provinsi	PDRB Per Kapita Tertinggi (Juta Rp.)	Kabupaten/Kota, Provinsi	PDRB Per Kapita Terendah (Juta Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kota Bontang, Kaltim	570,81	Kab. Yahukimo, Papua	1,32
2	Kab. Mimika, Papua	240,04	Kab. Manggarai, NTT	1,84
3	Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta	199,57	Kab. Pulau Buru, Maluku	1,99
4	Kab. Kutai Kartanegara, Kaltim	188,79	Kota Subulussalam, NAD	2,15
5	Kab. Kep. Seribu, DKI Jakarta	180,08	Kab. Maluku Tenggara, Maluku	2,40
6	Kota Kediri, Jatim	179,24	Kab. Tana Toraja, Sulsel	2,42
7	Kab. Kepulauan Anambas, Kep. Riau	151,61	Kab. Pontianak, Kalbar	2,65
8	Kab. Siak, Riau	139,63	Kab. Seram Bagian Timur, Maluku	2,74
9	Kab. Kutai Timur, Kaltim	127,52	Kab. Sumba Barat Daya, NTT	2,78
10	Kab. Sumbawa Barat, NTB	111,49	Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku	2,82
11	Kab. Bengkalis, Riau	106,41	Kab. Manggarai Timur, NTT	2,82
12	Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta	88,66	Kab. Maluku Tengah, Maluku	2,83
13	Kota Balikpapan, Kaltim	79,74	Kab. Halmahera Barat, Maluku	2,89
14	Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta	71,04	Kab. Lembata, NTT	2,97
15	Kota Surabaya, Jatim	56,95	Kab. Mamberamo Tengah, Papua	3,00
16	Kota Lhokseumawe, NAD	56,73	Kab. Lanny Jaya, Papua	3,02
17	Kab. Rokan Hilir, Riau	55,06	Kab. Nduga, Papua	3,11
18	Kota Cilegon, Banten	52,43	Kab. Puncak Jaya, Papua	3,29
19	Kota Batam, Kep. Riau	51,88	Kab. Belu, NTT	3,34
20	Kab. Musi Banyuasin, Sumsel	51,12	Kab. Seram Bagian Barat, Maluku	3,34

Relatif tingginya PDRB per kapita di kedua wilayah ini pada kenyataannya tidak selalu memberikan kemakmuran bagi masyarakatnya. Hal ini disebabkan produksi pertambangan di kedua daerah ini berorientasi ekspor dan manfaatnya lebih dirasakan oleh perekonomian nasional dalam bentuk penerimaan devisa. Akan tetapi dengan diterapkannya UU No.25 dan UU No.29 Tahun 1999, tentunya kedua daerah ini mempunyai prospek yang cukup baik-melalui dana perimbangan dan bagi hasil diharapkan nantinya dapat meningkatkan pembangunan di daerah ini yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya.

Secara spasial kita telah mengetahui daerah-daerah yang relatif kaya di Indonesia dengan beberapa karakteristiknya, namun pada sisi lain, ternyata kita juga masih mempunyai daerah-daerah yang secara ekonomi masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Pada Tabel 5.8, terlihat bahwa pada tahun 2008 terdapat 20 kabupaten yang sangat tertinggal. Bila kita lihat sebarannya, sebanyak 16 kabupaten berada di gabungan Provinsi NTT-Maluku-Papua. Terbanyak berasal dari Provinsi Maluku sebanyak 6 kabupaten, diikuti Provinsi NTT dan Papua di mana masing-masing sebanyak 5 kabupaten. Provinsi lain yang masih menyisakan permasalahan ini dengan menyertakan salah satu kabupaten/kotanya adalah Provinsi NAD (Kota Subulussalam), Sulawesi Selatan (Kab. Tana Toraja), Kalimantan Barat (Kab. Pontianak), dan Maluku Utara (Kab. Halmahera Barat). Di Provinsi Papua tampak mencolok kondisinya, di mana Kab. Mimika merupakan kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tertinggi kedua di Indonesia (240,04 juta rupiah) sedangkan di provinsi ini ternyata terdapat 5 kabupaten yang memiliki PDRB per kapita sangat rendah (kurang dari 3,3 juta rupiah). Tingginya PDRB per kapita di Kab. Mimika ini disebabkan keberadaan kegiatan pertambangan emas dan tembaga oleh PT. Freeport Indonesia. Walaupun demikian, hal ini tidaklah selalu menunjukkan bahwa PDRB per kapita tersebut dinikmati secara merata oleh masyarakat sekitarnya.

Secara lebih detail, pada tahun 2008 jika kita amati menurut dimensi Pulau dengan memperhatikan nilai PDRB per kapita, daerah yang paling kaya di Pulau Jawa adalah Kota Jakarta Pusat (DKI Jakarta), di Pulau Sumatera adalah Kota Lhokseumawe (NAD), di Pulau Kalimantan adalah Kota Bontang (Kaltim), di Pulau Sulawesi adalah Kabupaten Luwu Timur (Sulsel), di Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Kabupaten Sumbawa Barat (NTB), di Pulau Maluku dan Papua adalah Kabupaten Mimika (Papua). Sedangkan daerah paling tertinggal di Pulau Jawa adalah Kab. Grobogan (Jateng), di Pulau Sumatera adalah Kota Subulussalam (NAD), di Pulau Kalimantan adalah Kab. Pontianak (Kalbar), di Pulau Sulawesi adalah Kab. Tana Toraja (Sulsel), di Pulau Bali dan Nusa Tenggara adalah Kab. Manggarai (NTT), di Pulau Maluku dan Papua adalah Kab. Yahukimo (Papua).

Pengamatan terhadap PDRB per kapita masing-masing provinsi menunjukkan adanya keberagaman kondisi kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tertinggi dan terendahnya. Dari Tabel 5.9 terlihat bahwa dari kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tertinggi di tiap provinsi terdapat 7 (tujuh) kabupaten/kota dengan PDRB per kapita di atas 100 juta rupiah. Lima di antaranya merupakan daerah penghasil tambang (migas/non migas) terkemuka, yaitu Kab. Siak, Kab. Kepulauan Anambas, Kota Bontang, Kab. Sumbawa Barat, dan Kab. Mimika. Sedangkan sisanya merupakan daerah industri (Kota Kediri) dan daerah perdagangan dan jasa-jasa (Kota Jakarta Pusat). Apabila ketujuh provinsi pada kabupaten/kota tersebut dikeluarkan dari daftar di atas, terlihat bahwa ketimpangan antara kabupaten/kota dengan PDRB per kapita tertinggi dan terendah di tiap provinsi tidak begitu tinggi.

Tabel 5.9 Kabupaten/Kota dengan PDRB Per Kapita Tertinggi dan Terendah di Tiap Provinsi, 2008

No	Provinsi	Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita Tertinggi (Juta Rp.)	Kabupaten/Kota	PDRB Per Kapita Terendah (Juta Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	Kota Lhokseumawe	56,73	Kota Subulussalam	2,15
2	Sumatera Utara	Kab. Batu Bara	34,52	Kab. Tapanuli Selatan	3,98
3	Sumatera Barat	Kota Padang	23,49	Kab. Solok Selatan	8,07
4	Riau	Kab. Siak	139,63	Kab. Rokan Hulu	23,41
5	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	151,61	Kab. Lingga	9,49
6	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	30,27	Kab. Kerinci	7,67
7	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	51,12	Kab. OKU Selatan	6,81
8	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	31,78	Kab. Bangka	14,50
9	Bengkulu	Kota Bengkulu	14,12	Kab. Kaur	3,88
10	Lampung	Kota Bandar Lampung	16,33	Kab. Lampung Selatan	5,27
11	DKI Jakarta	Jakarta Pusat	199,57	Jakarta Barat	45,84
12	Jawa Barat	Kab. Bekasi	37,82	Kab. Tasikmalaya	4,23
13	Banten	Kota Cilegon	52,43	Kab. Lebak	5,47
14	Jawa Tengah	Kab. Cilacap	50,21	Kab. Grobogan	3,88
15	DI Yogyakarta	Kota Yogyakarta	21,46	Kab. Gunung Kidul	8,01
16	Jawa Timur	Kota Kediri	179,24	Kab. Pamekasan	4,55
17	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	18,26	Kab. Pontianak	2,65
18	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	22,45	Kab. Pulang Pisau	8,69
19	Kalimantan Selatan	Kab. Kota Baru	27,40	Kab. Hulu Sungai Utara	5,17
20	Kalimantan Timur	Kota Bontang	570,81	Kab. Bulungan	19,07
21	Sulawesi Utara	Kota Manado	20,61	Kab. Bolaang Mongondow	4,94
22	Gorontalo	Kab. Pohuwato	7,76	Kab. Gorontalo Utara	3,91
23	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali	15,02	Kab. Tojo Una Una	4,39
24	Sulawesi Selatan	Kab. Luwu Timur	30,15	Kab. Tana Toraja	2,42
25	Sulawesi Barat	Kab. Mamuju Utara	9,37	Kab. Polewali Mandar	6,07
26	Sulawesi Tenggara	Kab. Kolaka	18,10	Kab. Buton	5,28
27	Bali	Kab. Badung	25,18	Kab. Karangasem	8,27
28	Nusa Tenggara Barat	Kab. Sumbawa Barat	111,49	Kab. Lombok Barat	3,81
29	Nusa Tenggara Timur	Kota Kupang	12,27	Kab. Manggarai	1,84
30	Maluku	Kota Ambon	10,07	Kab. Pulau Buru	1,99
31	Maluku Utara	Kab. Halmahera Tengah	8,29	Kab. Halmahera Barat	2,89
32	Papua	Kab. Mimika	240,04	Kab. Yahukimo	1,32
33	Papua Barat	Kab. Sorong	43,60	Kab. Sorong Selatan	5,88



Tabel Ringkasan



<http://www.bps.go.id>



TABEL A.1 DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU 33 PROVINSI, TAHUN 2010

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4.363.477	70,76	221,00	17.124.407
2	Sumatera Utara	13.248.386	73,29	207,81	16.402.890
3	Sumatera Barat	4.827.973	72,96	204,89	14.955.178
4	Riau	5.306.533	75,09	231,03	53.264.970
5	Kepulauan Riau	1.515.294	74,18	243,37	40.746.486
6	Jambi	2.834.164	71,99	212,55	14.225.795
7	Sumatera Selatan	7.222.635	72,05	209,59	18.725.472
8	Bangka Belitung	1.138.129	72,19	228,88	19.349.751
9	Bengkulu	1.666.920	72,14	210,07	8.798.818
10	Lampung	7.491.943	70,30	203,44	10.078.380
11	DKI Jakarta	9.223.000	77,03	217,61	74.064.912
12	Jawa Barat	41.501.564	71,12	203,88	14.722.525
13	Banten	9.782.779	69,70	203,78	12.797.812
14	Jawa Tengah	32.864.563	71,60	201,30	11.184.058
15	DI Yogyakarta	3.501.869	74,88	203,15	10.985.184
16	Jawa Timur	37.286.246	70,38	198,73	16.756.563
17	Kalimantan Barat	4.319.142	68,17	230,92	11.394.255
18	Kalimantan Tengah	2.085.819	73,88	238,53	15.724.846
19	Kalimantan Selatan	3.496.125	68,72	217,51	13.205.830
20	Kalimantan Timur	3.164.798	74,52	239,13	101.859.021
21	Sulawesi Utara	2.228.856	75,16	234,29	12.609.979
22	Gorontalo	983.952	69,29	219,01	6.068.441
23	Sulawesi Tengah	2.480.264	70,09	217,70	11.545.199
24	Sulawesi Selatan	7.908.519	70,22	209,38	10.908.767
25	Sulawesi Barat	1.047.739	68,55	217,36	7.534.953
26	Sulawesi Tenggara	2.118.300	69,00	220,90	10.686.344
27	Bali	3.551.009	70,98	205,31	14.198.733
28	Nusa Tenggara Barat	4.434.012	64,12	210,20	8.080.579
29	Nusa Tenggara Timur	4.619.655	66,15	233,67	4.768.486
30	Maluku	1.339.503	70,38	266,25	4.747.086
31	Maluku Utara	974.990	68,18	259,34	4.018.726
32	Papua	2.097.482	64,00	492,08	26.614.722
33	Papua Barat	743.860	67,95	330,13	17.085.281

TABEL A.2 DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU 477 KABUPATEN/KOTA, TAHUN 2010

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Provinsi NAD		4.363.477	70,76	221,00	17.124.407
1	Kab. Aceh Barat	158.499	69,66	211,28	14.767.727
2	Kab. Aceh Besar	312.762	72,84	209,95	12.556.796
3	Kab. Aceh Selatan	215.315	69,18	212,95	8.705.828
4	Kab. Aceh Singkil	102.505	68,12	222,34	5.785.169
5	Kab. Aceh Tengah	189.298	72,81	212,96	9.945.832
6	Kab. Aceh Tenggara	177.024	70,99	213,43	6.711.370
7	Kab. Aceh Timur	340.728	69,55	221,18	10.566.295
8	Kab. Aceh Utara	532.537	71,47	221,72	19.943.413
9	Kab. Bireun	359.032	72,60	216,62	10.600.095
10	Kab. Pidie	386.053	71,21	209,06	6.408.036
11	Kab. Simeulue	82.344	68,60	254,98	5.079.591
12	Kota Banda Aceh	212.241	76,74	208,61	16.956.137
13	Kota Sabang	29.184	75,00	235,58	14.443.531
14	Kota Langsa	140.415	72,79	217,61	9.131.016
15	Kota Lhokseumawe	159.239	75,00	221,40	59.006.897
16	Kab. Nagan Raya	125.425	68,47	212,53	15.501.993
17	Kab. Aceh Jaya	82.904	68,94	214,64	7.092.689
18	Kab. Aceh Barat Daya	124.813	69,38	217,18	8.337.529
19	Kab. Gayo Lues	75.165	67,17	222,26	9.412.863
20	Kab. Aceh Tamiang	241.734	69,81	216,36	8.119.096
21	Kab. Bener Meriah	114.464	69,77	221,98	10.939.707
22	Kota Subulussalam	66.451	68,42	215,13	2.523.391
23	Kab. Pidie Jaya	135.345	71,23	209,37	14.429.087
Provinsi Sumatera Utara		13.248.386	73,29	207,81	16.402.890
1	Kab. Asahan	700.606	71,57	200,46	13.871.718
2	Kab. Dairi	273.851	72,01	201,93	11.449.582
3	Kab. Deli Serdang	1.788.351	74,36	196,60	17.324.145
4	Kab. Tanah Karo	370.619	74,43	201,72	14.017.621
5	Kab. Labuhan Batu	417.584	73,08	203,38	5.910.760
6	Kab. Langkat	1.057.768	72,24	197,04	12.703.447
7	Kab. Mandailing Natal	429.889	69,92	203,38	7.281.171

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Kab. Nias	444.502	67,55	256,58	8.268.357
9	Kab. Simalungun	859.879	72,49	199,18	9.864.140
10	Kab. Tapanuli Selatan	265.855	73,33	204,00	3.983.245
11	Kab. Tapanuli Tengah	323.563	70,48	201,50	5.748.820
12	Kab. Tapanuli Utara	271.474	73,53	202,11	11.682.270
13	Kab. Toba Samosir	174.453	75,75	205,63	15.981.428
14	Kota Binjai	257.105	75,88	196,89	15.077.532
15	Kota Medan	2.121.053	76,70	200,73	31.026.883
16	Kota Pematang Siantar	240.939	76,95	201,06	14.485.666
17	Kota Sibolga	96.034	74,39	206,23	13.054.018
18	Kota Tanjung Balai	167.500	73,26	203,24	15.150.893
19	Kota Tebing Tinggi	142.717	75,69	199,25	12.928.436
20	Kota Padang Sidempuan	191.912	74,26	206,46	9.253.414
21	Kab. Pakpak Bharat	42.814	69,95	205,14	6.304.487
22	Kab. Nias Selatan	273.733	65,59	260,23	6.940.287
23	Kab. Humbang Hasundutan	158.070	71,24	201,17	12.832.523
24	Kab. Serdang Berdagai	642.983	72,59	198,78	11.847.815
25	Kab. Samosir	132.023	73,24	207,16	10.584.514
26	Kab. Batu Bara	389.510	70,98	202,95	34.517.058
27	Kab. Padang Lawas	186.643	71,15	204,12	6.975.803
28	Kab. Padang Lawas Utara	194.774	71,85	203,93	6.850.389
29	Kab. Labuhan Batu Utara	351.620	72,80	203,50	15.595.918
30	Kab. Labuhan Batu Selatan	280.562	73,16	203,36	18.824.653
	Provinsi Sumatera Barat	4.827.973	72,96	204,89	14.955.178
1	Kab. Limapuluh Koto	333.921	70,47	198,20	15.136.602
2	Kab. Agam	431.153	72,50	202,24	12.111.114
3	Kab. Kepulauan Mentawai	68.964	67,97	257,69	16.149.808
4	Kab. Padang Pariaman	389.735	70,63	197,67	13.244.975
5	Kab. Pasaman	261.579	71,71	198,54	10.069.817
6	Kab. Pesisir Selatan	448.488	70,07	203,91	8.095.188
7	Kab. Sijunjung	206.982	69,77	201,78	11.968.765
8	Kab. Solok	359.819	69,81	197,96	11.416.237
9	Kab. Tanah Datar	336.604	72,98	197,41	12.999.272

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kota Bukit Tinggi	107.805	77,59	201,14	16.022.334
11	Kota Padang Panjang	56.491	76,93	199,41	13.475.818
12	Kota Padang	875.548	77,20	197,12	23.487.009
13	Kota Payakumbuh	106.911	74,95	197,51	14.285.700
14	Kota Sawahlunto	54.685	74,29	198,37	15.750.535
15	Kota Solok	59.837	74,73	197,97	15.187.890
16	Kota Pariaman	70.726	73,43	197,40	18.667.427
17	Kab. Pasaman Barat	338.567	69,33	202,86	14.610.346
18	Kab. Dharmasraya	186.354	67,99	200,33	11.662.666
19	Kab. Solok Selatan	133.804	68,06	199,10	8.071.437
	Provinsi Riau	5.306.533	75,09	231,03	53.264.970
1	Kab. Bengkalis	756.215	74,12	239,33	106.407.500
2	Kab. Indragiri Hilir	683.354	74,41	235,08	27.605.557
3	Kab. Indragiri Hulu	330.410	73,43	230,45	37.598.843
4	Kab. Kampar	615.126	73,64	220,13	35.691.533
5	Kab. Kuantan Singingi	279.234	72,95	221,23	37.195.112
6	Kab. Pelalawan	285.813	72,07	218,76	45.490.393
7	Kab. Rokan Hilir	565.558	71,51	233,00	55.063.606
8	Kab. Rokan Hulu	413.056	71,84	222,09	23.412.134
9	Kab. Siak	332.562	75,64	233,01	139.625.939
10	Kota Dumai	242.417	76,91	235,17	37.395.517
11	Kota Pekanbaru	802.788	77,54	217,59	31.725.451
	Provinsi Kepulauan Riau	1.515.294	74,18	243,37	40.746.486
1	Kab. Bintan	127.404	73,34	236,45	30.215.445
2	Kab. Natuna	61.978	69,81	256,85	11.190.865
3	Kab. Karimun	231.658	72,80	236,86	15.395.088
4	Kota Batam	781.342	77,28	236,00	51.881.364
5	Kota Tanjung Pinang	187.529	73,92	235,21	22.697.823
6	Kab. Lingga	89.737	70,74	237,26	9.491.061
7	Kab. Kepulauan Anambas	35.646	67,44	255,88	151.612.718
	Provinsi Jambi	2.834.164	71,99	212,55	14.225.795
1	Kab. Batanghari	222.841	72,36	211,51	13.038.518
2	Kab. Bungo	271.625	70,67	204,91	11.040.743

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Kab. Kerinci	233.719	73,71	209,58	7.666.689
4	Kab. Merangin	292.013	71,39	213,88	7.958.392
5	Kab. Muaro Jambi	314.598	71,99	206,38	9.959.789
6	Kab. Sarolangun	218.228	71,36	214,25	14.219.807
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	255.952	71,93	218,60	18.663.516
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	213.781	70,61	219,75	30.268.152
9	Kab. Tebo	257.267	71,08	214,12	7.703.302
10	Kota Jambi	476.038	75,47	203,15	14.772.762
11	Kota Sungai Penuh	78.102	76,29	209,23	15.092.291
	Provinsi Sumatera Selatan	7.222.635	72,05	209,59	18.725.472
1	Kab. Lahat	341.055	69,99	209,78	13.711.559
2	Kab. Musi Banyuasin	523.025	70,54	215,02	51.123.882
3	Kab. Musi Rawas	505.940	66,77	211,20	12.999.680
4	Kab. Muara Enim	668.341	69,91	204,03	27.126.311
5	Kab. Ogan Komering Ilir	707.627	69,64	208,97	7.986.248
6	Kab. Ogan Komering Ulu	267.022	71,92	202,49	18.693.378
7	Kota Palembang	1.438.938	75,49	203,55	29.817.302
8	Kota Pagar Alam	116.486	72,16	212,60	8.803.179
9	Kota Lubuk Linggau	186.056	69,69	205,71	8.997.004
10	Kota Prabumulih	137.786	73,20	209,29	18.442.985
11	Kab. Banyuasin	818.280	69,08	216,79	12.380.852
12	Kab. Ogan Ilir	384.663	68,67	206,06	7.723.491
13	Kab. OKU Timur	581.665	68,88	205,91	7.404.497
14	Kab. OKU Selatan	331.879	70,66	203,49	6.810.430
15	Kab. Empat Lawang	213.872	67,68	205,27	7.831.873
	Provinsi Bangka Belitung	1.138.129	72,19	228,88	19.349.751
1	Kab. Bangka	275.515	71,84	223,78	14.502.289
2	Kab. Belitung	140.376	72,59	227,85	16.667.037
3	Kota Pangkal Pinang	160.451	75,15	220,52	16.078.204
4	Kab. Bangka Selatan	163.200	66,18	228,78	14.568.262
5	Kab. Bangka Tengah	146.266	70,68	226,96	18.743.028
6	Kab. Bangka Barat	160.006	69,50	227,77	31.777.828
7	Kab. Belitung Timur	92.315	71,18	229,48	20.199.254

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Provinsi Bengkulu	1.666.920	72,14	210,07	8.798.818
1	Kab. Bengkulu Selatan	142.964	71,03	211,46	7.172.362
2	Kab. Bengkulu Utara	253.052	70,63	206,27	4.086.701
3	Kab. Rejang Lebong	257.563	69,88	205,52	11.248.450
4	Kota Bengkulu	278.831	77,01	204,89	14.119.088
5	Kab. Kaur	117.821	68,63	212,85	3.876.272
6	Kab. Seluma	165.564	66,11	206,28	3.895.279
7	Kab. Mukomuko	145.530	69,62	209,46	7.147.789
8	Kab. Lebong	92.579	69,08	206,60	9.616.486
9	Kab. Kepahiang	118.910	67,00	212,10	10.674.056
10	Kab. Bengkulu Tengah	94.106	67,86	206,14	6.868.708
	Provinsi Lampung	7.491.943	70,30	203,44	10.078.380
1	Kab. Lampung Barat	401.095	68,21	209,19	5.867.912
2	Kab. Lampung Selatan	943.885	68,79	204,74	5.273.018
3	Kab. Lampung Tengah	1.195.623	69,93	205,38	9.416.793
4	Kab. Lampung Utara	571.883	69,40	206,71	10.175.247
5	Kab. Lampung Timur	957.479	69,68	209,73	8.633.910
6	Kab. Tanggamus	854.713	70,19	208,59	6.839.082
7	Kab. Tulang Bawang	801.071	69,14	210,49	12.859.645
8	Kab. Way Kanan	366.707	68,98	206,41	7.090.249
9	Kota Bandar Lampung	833.517	74,86	201,77	16.329.440
10	Kota Metro	136.273	75,71	201,09	6.478.785
11	Kab. Pesawaran	429.697	68,73	203,11	7.911.184
	Provinsi DKI Jakarta	9.223.000	77,03	217,61	74.064.912
	Provinsi Jawa Barat	41.501.564	71,12	203,88	14.722.525
1	Kab. Bandung	2.854.177	73,41	194,63	13.590.158
2	Kab. Bekasi	2.262.794	72,10	203,54	37.824.078
3	Kab. Bogor	4.086.428	70,66	200,63	14.491.338
4	Kab. Ciamis	1.541.177	70,57	199,71	9.436.935
5	Kab. Cianjur	2.180.113	68,17	194,74	7.262.663
6	Kab. Cirebon	2.124.278	67,70	198,14	7.383.835
7	Kab. Garut	2.305.761	70,52	195,82	8.920.305
8	Kab. Indramayu	1.760.082	66,78	206,94	23.453.586

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Kab. Karawang	2.034.227	69,06	199,09	21.112.550
10	Kab. Kuningan	1.088.464	70,12	201,03	6.526.949
11	Kab. Majalengka	1.199.702	69,40	195,70	6.948.348
12	Kab. Purwakarta	800.549	70,31	193,94	16.708.117
13	Kab. Subang	1.415.970	70,43	197,07	9.747.026
14	Kab. Sukabumi	2.233.441	69,66	200,29	7.261.805
15	Kab. Sumedang	1.052.207	71,68	194,66	9.851.658
16	Kab. Tasikmalaya	1.711.255	71,35	194,29	4.234.460
17	Kota Bandung	2.427.697	75,35	194,93	25.180.386
18	Kota Bekasi	2.293.770	75,73	203,86	13.301.461
19	Kota Bogor	1.028.907	75,16	199,39	10.126.694
20	Kota Cirebon	340.604	74,26	199,06	32.107.625
21	Kota Depok	1.588.910	78,36	199,92	8.164.191
22	Kota Sukabumi	328.544	74,17	202,30	11.696.504
23	Kota Cimahi	646.438	74,79	200,56	17.242.680
24	Kota Tasikmalaya	589.862	73,35	195,41	12.151.671
25	Kota Banjar	167.980	70,61	197,14	8.576.450
26	Kab. Bandung Barat	1.438.227	72,65	194,91	10.018.290
	Provinsi Banten	9.782.779	69,70	203,78	12.797.812
1	Kab. Lebak	1.258.893	67,11	204,05	5.467.797
2	Kab. Pandeglang	1.099.746	67,75	202,67	6.333.830
3	Kab. Serang	1.345.557	67,80	200,90	5.875.614
4	Kab. Tangerang	3.676.684	71,14	201,86	9.812.743
5	Kota Cilegon	349.162	74,94	200,36	52.426.984
6	Kota Tangerang	1.554.827	74,70	198,99	29.176.550
7	Kota Serang	497.910	69,43	200,70	9.046.329
	Provinsi Jawa Tengah	32.864.563	71,60	201,30	11.184.058
1	Kab. Banjarnegara	875.167	68,99	194,45	6.354.014
2	Kab. Banyumas	1.510.102	71,77	193,92	5.550.359
3	Kab. Batang	686.016	69,23	201,26	6.382.950
4	Kab. Blora	838.159	69,63	206,11	4.354.610
5	Kab. Boyolali	943.978	69,99	195,23	6.869.216
6	Kab. Brebes	1.800.958	67,08	200,14	6.224.699

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Kab. Cilacap	1.629.908	70,91	194,97	50.207.807
8	Kab. Demak	1.042.932	71,56	198,04	4.767.906
9	Kab. Grobogan	1.345.879	70,22	203,53	3.880.207
10	Kab. Jepara	1.107.973	71,94	200,77	6.834.994
11	Kab. Karanganyar	819.186	72,21	195,49	9.452.804
12	Kab. Kebumen	1.222.542	70,19	197,78	4.362.986
13	Kab. Kendal	965.808	69,40	203,41	9.155.245
14	Kab. Klaten	1.136.829	72,93	198,33	8.377.318
15	Kab. Kudus	797.617	72,02	202,03	34.515.486
16	Kab. Magelang	1.180.217	71,43	197,88	5.626.151
17	Kab. Pati	1.175.232	72,26	200,81	6.576.636
18	Kab. Pekalongan	858.967	70,31	197,05	6.885.460
19	Kab. Pemasang	1.391.284	68,38	201,16	4.781.696
20	Kab. Purbalingga	834.164	70,89	194,84	5.366.410
21	Kab. Purworejo	724.973	71,29	194,43	7.376.756
22	Kab. Rembang	578.232	71,12	203,15	7.060.381
23	Kab. Semarang	921.865	73,34	198,02	10.189.062
24	Kab. Sragen	862.910	69,57	193,44	6.009.134
25	Kab. Sukoharjo	833.575	73,01	194,88	9.726.970
26	Kab. Tegal	1.420.532	69,54	198,46	4.525.895
27	Kab. Temanggung	714.411	73,43	200,11	5.830.010
28	Kab. Wonogiri	985.024	70,47	200,89	5.361.258
29	Kab. Wonosobo	760.819	69,55	196,48	4.397.333
30	Kota Magelang	137.055	76,09	198,73	12.405.076
31	Kota Pekalongan	277.065	73,49	197,18	11.715.621
32	Kota Salatiga	182.226	75,81	199,44	8.639.248
33	Kota Semarang	1.533.686	76,54	192,90	22.856.271
34	Kota Surakarta	528.202	77,16	195,96	15.110.647
35	Kota Tegal	241.070	73,20	200,05	8.894.789
	Provinsi DI Yogyakarta	3.501.869	74,88	203,15	10.985.184
1	Kab. Bantul	922.566	73,38	199,11	8.153.311
2	Kab. Gunung Kidul	688.153	70,00	206,59	8.011.695
3	Kab. Kulon Progo	374.921	73,26	200,33	8.106.465

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	Kab. Sleman	1.053.566	77,24	199,11	11.012.162
5	Kota Yogyakarta	462.663	78,95	197,43	21.463.101
	Provinsi Jawa Timur	37.286.246	70,38	198,73	16.756.563
1	Kab. Bangkalan	973.681	63,40	203,40	6.339.616
2	Kab. Banyuwangi	1.535.701	67,80	193,64	11.839.038
3	Kab. Blitar	1.070.446	72,74	191,54	9.422.040
4	Kab. Bojonegoro	1.270.876	65,83	189,90	10.686.041
5	Kab. Bondowoso	708.905	61,26	191,56	5.863.871
6	Kab. Gresik	1.215.603	73,49	190,91	23.691.901
7	Kab. Jember	2.327.957	63,71	191,46	8.277.226
8	Kab. Jombang	1.301.459	71,85	189,92	8.781.565
9	Kab. Kediri	1.451.861	70,85	192,07	7.766.432
10	Kab. Lamongan	1.189.615	68,33	189,83	6.593.662
11	Kab. Lumajang	1.028.103	66,65	195,44	10.674.074
12	Kab. Madiun	642.638	68,63	191,15	7.689.024
13	Kab. Magetan	626.092	71,79	195,30	9.415.671
14	Kab. Malang	2.425.311	69,55	191,97	10.368.332
15	Kab. Mojokerto	1.013.988	72,51	190,22	11.087.244
16	Kab. Nganjuk	1.002.530	69,73	190,58	8.395.559
17	Kab. Ngawi	836.767	68,02	192,03	6.926.866
18	Kab. Pacitan	558.644	70,91	198,66	4.726.515
19	Kab. Pamekasan	851.690	63,13	208,36	4.553.890
20	Kab. Pasuruan	1.452.629	66,02	190,64	8.551.259
21	Kab. Ponorogo	899.074	69,07	195,68	6.479.869
22	Kab. Probolinggo	1.044.237	61,44	190,42	11.450.917
23	Kab. Sampang	919.548	57,66	206,97	4.834.888
24	Kab. Sidoarjo	1.802.948	75,35	195,68	25.095.472
25	Kab. Situbondo	624.888	63,06	191,12	10.668.077
26	Kab. Sumenep	1.017.147	64,24	213,97	9.197.403
27	Kab. Trenggalek	675.765	72,15	199,40	5.126.990
28	Kab. Tuban	1.080.956	67,02	191,73	11.252.262
29	Kab. Tulungagung	992.048	72,45	193,40	13.124.066
30	Kota Blitar	133.408	76,60	191,67	9.573.528

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
31	Kota Kediri	272.610	75,11	191,79	179.240.375
32	Kota Madiun	179.391	75,89	191,33	12.479.250
33	Kota Malang	820.857	76,19	193,69	29.868.951
34	Kota Mojokerto	113.327	76,11	189,49	19.440.080
35	Kota Pasuruan	174.173	72,60	190,73	12.086.976
36	Kota Probolinggo	230.464	73,29	189,59	16.624.884
37	Kota Surabaya	2.631.305	76,36	189,17	56.953.656
38	Kota Batu	189.604	73,33	190,06	12.518.208
	Provinsi Kalimantan Barat	4.319.142	68,17	230,92	11.394.255
1	Kab. Bengkayang	209.927	66,81	229,82	9.396.527
2	Kab. Landak	331.171	66,74	221,31	7.465.592
3	Kab. Kapuas Hulu	222.893	69,41	257,37	8.801.660
4	Kab. Ketapang	417.974	66,84	219,96	11.892.451
5	Kab. Pontianak	220.231	67,90	222,58	2.645.665
6	Kab. Sambas	496.464	63,73	231,23	9.554.534
7	Kab. Sanggau	395.061	67,86	229,79	11.043.154
8	Kab. Sintang	373.380	67,44	237,91	8.502.524
9	Kota Pontianak	527.102	72,08	220,69	18.260.409
10	Kota Singkawang	177.701	68,02	221,46	11.568.122
11	Kab. Sekadau	180.649	66,13	235,04	5.626.878
12	Kab. Melawi	171.362	67,91	241,02	4.714.035
13	Kab. Kayong Utara	92.382	64,69	219,89	7.362.110
14	Kab. Kubu Raya	502.845	66,31	220,36	14.331.093
	Provinsi Kalimantan Tengah	2.085.819	73,88	238,53	15.724.846
1	Kab. Barito Selatan	129.079	72,96	242,97	13.586.699
2	Kab. Barito Utara	118.153	74,57	229,20	16.012.398
3	Kab. Kapuas	345.834	72,89	229,24	11.687.049
4	Kab. Kotawaringin Barat	226.518	72,86	231,56	16.449.253
5	Kab. Kotawaringin Timur	328.516	73,36	229,94	17.734.848
6	Kota Palangkaraya	192.209	77,90	216,27	14.429.592
7	Kab. Barito Timur	88.704	72,17	235,93	13.184.053
8	Kab. Murung Raya	90.702	72,18	244,57	18.246.811
9	Kab. Pulang Pisau	121.882	70,63	232,15	8.694.902

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Kab. Gunung Mas	93.322	72,85	243,16	10.888.689
11	Kab. Lamandau	59.520	71,98	244,06	14.904.643
12	Kab. Sukamara	39.058	71,00	245,65	22.449.802
13	Kab. Katingan	138.453	72,06	225,21	16.920.769
14	Kab. Seruyan	113.869	72,00	245,49	17.287.755
	Provinsi Kalimantan Selatan	3.496.125	68,72	217,51	13.205.830
1	Kab. Banjar	498.088	70,16	210,21	10.896.291
2	Kab. Barito Kuala	275.145	66,09	221,35	10.488.341
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	209.669	70,11	213,34	8.118.468
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	246.120	70,00	215,17	6.589.370
5	Kab. Hulu Sungai Utara	218.109	67,86	218,61	5.165.905
6	Kab. Kota Baru	281.120	70,52	223,10	27.398.287
7	Kab. Tabalong	195.114	68,98	222,38	19.575.778
8	Kab. Tanah Laut	274.526	70,40	211,23	11.570.779
9	Kab. Tapin	154.005	69,79	211,08	10.883.862
10	Kota Banjar Baru	171.496	74,09	211,93	8.923.104
11	Kota Banjarmasin	638.902	72,85	207,27	12.021.905
12	Kab. Balangan	102.696	65,60	216,59	19.677.230
13	Kab. Tanah Bumbu	231.135	68,80	222,56	19.497.742
	Provinsi Kalimantan Timur	3.164.798	74,52	239,13	101.859.021
1	Kab. Berau	174.070	72,75	236,46	28.654.451
2	Kab. Bulungan	104.771	74,30	240,28	19.067.104
3	Kab. Kutai Kartanegara	536.744	72,03	234,14	188.787.248
4	Kab. Kutai Barat	161.881	72,16	239,77	31.135.103
5	Kab. Kutai Timur	195.466	70,84	245,60	127.515.146
6	Kab. Malinau	63.218	71,78	247,73	20.950.718
7	Kab. Nunukan	141.476	72,86	246,24	23.415.834
8	Kab. Paser	184.578	73,46	230,64	40.405.493
9	Kota Balikpapan	523.368	77,31	228,93	79.735.174
10	Kota Bontang	137.349	76,08	239,07	570.810.985
11	Kota Samarinda	607.675	76,12	224,15	30.746.712
12	Kota Tarakan	193.143	75,92	244,56	28.448.143
13	Kab. Penajam Paser Utara	127.674	72,69	237,52	19.294.896

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14	Kab. Tana Tidung	13.385	70,68	240,83	25.345.921
	Provinsi Sulawesi Utara	2.228.856	75,16	234,29	12.609.979
1	Kab. Bolaang Mongondow	196.263	72,11	213,02	4.939.566
2	Kab. Minahasa	300.226	74,86	213,15	10.981.673
3	Kab. Sangihe	130.449	74,67	294,80	8.053.875
4	Kota Bitung	180.618	74,61	211,22	17.590.683
5	Kota Manado	434.845	77,28	211,92	20.609.132
6	Kab. Kepulauan Talaud	74.997	74,34	314,25	8.110.856
7	Kab. Minahasa Selatan	182.818	73,79	215,70	11.038.086
8	Kota Tomohon	83.718	75,65	212,65	13.027.849
9	Kab. Minahasa Utara	176.480	75,33	212,24	11.659.121
10	Kota Kotamobagu	119.105	74,46	216,19	6.175.323
11	Kab. Bolaang Mongondow	80.508	71,84	218,96	6.951.908
12	Kab. Kepulauan Siau	61.781	72,58	295,07	6.894.603
13	Kab. Minahasa Tenggara	95.525	71,87	224,33	13.812.845
14	Kab. Bolmong Selatan	52.122	69,65	213,12	6.828.555
15	Kab. Bolmong Timur	59.401	71,49	212,77	8.424.969
	Provinsi Gorontalo	983.952	69,29	219,01	6.068.441
1	Kab. Boalemo	128.540	67,75	221,87	4.803.553
2	Kab. Gorontalo	340.730	68,94	216,58	4.594.937
3	Kota Gorontalo	170.209	72,12	214,42	7.038.213
4	Kab. Pohuwato	116.203	68,93	221,84	7.755.359
5	Kab. Bone Bolango	131.781	70,50	214,16	5.517.312
6	Kab. Gorontalo Utara	96.489	68,14	216,43	3.914.893
	Provinsi Sulawesi Tengah	2.480.264	70,09	217,70	11.545.199
1	Kab. Banggai	296.897	70,21	215,14	9.496.877
2	Kab. Banggai Kepulauan	156.912	66,59	241,40	7.275.724
3	Kab. Buol	118.892	68,84	221,29	8.389.241
4	Kab. Toli-Toli	200.543	67,62	219,01	10.126.943
5	Kab. Donggala	272.389	68,73	206,65	5.902.088
6	Kab. Morowali	179.649	69,75	219,85	15.020.182
7	Kab. Poso	170.016	68,98	215,77	10.481.889
8	Kota Palu	313.179	75,67	205,19	14.928.268

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Kab. Parigi Moutong	377.404	67,81	210,45	12.861.119
10	Kab. Tojo Una Una	189.912	67,81	215,15	4.385.707
11	Kab. Sigi	204.471	66,90	206,69	11.981.597
	Provinsi Sulawesi Selatan	7.908.519	70,22	209,38	10.908.767
1	Kab. Bantaeng	174.176	68,87	202,49	7.205.599
2	Kab. Barru	162.985	69,54	201,59	7.578.582
3	Kab. Bone	711.748	68,96	206,72	7.579.164
4	Kab. Bulukumba	394.746	69,87	206,47	6.941.865
5	Kab. Enrekang	190.576	73,76	208,70	7.163.352
6	Kab. Gowa	617.317	69,37	201,15	5.732.787
7	Kab. Jeneponto	334.175	64,04	202,23	4.693.927
8	Kab. Luwu	328.180	72,96	207,02	8.316.081
9	Kab. Luwu Utara	321.979	73,15	215,96	7.423.320
10	Kab. Maros	306.687	69,85	201,16	5.892.627
11	Kab. Pangkajene	298.701	68,30	205,25	12.964.162
12	Kab. Pinrang	351.042	71,91	202,08	10.769.886
13	Kab. Kepulauan Selayar	121.749	68,23	225,64	6.437.681
14	Kab. Sidenreng Rappang	252.483	71,74	205,39	9.596.593
15	Kab. Sinjai	228.304	68,74	207,73	8.754.447
16	Kab. Soppeng	230.744	70,76	205,78	8.487.215
17	Kab. Takalar	257.974	67,49	202,40	6.077.413
18	Kab. Tana Toraja	240.249	70,81	209,61	2.420.840
19	Kab. Wajo	381.066	68,72	206,19	10.371.241
20	Kota Pare-pare	118.842	76,97	201,64	11.044.881
21	Kota Makassar	1.271.870	77,92	200,87	20.793.760
22	Kota Palopo	146.482	75,80	207,59	9.823.730
23	Kab. Luwu Timur	237.354	71,73	216,78	30.152.341
24	Kab. Toraja Utara	229.090	68,41	209,73	4.973.193
	Provinsi Sulawesi Barat	1.047.739	68,55	217,36	7.534.953
1	Kab. Majene	133.296	70,28	214,85	7.381.805
2	Kab. Mamuju	315.053	68,50	218,58	8.170.320
3	Kab. Polewali Mandar	362.106	65,91	213,87	6.066.383
4	Kab. Mamasa	126.134	69,79	226,02	6.510.247

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Kab. Mamuju Utara	111.150	69,27	219,85	9.369.734
	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.118.300	69,00	220,90	10.686.344
1	Kab. Buton	284.627	67,82	224,43	5.279.942
2	Kab. Konawe	233.080	68,72	213,05	8.559.603
3	Kab. Kolaka	287.246	70,06	211,63	18.063.100
4	Kab. Muna	248.461	66,49	221,43	8.470.922
5	Kota Kendari	260.867	75,09	209,74	14.314.190
6	Kota Bau-bau	130.862	72,14	226,24	12.205.043
7	Kab. Konawe Selatan	244.046	68,86	216,45	7.964.239
8	Kab. Bombana	111.481	66,05	216,67	7.993.784
9	Kab. Wakatobi	103.423	66,03	229,91	5.597.860
10	Kab. Kolaka Utara	118.386	67,91	212,27	13.403.223
11	Kab. Konawe Utara	46.635	67,43	223,91	16.728.295
12	Kab. Buton Utara	49.186	67,16	227,31	13.342.855
	Provinsi Bali	3.551.009	70,98	205,31	14.198.733
1	Kab. Badung	424.228	74,12	204,24	25.176.699
2	Kab. Bangli	219.326	69,72	197,81	8.492.145
3	Kab. Buleleng	632.002	69,67	209,34	9.351.998
4	Kab. Gianyar	441.303	72,00	195,28	12.769.227
5	Kab. Jembrana	258.489	72,02	207,74	11.282.673
6	Kab. Karangasem	386.998	65,46	203,26	8.272.787
7	Kab. Klungkung	168.030	69,66	205,99	12.821.878
8	Kab. Tabanan	415.262	73,73	203,01	9.802.084
9	Kota Denpasar	605.371	77,18	195,10	15.702.562
	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4.434.012	64,12	210,20	8.080.579
1	Kab. Bima	420.207	64,39	204,80	5.728.829
2	Kab. Dompu	217.479	64,40	209,27	7.283.217
3	Kab. Lombok Barat	611.704	60,53	203,60	3.812.760
4	Kab. Lombok Tengah	856.675	59,66	210,42	4.180.004
5	Kab. Lombok Timur	1.080.237	61,77	205,70	4.552.100
6	Kab. Sumbawa	420.750	65,36	212,90	7.286.037
7	Kota Mataram	375.506	71,41	203,51	10.005.267

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	Kota Bima	132.292	67,52	204,42	5.942.553
9	Kab. Sumbawa Barat	101.089	65,64	212,96	111.487.418
10	Kab. Lombok Utara	218.073	57,79	203,03	5.373.921
	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4.619.655	66,15	233,67	4.768.486
1	Kab. Alor	181.913	67,82	238,92	3.673.652
2	Kab. Belu	465.933	63,41	224,79	3.339.363
3	Kab. Ende	238.195	66,14	230,85	5.729.718
4	Kab. Flores Timur	238.166	67,34	237,33	4.765.466
5	Kab. Kupang	394.173	65,02	224,43	5.012.370
6	Kab. Lembata	108.152	66,61	238,13	2.974.050
7	Kab. Manggarai	274.984	66,21	234,25	1.838.254
8	Kab. Ngada	135.294	68,56	235,01	5.542.366
9	Kab. Sikka	279.464	66,69	228,44	4.782.954
10	Kab. Sumba Barat	108.644	62,17	228,79	5.589.073
11	Kab. Sumba Timur	233.568	60,80	229,09	5.146.158
12	Kab. Timor Tengah Selatan	419.984	64,83	224,17	4.225.757
13	Kab. Timor Tengah Utara	214.842	66,53	224,37	3.384.534
14	Kota Kupang	299.518	76,58	222,43	12.267.633
15	Kab. Rote Ndao	115.874	65,29	227,48	4.055.499
16	Kab. Manggarai Barat	211.614	64,44	230,36	4.006.393
17	Kab. Nagekeo	126.761	65,73	237,21	4.530.475
18	Kab. Sumba Barat Daya	266.408	59,87	228,68	2.779.026
19	Kab. Sumba Tengah	61.370	59,01	237,54	3.745.618
20	Kab. Manggarai Timur	244.798	64,58	233,91	2.823.552
	Provinsi Maluku	1.339.503	70,38	266,25	4.747.086
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	88.903	67,58	271,86	2.815.079
2	Kab. Maluku Tengah	330.964	69,63	253,26	2.826.227
3	Kab. Maluku Tenggara	96.862	71,45	271,27	2.397.467
4	Kab. Pulau Buru	86.306	68,03	254,19	1.989.701
5	Kota Ambon	274.495	77,86	250,05	10.068.696
6	Kab. Seram Bagian Barat	143.595	68,67	254,52	3.341.891
7	Kab. Seram Bagian Timur	83.693	67,06	257,50	2.736.435
8	Kab. Kepulauan Aru	72.815	69,36	270,96	4.567.107

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Kota Tual	45.338	75,90	270,76	5.038.630
10	Kab. Buru Selatan	48.719	67,71	257,98	4.027.685
11	Kab. Maluku Barat Daya	67.813	65,96	271,69	4.355.774
	Provinsi Maluku Utara	974.990	68,18	259,34	4.018.726
1	Kab. Halmahera Tengah	34.821	68,18	268,82	8.289.312
2	Kab. Halmahera Barat	97.971	66,14	252,97	2.890.801
3	Kota Ternate	172.604	75,66	251,99	4.087.171
4	Kab. Halmahera Timur	69.912	67,06	269,64	5.150.811
5	Kota Tidore Kepulauan	82.302	68,90	252,46	4.068.384
6	Kab. Kepulauan Sula	130.290	67,04	253,17	3.400.067
7	Kab. Halmahera Selatan	192.312	67,25	253,60	3.667.568
8	Kab. Halmahera Utara	194.778	67,18	252,55	3.409.611
	Provinsi Papua	2.097.482	64,00	492,08	26.614.722
1	Kab. Biak Numfor	111.224	68,99	337,47	11.034.510
2	Kab. Jayapura	101.128	71,02	340,56	13.382.748
3	Kab. Jayawijaya	100.867	54,72	560,10	8.071.508
4	Kab. Merauke	176.466	64,44	480,05	15.573.378
5	Kab. Mimika	148.019	67,99	401,69	240.038.019
6	Kab. Nabire	104.531	66,10	320,22	13.079.137
7	Kab. Paniai	124.780	59,17	590,76	5.410.554
8	Kab. Puncak Jaya	75.314	67,78	805,68	5.472.630
9	Kab. Kepulauan Yapen	79.390	68,68	320,34	7.603.698
10	Kota Jayapura	224.615	74,56	314,43	22.718.182
11	Kab. Sarmi	23.746	66,35	397,19	21.650.129
12	Kab. Keerom	46.282	68,55	374,43	12.911.877
13	Kab. Yahukimo	154.351	48,85	543,73	1.316.476
14	Kab. Pegunungan Bintang	98.234	47,94	760,28	3.521.053
15	Kab. Tolikara	50.531	50,85	602,59	5.149.321
16	Kab. Boven Digoel	35.581	49,20	415,05	31.680.245
17	Kab. Mappi	71.877	49,59	440,29	7.578.099
18	Kab. Asmat	69.214	50,27	538,91	6.840.823
19	Kab. Waropen	15.720	62,46	389,75	11.659.501
20	Kab. Supiori	12.660	67,55	335,97	26.390.405

Tabel A.2 (lanjutan)

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2009	IPM 2008	IKK 2009	PDRB per Kapita 2008 dengan Migas (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21	Kab. Mamberamo Raya	20.340	57,78	396,72	6.276.179
22	Kab. Mamberamo Tengah	24.382	47,90	572,21	3.648.287
23	Kab. Yalimo	18.806	47,75	565,53	3.697.088
24	Kab. Lanny Jaya	59.015	48,12	570,65	2.896.815
25	Kab. Nduga	28.699	47,45	565,60	2.276.559
26	Kab. Puncak	50.115	48,43	831,15	5.423.977
27	Kab. Dogiyai	71.595	48,60	323,48	5.292.713
	Provinsi Papua Barat	743.860	67,95	330,13	17.085.281
1	Kab. Sorong	99.712	67,82	317,02	43.600.224
2	Kab. Manokwari	176.847	65,46	319,66	11.720.455
3	Kab. Fak Fak	68.116	70,24	338,84	15.569.973
4	Kota Sorong	172.558	76,52	275,33	12.692.613
5	Kab. Sorong Selatan	62.583	65,77	336,94	5.876.898
6	Kab. Raja Ampat	41.860	63,57	356,30	20.725.773
7	Kab. Teluk Bintuni	55.805	65,29	342,64	16.309.780
8	Kab. Teluk Wondama	23.569	64,79	322,17	11.688.969
9	Kab. Kaimana	42.810	69,27	330,56	14.307.931

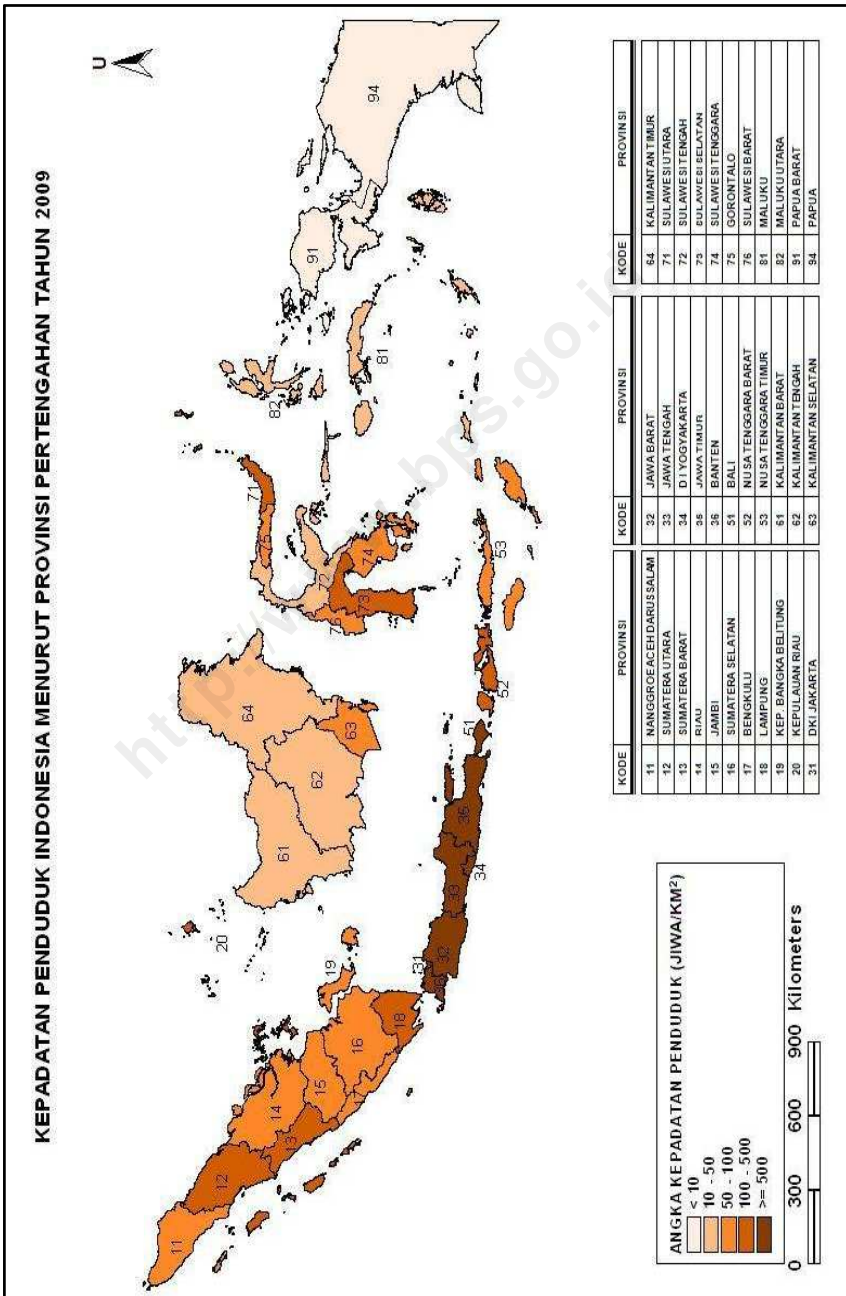


Lampiran

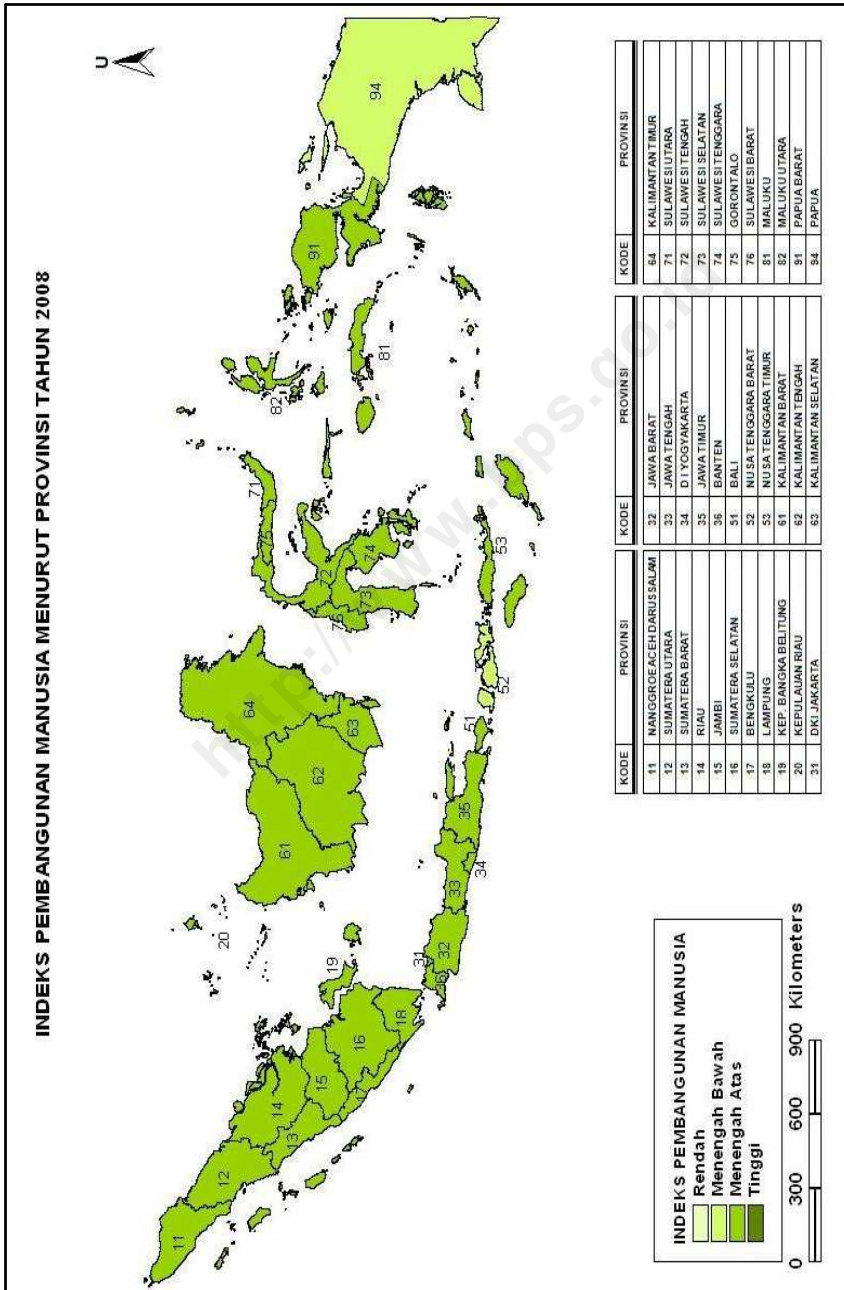
<http://www.bps.go.id>



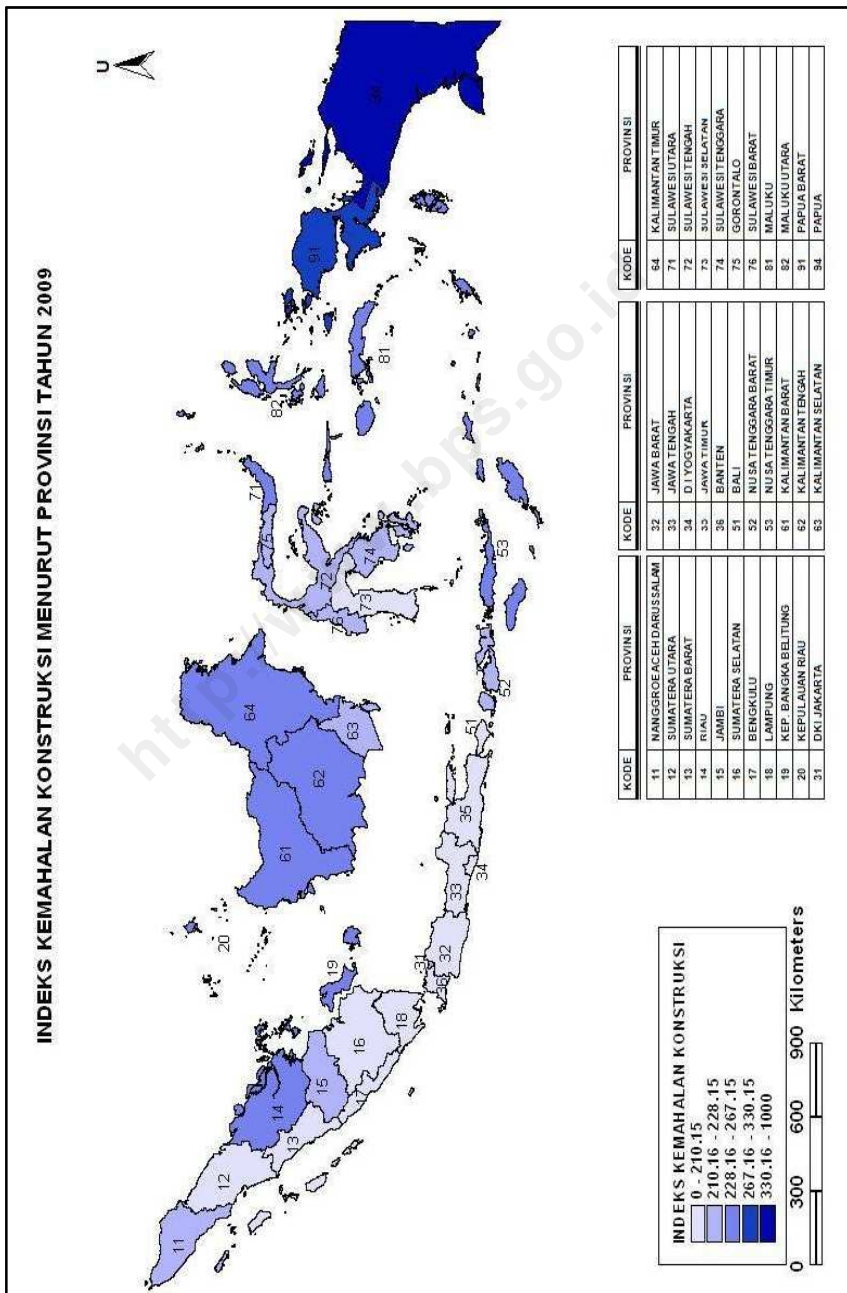
Lampiran 1 : Peta Kepadatan Penduduk Indonesia Menurut Provinsi Pertengahan Tahun 2009



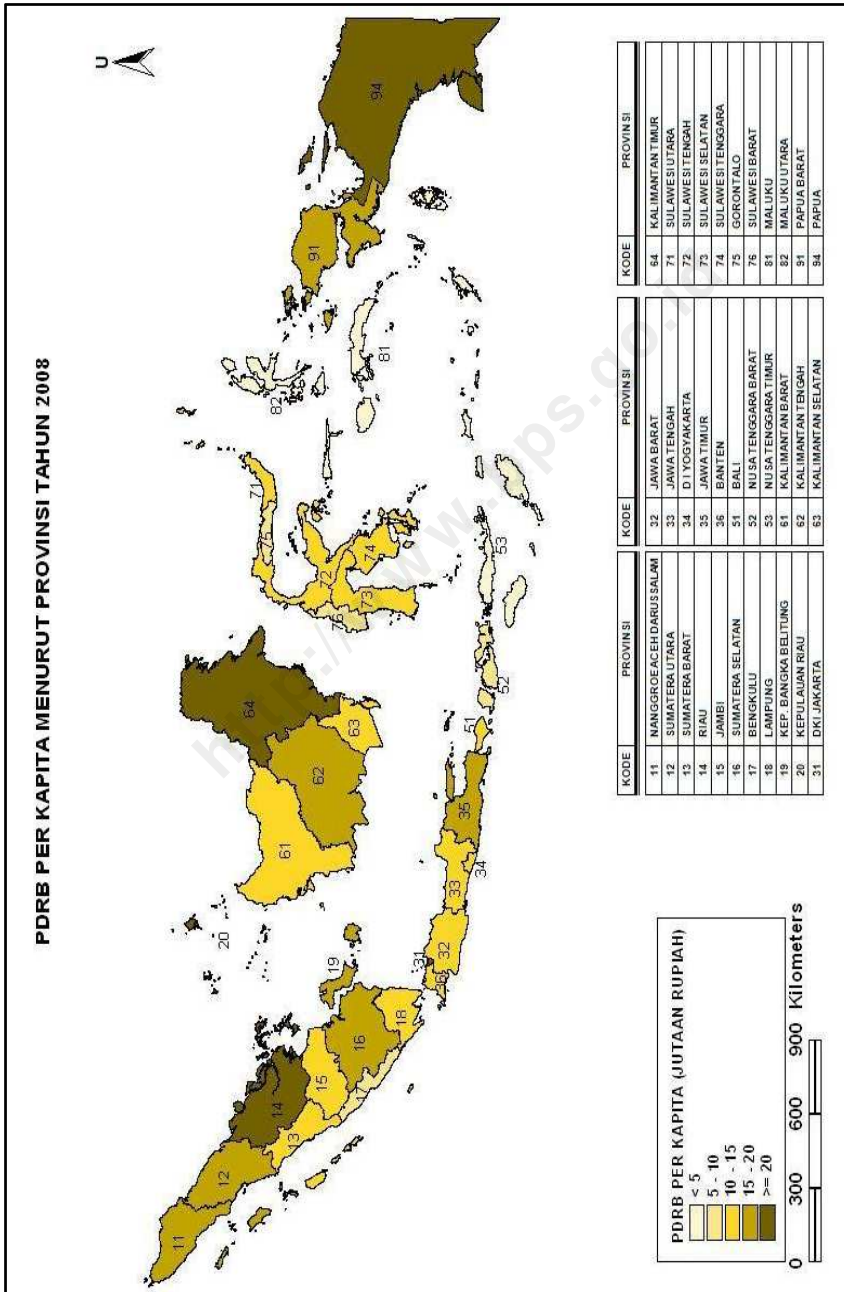
Lampiran 2 : Peta Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi Tahun 2008



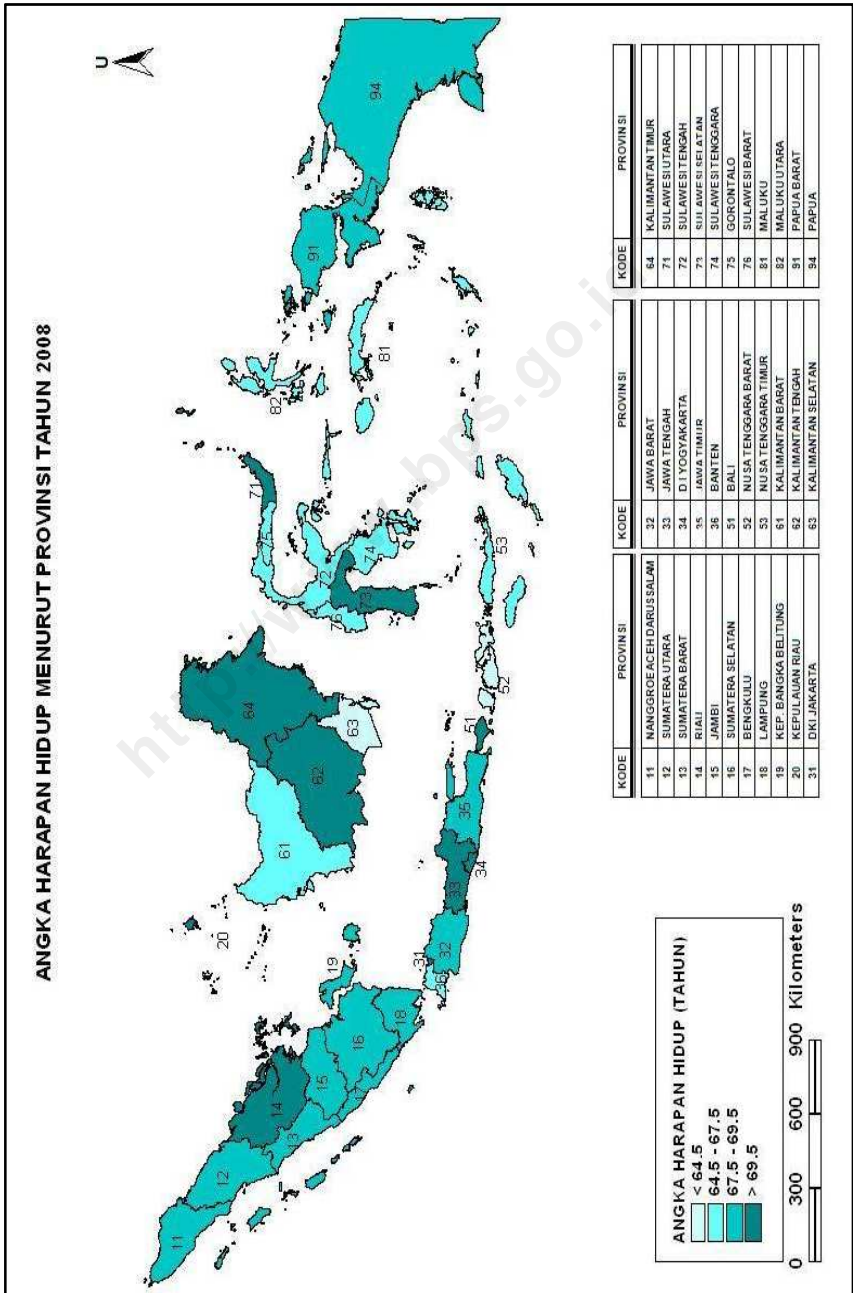
Lampiran 3 : Peta Indeks Kemahalan Konstruksi Menurut Provinsi Tahun 2009



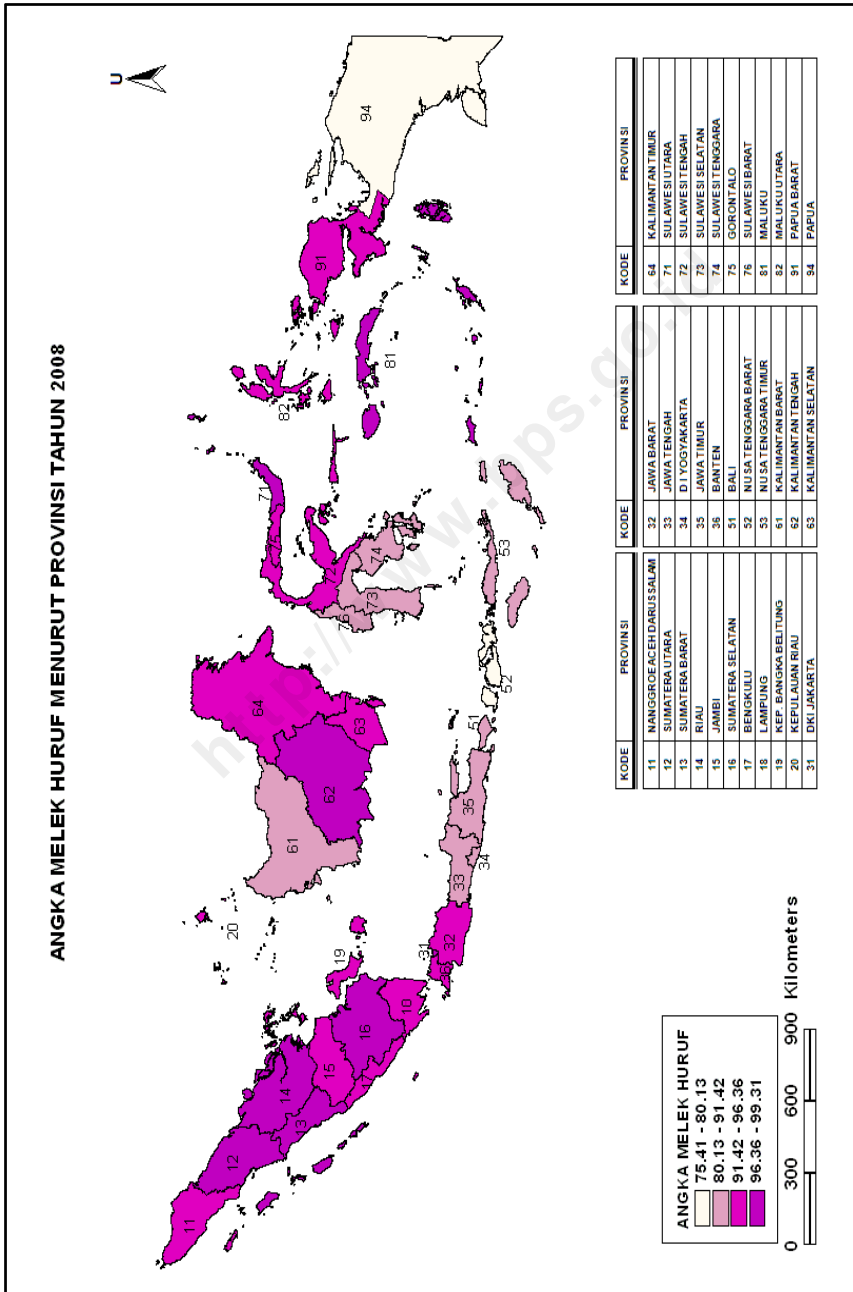
Lampiran 4 : Peta PDRB Per Kapita Menurut Provinsi Tahun 2008



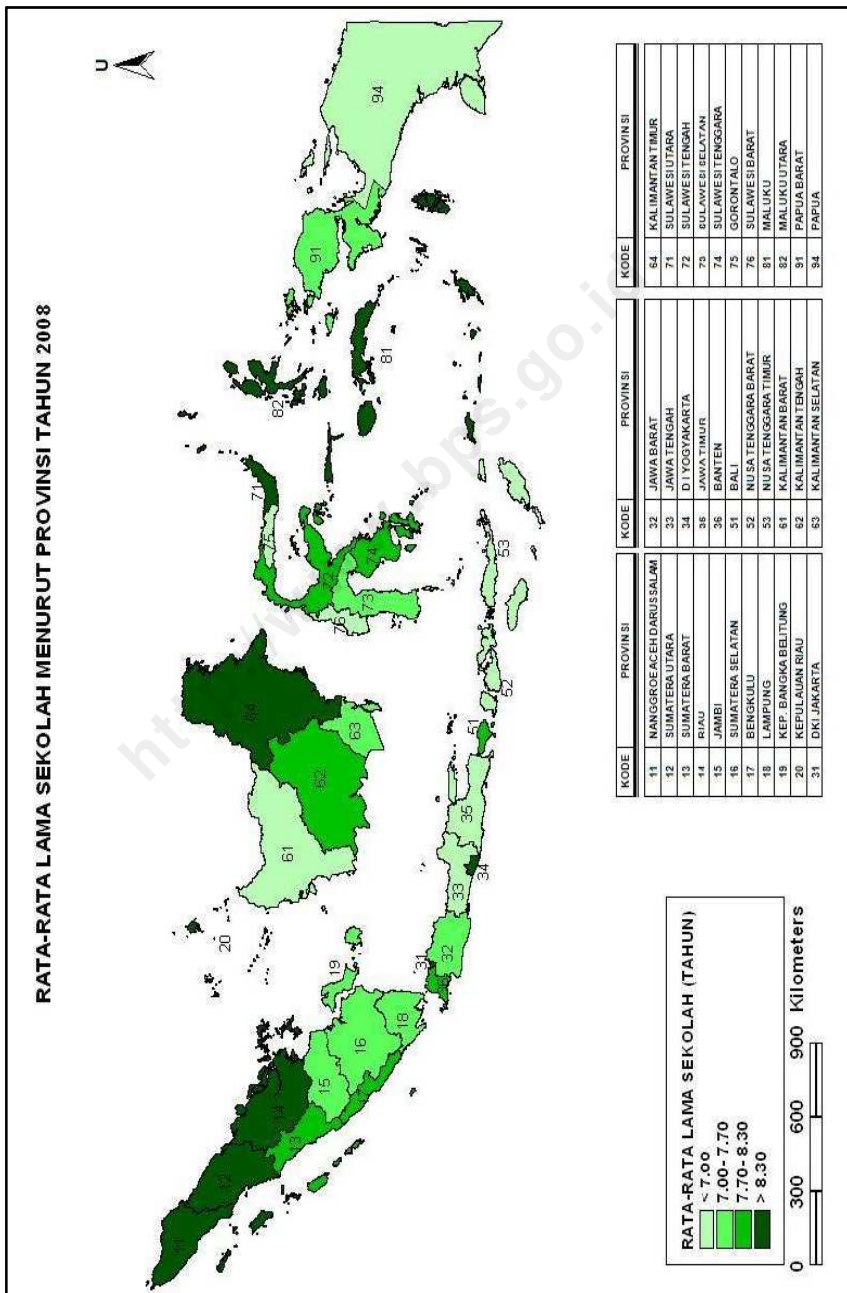
Lampiran 5 : Peta Angka Harapan Hidup Menurut Provinsi Tahun 2008



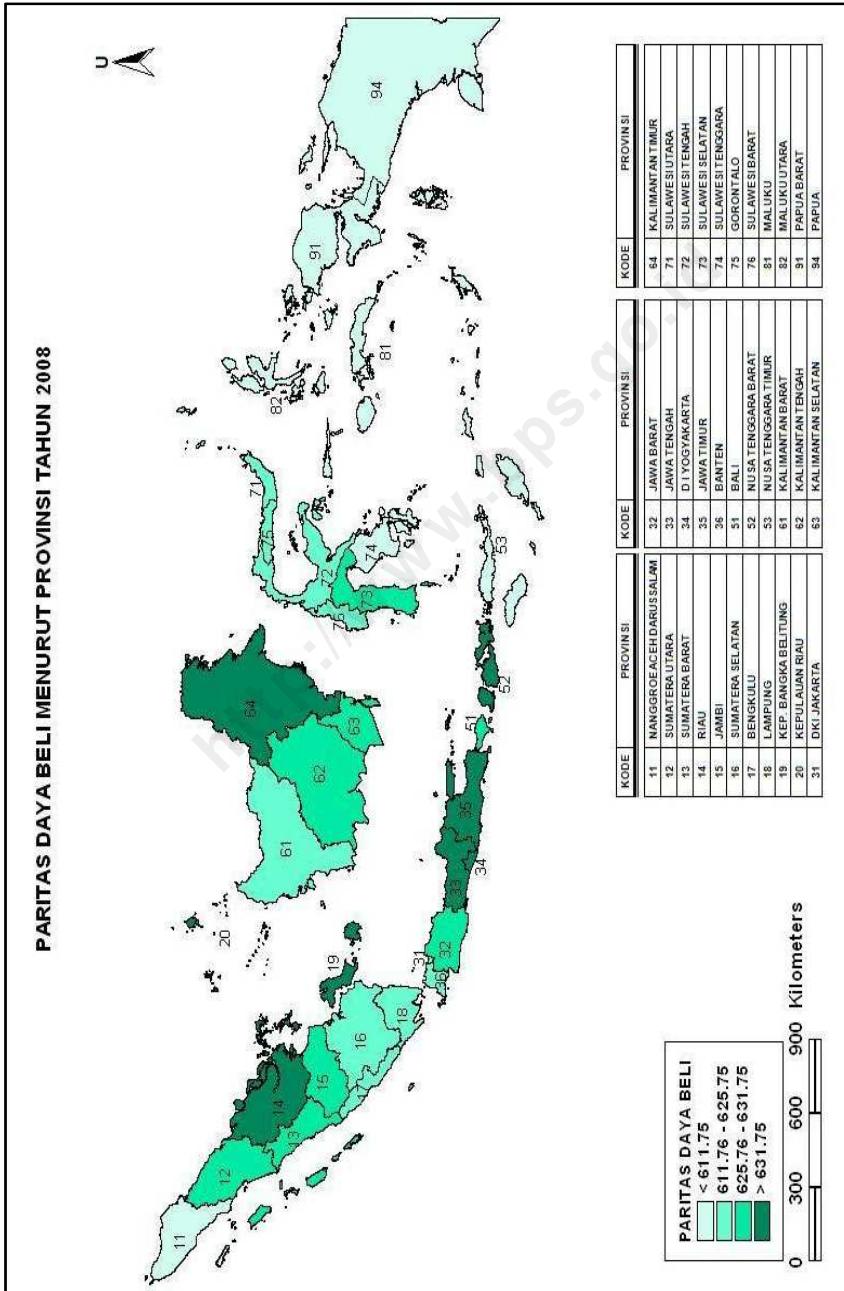
Lampiran 6 : Peta Angka Melek Huruf Menurut Provinsi Tahun 2008



Lampiran 7 : Peta Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2008



Lampiran 8 : Peta Paritas Daya Beli Menurut Provinsi Tahun 2008



Lampiran 9 : Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sumatera

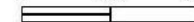


■ IPM
■ IKK

ANGKA KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²)

< 10
 10 - 50
 50 - 100
 100 - 500
 ≥ 500

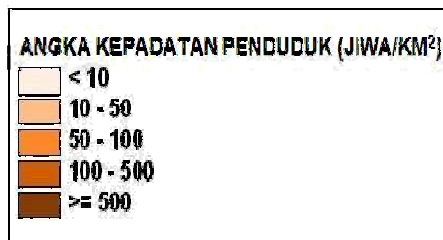
0 200 400 Kilometers



Lampiran 10 : Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Jawa

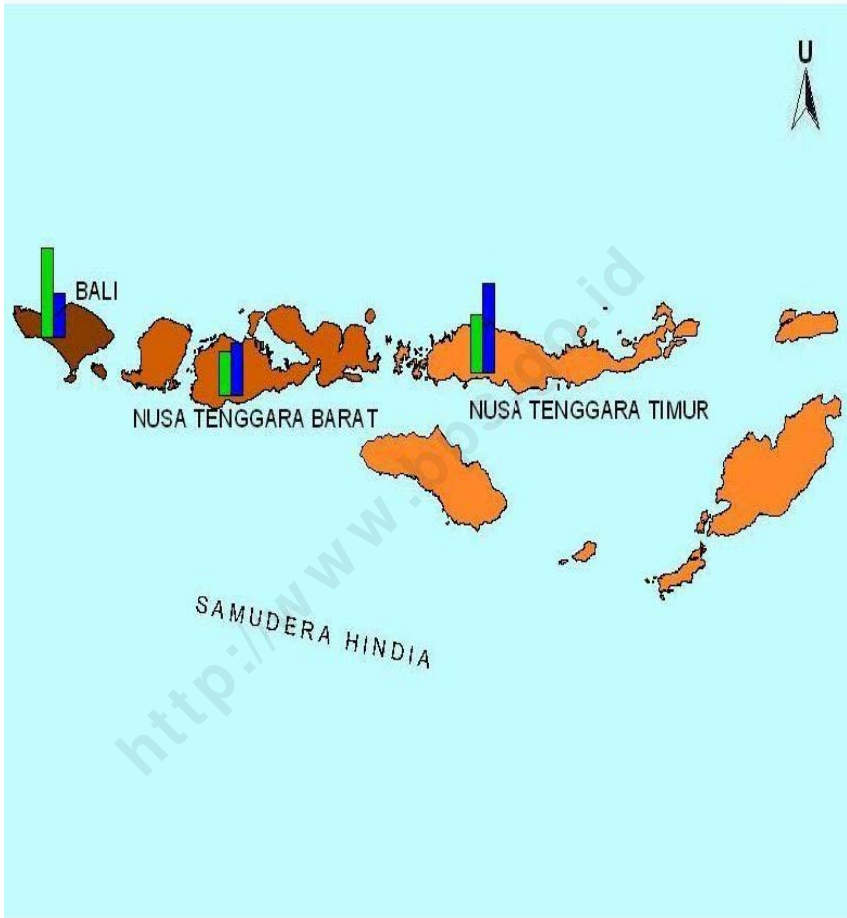


■ IPM
■ IKK



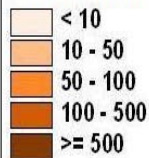
0 200 400 Kilometers

Lampiran 11 : Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

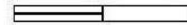


■ IPM
■ IKK

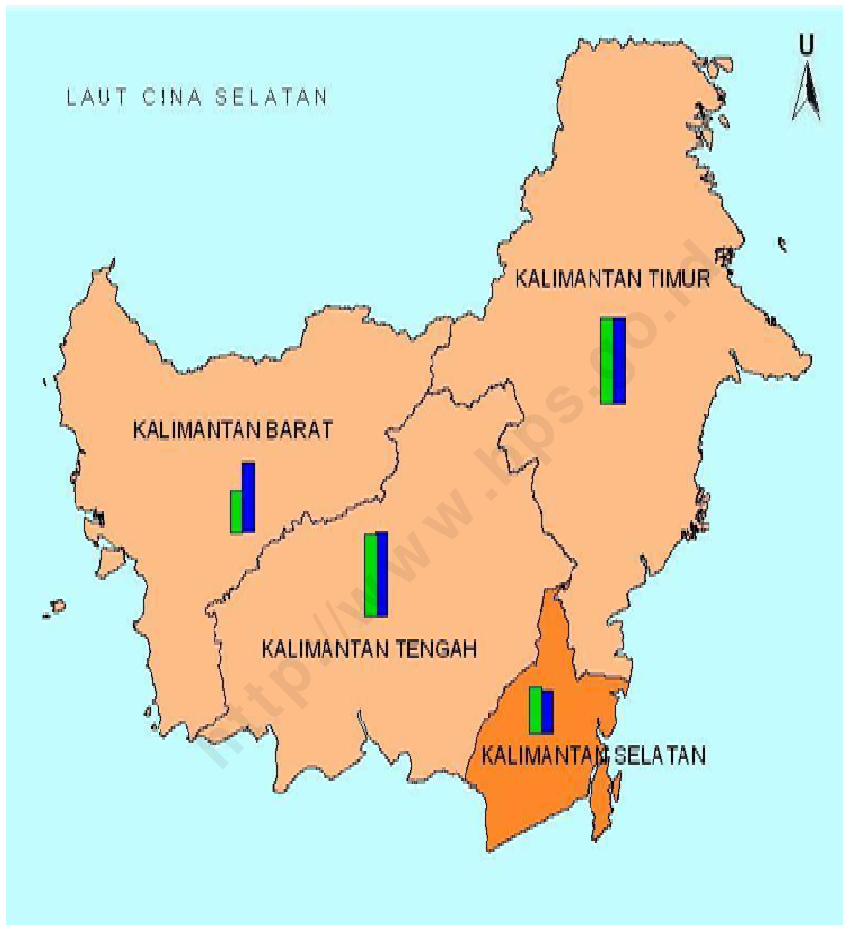
ANGKA KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²)



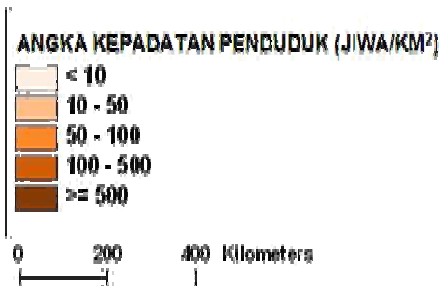
0 200 400 Kilometers



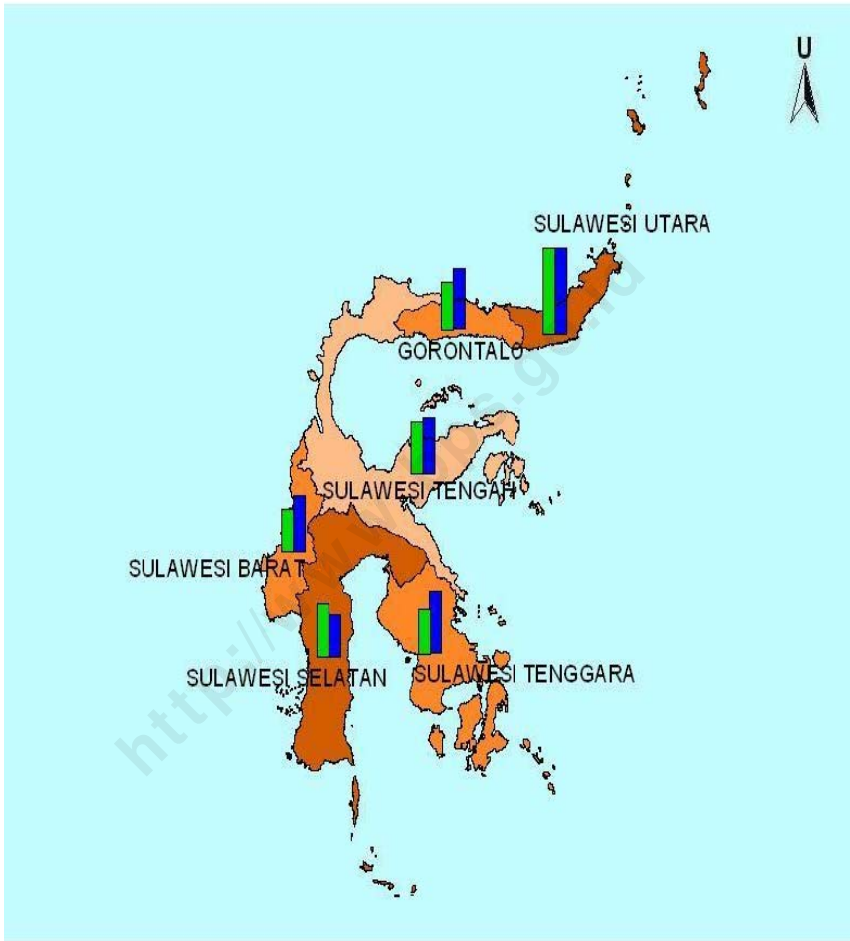
Lampiran 12 : Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan



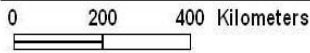
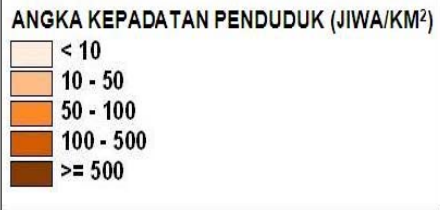
■ IPM
■ IKK



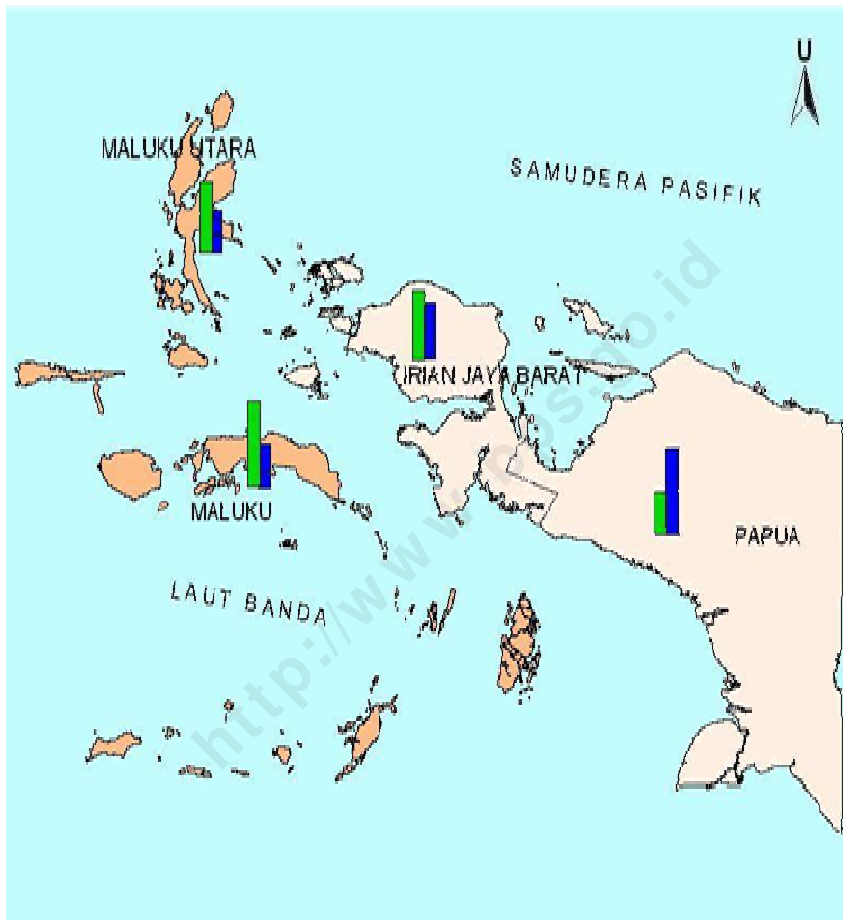
Lampiran 13 : Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi



■ IPM
■ IKK



Lampiran 14 : Peta IPM, IKK, dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua



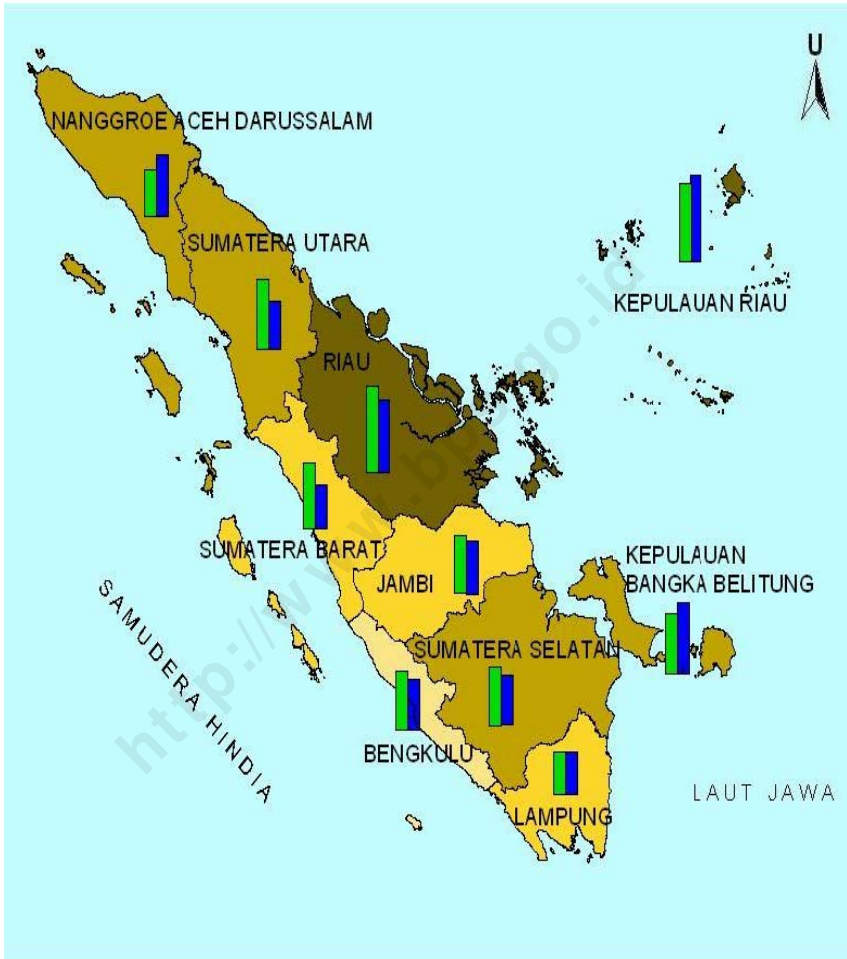
■ IPM
■ IKK

ANGKA KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM²)

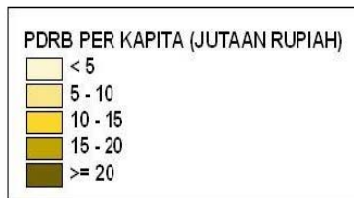
< 10
 10 - 50
 50 - 100
 100 - 500
 ≥ 500

0 200 400 Kilometers

Lampiran 15 : Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Sumatera



■ IPM
■ IKK

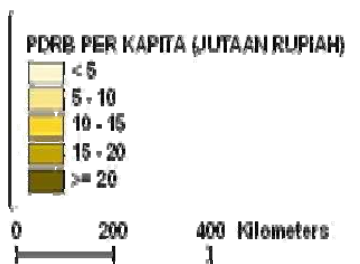


0 200 400 Kilometers

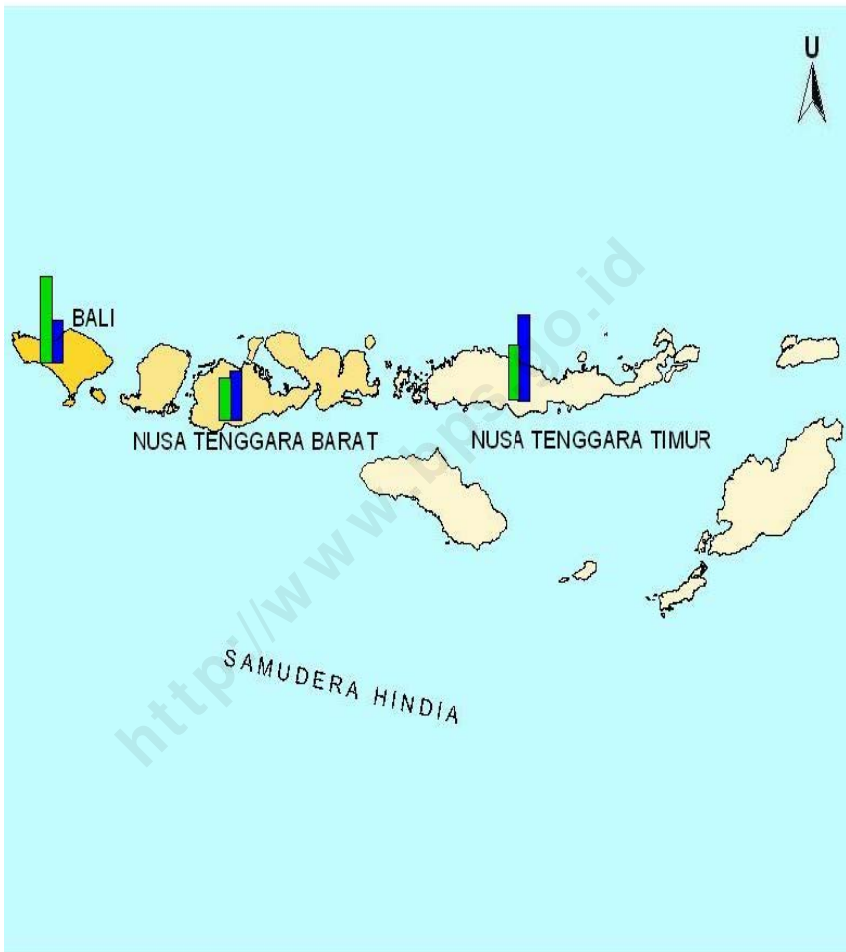
Lampiran 16 : Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Jawa



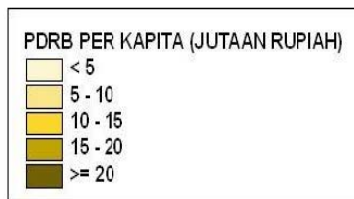
■ IPM
■ IKK



Lampiran 17 : Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Bali dan Nusa Tenggara

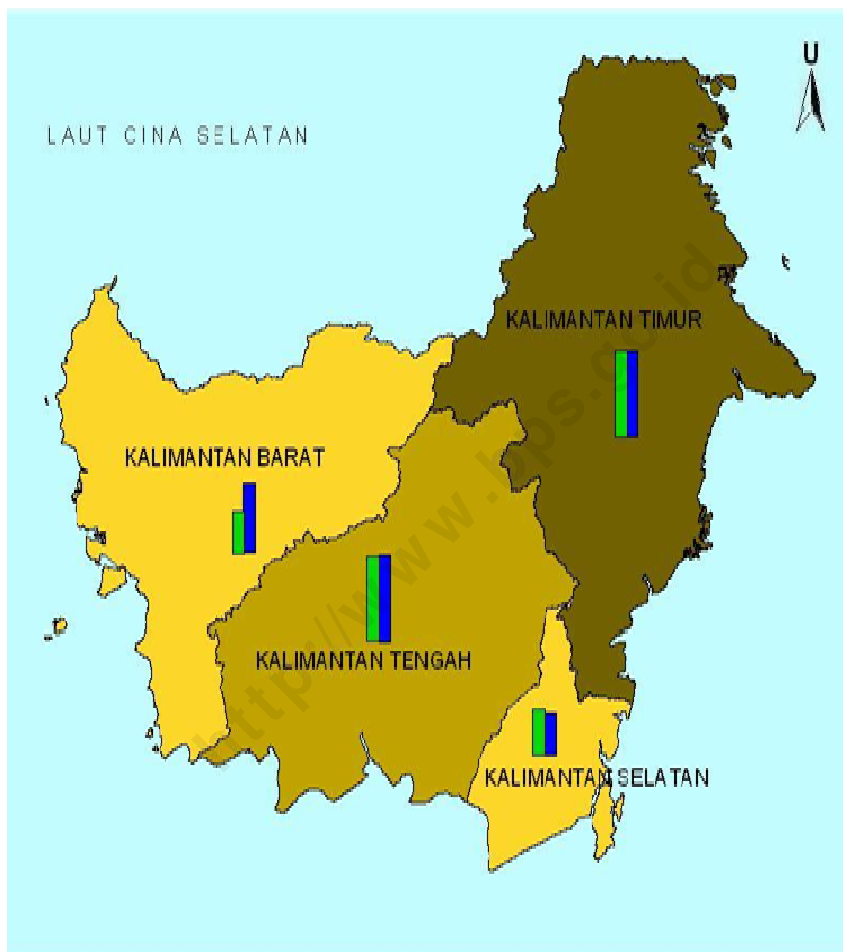


■ IPM
■ IKK



0 200 400 Kilometers

Lampiran 18 : Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan



IPM

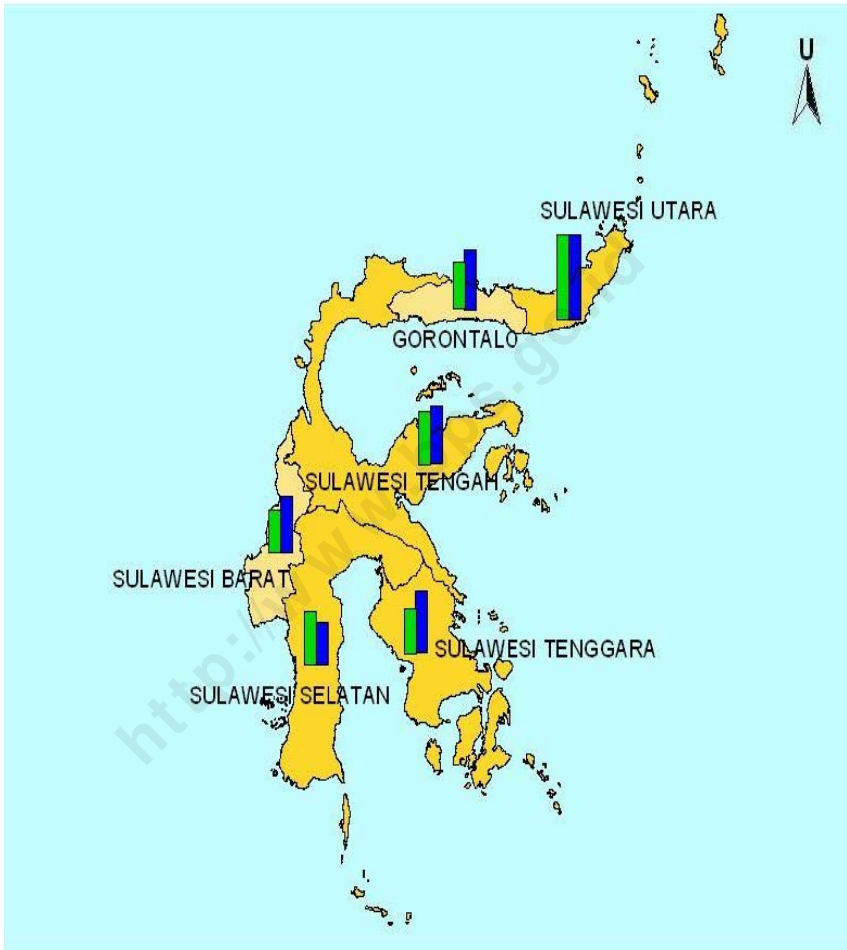
IKK

PDRB PER KAPITA (JUTAAN RUPIAH)

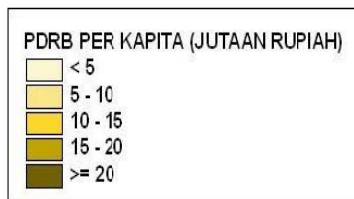
< 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
>= 20

0 200 400 Kilometers

Lampiran 19 : Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Sulawesi

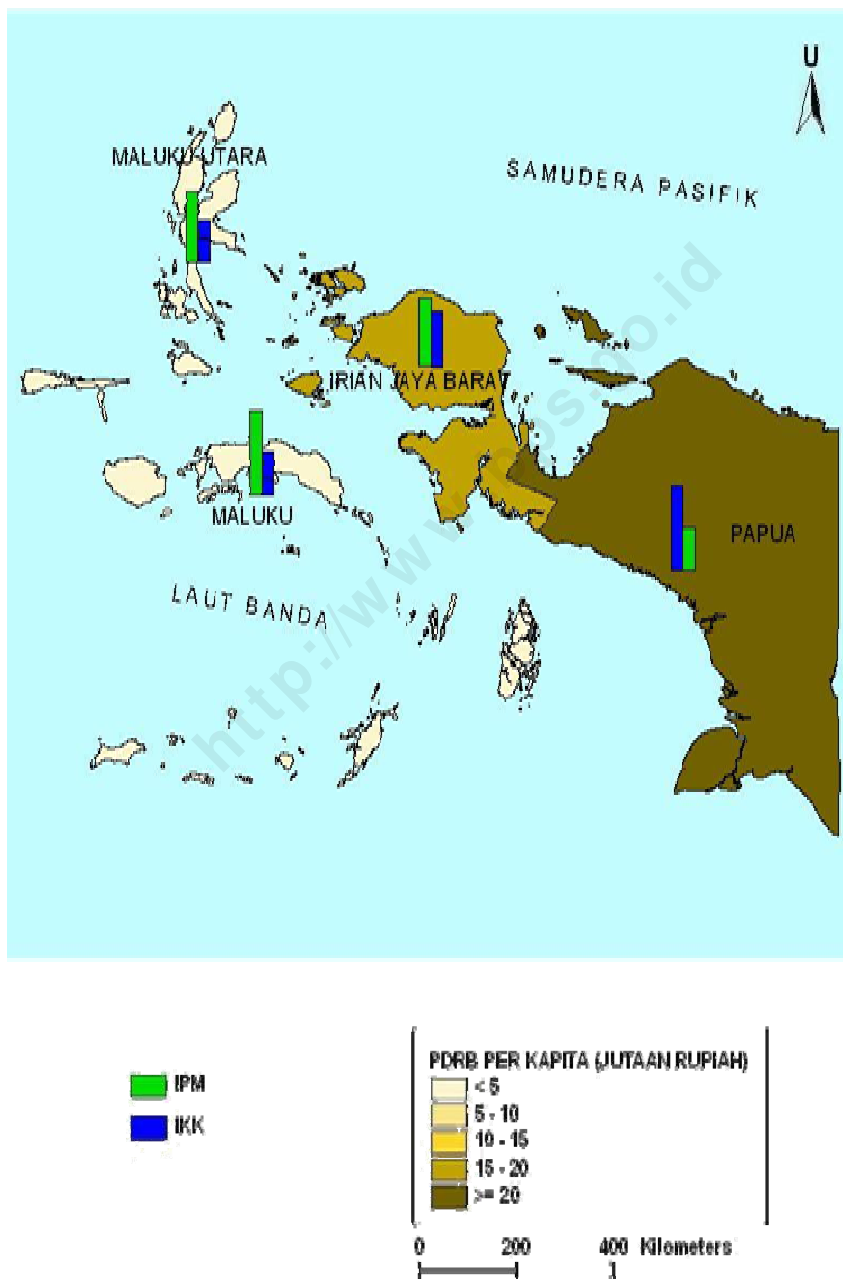


■ IPM
■ IKK



0 200 400 Kilometers

Lampiran 20 : Peta IPM, IKK, dan PDRB Per Kapita Menurut Provinsi di Pulau Maluku dan Papua





DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Badan Pusat Statistik

Jl. Dr. Sutomo No. 6-8 Jakarta 10710, Kotak pos 1003 Jakarta 10010

Telp. (021) 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax. (021) 3857046

Homepage : <http://www.bps.go.id>, Email : bpsHQ@bps.go.id